Dp3ap2kb
Kab. Tanah Laut

BerAKHLAK

#bangga melayani bangsa

Laporan Kinerja

2025

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

(0512) 22855

mail@dp2kbp3a.tanahlautkab.go.id/dp2kbp3a.tanahlaut.go.ig

Komplek perkantoran gagas, Jl. A. Syairani, Angsau, Kec. Pelaihari, Kabupaten Tanah

IKHTISAR EKSEKUTIF

- **Mekanisme Penyusunan**

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Laut berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negera Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja.

Setiap Program dan kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kinerja atau hasil akhir kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- **Mekanisme Pengukuran**

Prioritas kebijakan pembangunan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Laut adalah “Meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap program pengendalian penduduk KB, Ketahanan dan pemberdayaan keluarga serta meningkatkan perlindungan perempuan dan Anak dari barbagai tindak kekerasan, eksploitasi, Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Diskriminasi”.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2025 telah menetapkan 1 (satu) tujuan, 2 (dua) sasaran strategis.

Ke 2 (dua) sasaran strategis tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 3 (tiga) indikator kinerja.

Ikhtisar pencapaian sasaran tahun 2025 sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Laut yang mendukung kebijakan strategis Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yaitu Pro Poor / Pro Job dan SDG's. Selain itu, juga mendukung kebijakan strategis Pemerintah Pusat yaitu Pro Poor dan SDG's, capaian kinerja dengan perincian untuk :

- **Sasaran Satu (1) :** Meningkatnya Pengarustamaan Gender dan Pemenuhan Hak Anak dengan indikator adalah :
  - ✓ Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) realisasi - dari target 77,13 dengan capaian kinerja -% (data tidak tersedia di BPS)
  - ✓ Nilai Kota/Kabupaten Layak Anak (KLA) realisasi 501 dari target 605 dengan capaian kinerja 82,81%
- **Sasaran Dua (2) :** Terkendalinya Penduduk dengan indikator adalah :
  - ✓ Total Fertility Rate (TFR) realisasi 2,20 dari target 2,19 dengan capaian kinerja 99,54%

➢ **Pemanfaatan Laporan Kinerja untuk :**

- Bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan;
- Penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;
- Penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;
- Penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji syukur kami ucapkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan limpahan rahmat dan karunianya sehingga Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025 ini dapat kami selesaikan secara tepat waktu. Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Tanah Laut merupakan sebuah laporan yang merupakan gambaran pelaksanaan kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Tanah di tahun 2025. Laporan ini dimaksudkan sebagai bahan informasi dan evaluasi serta tanggung jawab pelaksanaan kinerja yang telah dilaksanakan pada tahun 2025.

Tentunya banyak kekurangan yang terdapat dalam Laporan Kinerja ini sehingga tegur sapa, saran dan masukan kami perlukan untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja yang kami sampaikan ini dapat memenuhi kriteria sebagai Laporan Kinerja yang diharapkan oleh pemerintah.

Pelaihari, Februari 2026
Kepala Dinas,

MARIA ULFAH, S,Psi, M.M
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP.197911132005012008

DAFTAR ISI

Bab I.	PENDAHULUAN	1
A.	Latar Belakang	1
B.	Maksud dan Tujuan	2
C.	Dasar Hukum	3
D.	Cascading Kinerja	6
E.	Proses Bisnis, Tugas dan Fungsi dan Struktur Organisasi	6
F.	Isu Strategis Perangkat Daerah	13
G.	Dukungan SDM, Sarana, Prasarana dan Anggaran	15
H.	Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun Sebelumnya	19
I.	Sistematika Penyajian	22
Bab II.	PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	24
A.	Visi RPJMD	24
B.	Misi RPJMD	25
C.	Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah	26
D.	Strategi dan Arah Kebijakan	30
F.	Perjanjian Kinerja	31
Bab III.	AKUNTABILITAS KINERJA	34
Bab IV.	PENUTUP	148
A.	Kesimpulan	148
B.	Strategi Peningkatan Kinerja	148

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Tata Kelola Pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel (*good governance*) merupakan persyaratan mutlak bagi setiap pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 menjelaskan bahwa penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan untuk penyusunan Laporan Kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan secara selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja digunakan dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja yang disusun oleh setiap Instansi Pemerintah.

Kepala Perangkat Daerah menyusun Laporan Kinerja secara periodik setiap akhir tahun anggaran sebagai media pertanggungjawaban

dan sebagai perwujudan kewajiban unit kerja untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu Laporan Kinerja disusun sebagai media pertanggungjawaban Kepala Perangkat Daerah kepada Bupati dan masyarakat serta pihak lain yang berkepentingan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) sesuai dengan tuntutan masyarakat.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja (LKj) merupakan sarana bagi instansi pemerintah untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang telah dicapai dan bagaimana proses pencapaian berkaitan dengan mandat yang telah diterima instansi tersebut. Adapun maksud penyusunan LKj tahun 2025 ini adalah:

a. Untuk mengetahui program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2025.
b. Untuk mengukur tingkat pencapaian atau keberhasilan dan kegagalan sasaran strategis yang telah dilaksanakan selama tahun 2025.
c. Sebagai dasar untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahun berikutnya.
d. Sebagai bahan evaluasi kinerja instansi Pemerintah Daerah.
e. Sebagai bahan laporan Kinerja Pimpinan.

Tujuan penyusunan dan penyampaian LKj adalah :

a. Untuk mewujudkan akuntabilitas/pertanggungjawaban instansi pemerintah kepada pihak-pihak yang memberi mandat/amanah.
b. Untuk pengambilan keputusan dan pelaksanaan perubahan-perubahan ke arah perbaikan, untuk efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta anggaran.

c. Upaya perbaikan dan peningkatan kinerja Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di masa yang akan datang

C. DASAR HUKUM

Penyusunan Laporan Kinerja tahun 2025 berlandaskan pada peraturan perundang undangan yang telah ditetapkan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Adapun aturan tersebut dalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4438).
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
4. Peraturan Pemerintah republik Indonesia nomor 21 tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
6. Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 pasal 28 I ayat (2) menegaskan bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif;
7. Undang-Undang Dasar RI Nomor 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita;

8. Undang-Undang Dasar Nomor 30 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) pada pasal 3 disebutkan bahwa "Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat yang sama dan sederajat ";
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu terutama pada bagian keterwakilan perempuan 30 % di parlemen;
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
12. Tap MPR RI Nomor 4 / MPR / 1999 tentang GBHN 1999, dijelaskan bahwar bidang sosial dan budaya, kedudukan dan peranan perempuan terdiri dari
    - Meningkatkan kedudukan dan peran perempuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui kebijakan nasional yang diemban oleh lembaga yang mampu memperjuangkan Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG).
    - Meningkatkan kualitas peran dan kemandirian organisasi perempuan dengan tetap mempertahankan nilai persatuan dan kesatuan, serta nilai historis perjuangan perempuan dalam melanjutkan usaha pemberdayaan perempuan serta kesejahteraan keluarga dan masyarakat.
13. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
14. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak;
15. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2001 tentang Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;
16. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;
17. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Exploitasi Seksual Komersial Anak;

18. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafiking perempuan dan anak);
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan di Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengarusutamaan Gender di Daerah;
21. Peraturan Bersama Tiga Menteri : Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17/Men-PP/Dep.II/VII/2005, Nomor 1/PB/2005 tanggal 18 Juli 2005 tentang Percepatan Pemberantasan Buta Aksara Perempuan;
22. Kesepakatan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Menteri Kesehatan dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan tanggal 12 Maret 2002 tentang Gerakan Sayang Ibu;
23. Kesepakatan Bersama antara Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Kesehatan, dan Menteri Sosial Nomor : 75/HUK/2002 perihal : Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak;
24. Komitmen Sentani dalam memerangi HIV/AIDS di Indonesia antara Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI dengan Gubernur 7 (Tujuh) Daerah tanggal 19 Juni tahun 2004;
25. Nota Kesepahaman antara Departemen Sosial RI, Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan, Departemen Komunikasi dan Informasi RI dengan PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. Dan Plan Indonesia Nomor : K. Tel. 232/HK 840/UTP cc/06 dan Nomor : 206/Plan/CO/CD/VII/2006.
26. Peraturan kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor : 143/HL-010/B5/2009.
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor : 13 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak korban kekerasan.

28. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Laut Nomor 118 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

D. Cascading Kinerja

Cascading kinerja adalah proses menurunkan (menerjemahkan) tujuan dan indikator kinerja dari level yang lebih tinggi ke level yang lebih rendah secara sistematis, sehingga setiap unit kerja dan pegawai memiliki target yang selaras dengan tujuan organisasi sebagaimana tercantum pada lampiran.

E. Proses Bisnis, Tugas dan Fungsi dan Struktur Organisasi

1) Proses Bisnis

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana telah menyusun Peta Proses Bisnis berdasarkan PermenpanRB Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah dengan gambaran sebagai berikut:

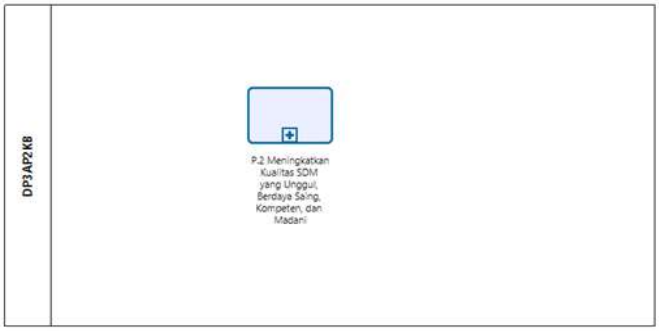

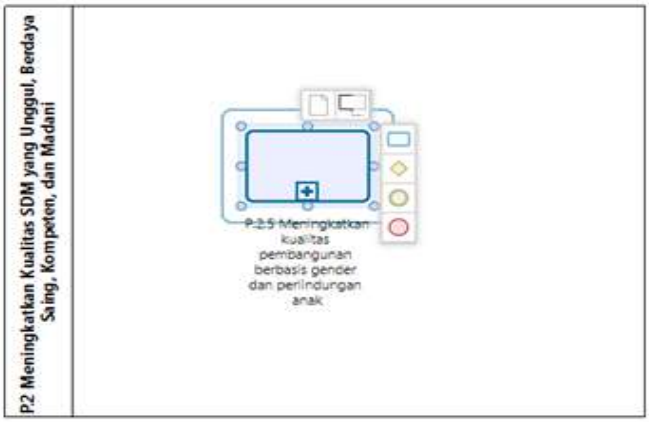

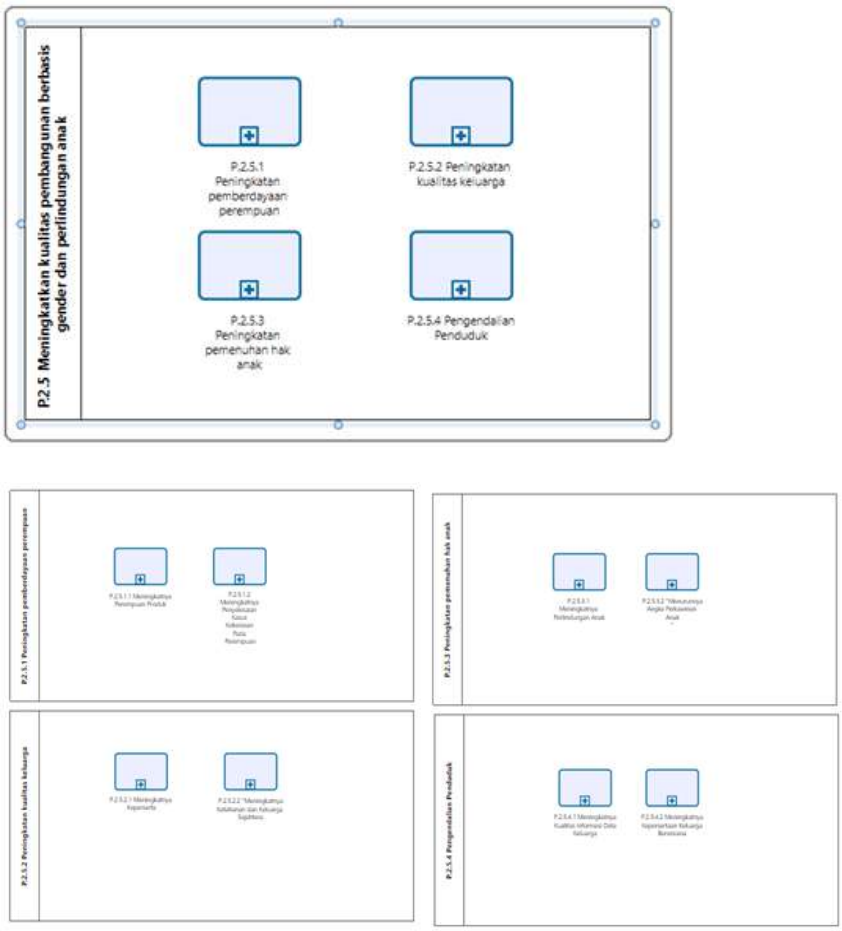

Gambar 1. Peta proses bisnis level 0-3 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

2) Tugas dan Fungsi dan Struktur Organisasi

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Laut merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai penyelenggara urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dalam bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 118 Tahun 2023 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah dengan Susunan Organisasi sebagai berikut:

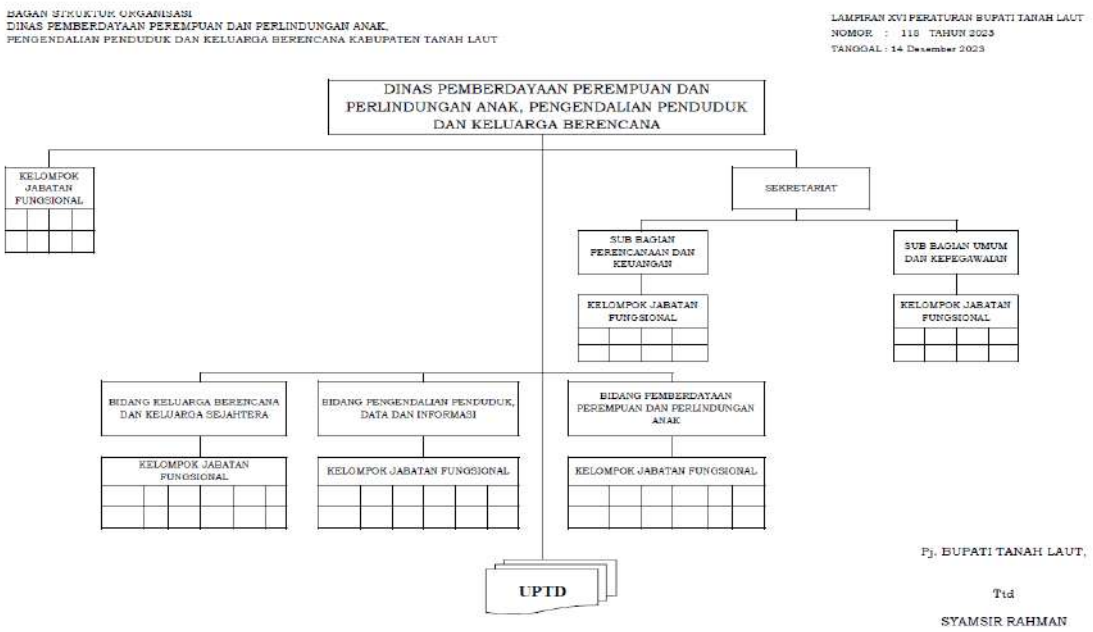

Gambar 1.4
Bagan Struktur Organisasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Laut

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 118 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagai penyelenggara urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dalam bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah dijabarkan ke dalam tugas dan fungsi-fungsi yang harus dijalankan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, yakni:

1. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dalam bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan

anak, bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

a. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi:
   1) perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan perempuan
   2) dan perlindungan anak, bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana
   3) pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana
   4) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana
   5) pelaksanaan administrasi dinas
   6) pembinaan UPTD dinas; dan
   7) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat
   a. Sekretariat sebagaimana mempunyai tugas:
      mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan urusan kesekretariatan yang meliputi:
      1) ketatausahaan
      2) administrasi dan kebutuhan rumah tangga
      3) kehumasan dan keprotokolan
      4) kepegawaian
      5) keuangan
      6) perencanaan program
      7) pengumpulan data
      8) penyusunan laporan.
   b. Untuk melaksanakan tugas sekretariat mempunyai fungsi:
      1) pengoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

2) pemberian pelayanan administrasi kepada bidang-bidang lain di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
3) penyusunan rencana program kerja dan anggaran belanja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
4) penyiapan peraturan perundang-undangan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah;
5) penyelenggaraan urusan tata usaha, rumah tangga/perlengkapan;
6) pelaksanaan urusan kepegawaian, pengelolaan keuangan serta penataan barang;
7) penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan;
8) pengoordinasian pelaksanaan, pengumpulan dan penyusunan data, penilaian, pemantauan evaluasi dan analisa data hasil pelaksanaan tugas, penyiapan dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja dan penyusunan statistik dan dokumentasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
9) pengoordinasiaan urusan kedinasan yang menyangkut tata persuratan dinas, pendataan dan pengumpulan bahan pelaporan kedinasan;
10) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
11) pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya

3. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

   a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas, mengawasi dan melaporkan urusan perencanaan dan administrasi keuangan.

4. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas, mengawasi dan melaporkan urusan umum dan kepegawaian.

5. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

a. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.

b. Untuk melaksanakan tugas Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera mempunyai fungsi:

1) penyusunan rencana kerja bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
2) perumusan kebijakan bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
3) pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
4) penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
5) pelaksanaan kebijakan keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
6) pelaksanaan kebijakan ketahanan keluarga;
7) pelaksanaan kebijakan pemberdayaan keluarga
8) pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera
9) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
10) pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

6. Bidang Pengendalian Penduduk Data dan Informasi

a. Bidang Pengendalian Penduduk Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pembinaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pengendalian penduduk, data dan informasi.

7. Untuk melaksanakan tugas Bidang Pengendalian Penduduk Data dan Informasi mempunyai fungsi:
   1) penyusunan Renja bidang penegendalian peduduk, data dan informasi;
   2) perumusan kebijakan bidang pengendalian penduduk, data dan informasi;
   3) pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan bidang pengendalian penduduk, data dan informasi;
   4) penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengendalian penduduk, data dan informasi;
   5) pelaksanaan kebijakan advokasi, penggerakan dan informasi;
   6) pelaksanaan kebijakan analisa data pelaporan dan statistik program;
   7) pelaksanaan kebijakan pengendalian penduduk;
   8) pengawasan, pengendalian, evaluasi pelaksanaan pengendalian penduduk, data dan informasi;
   9) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
   10) pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
8. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
   a. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pembinaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
   b. Untuk melaksanakan tugas Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi:
      1) penyusunan Renja bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
      2) perumusan kebijakan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
      3) pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
      4) penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

5) pelaksanaan kebijakan pemberdayaan perempuan meliputi pengarusutamaan gender kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, dan kualitas keluarga
6) pelaksanaan kebijakan perlindungan anak meliputi sistem data gender dan anak, pemenuhan hak anak dan perlindungan anak, perlindungan khusus anak;
7) pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan perempuan dan pemenuhan hak anak;
8) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
9) pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

F. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah di masa yang akan datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis.

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Belum Optimalnya Pengarusutamaan Gender dan Pemenuhan Hak Anak	Rendahnya program/kegiatan Pengarusutamaan Gender pada perangkat daerah yang sudah di evaluasi melalui analisis gender di tingkat Kab. Tanah Laut	Masih rendahnya jumlah lembaga pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang telah di latih Pengarusutamaan Gender
		Kurangnya ketersediaan modal dan pemasaran produk pada kelompok perempuan yang berwirausaha yang telah di bentuk	Tindak lanjut pasca pelatihan pada kelompok perempuan yang berwirausaha masih terbatas
		Masih di temukan tindak kekerasan pada perempuan	Belum tersosialisasi konsep kesetaraan dalam keluarga
		Masih di temukan tindak kekerasan pada anak	Masih tingginya perkawinan pada anak
		Jumlah FAD masih terbatas	Rendahnya hak partisipasi anak

2.	Belum Optimalnya Penggendalian Penduduk	Tingginya angka Pernikahan perempuan di bawah 19 tahun	Masih ada Masyarakat Kab. Tanah Laut kurang memahami arti (8) fungsi keluarga
		Persentase laki-laki ber- KB belum sesuai dengan angka harapan	1) Masih rendahnya persentase kesertaan Kb pria hal ini dikarenakan karena kurangnya pengetahuan pria tentang KB, bahwa KB adalah identik dengan perempuan, salah faham karena vasektomi sama dengan kebiri, kurangnya teladandari tokoh masyarakat, tokoh agama dalam ber KB; 2) efek samping MOP yang masih belum dipahami
		Belum optimal pelayanan KB di lapangan	Kurangnya sarana dan prasarana dalam menunjang pelayanan KB didalam gedung maupun sarana mobilitas layanan KB di lapangan

Berdasarkan identifikasi dan telaah dokumen terkait, terdapat isu-isu strategis pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Laut. Antara lain :

1. Belum Optimalnya Pengarusutamaan Gender dan Pemenuhan Hak Anak
2. Belum Optimalnya Penggendalian Penduduk

G. Dukungan SDM, Sarana, Prasarana dan Anggaran

Pencapaian kinerja organisasi tidak hanya ditentukan oleh perencanaan yang baik, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kecukupan dan kualitas dukungan sumber daya yang tersedia. Empat komponen utama yang berperan penting adalah **Sumber Daya Manusia (SDM)**, **sarana**, **prasarana**, dan **anggaran,** dapat dijelaskan sebagai berikut :

Jumlah ASN pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2025 adalah sebanyak 46 orang yang terdiri dari 26 PNS, 4 PPPK penuh waktu dan 16 PPPK paruh waktu

dengan latar belakang pendidikan sebagaimana tercantum pada tabel berikut :

Tabel 1.1
Jumlah PNS Pergolongan / Pendidikan Tahun 2025

PNS Golongan				PPPK	PPPK Paruh Waktu	**Total**	Pendidikan							**Total**
IV	III	II	I				S2	S1	D-III	D-II	SLTA	SLTP	SD	
6	18	2	0	4	16	**46**	6	15	13	0	12	0	0	**46**

Jumlah kebutuhan pegawai ASN Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai peta jabatan adalah 87 (delapan puluh tujuh) orang. Saat ini, jumlah pegawai yang menduduki posisi tersebut telah mencapai 46 (tujuh puluh enam) orang. Jumlah pegawai ini masih belum mencukupi.

Grafik 1.1

SDM Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Laut

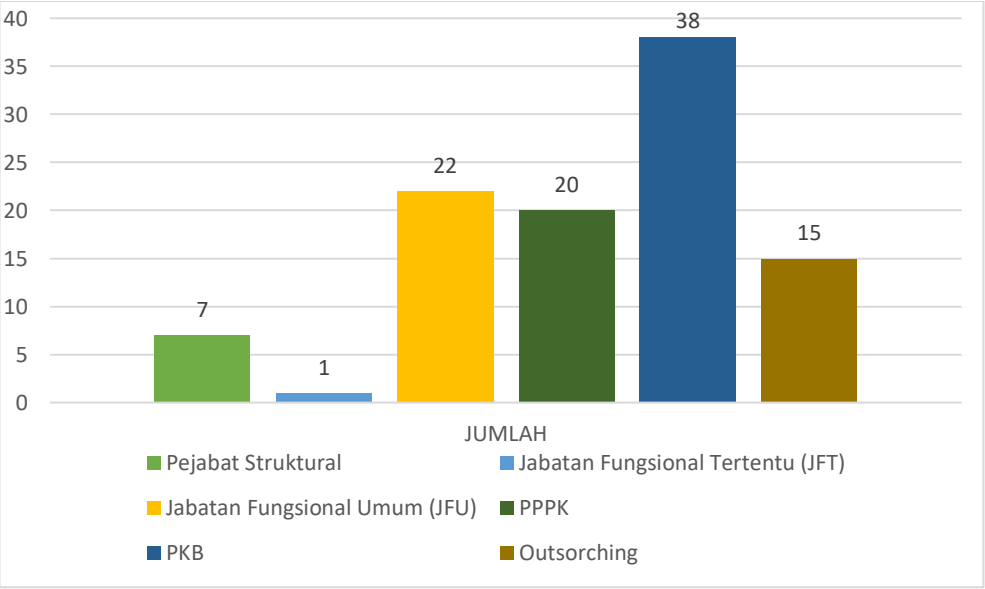

Berdasarkan pada tabel diatas terlihat bahwa terdapat 7 Pejabat struktural, 1 orang jabatan fungsional tertentu (JFT), 22 orang fungsional umum (JFU) dan 20 orang PPPK dengan jumlah keseluruhan 46 pegawai ASN ditambah dengan 38 orang tenaga PKB, dan 15 tenaga outsourching.

Selain didukung oleh sumberdaya manusia, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Laut juga didukung dengan sarana prasarana 426 unit peralatan, 3 jalan irigasi dan jaringan 28 unit gedung dan bangunan. Sedangkan sarana transportasi terdiri 7 unit kendaraan roda empat, dan kendaraan roda dua 55 unit.

Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025

NO	PROGRAM / KEGIATAN		PAGU ANGGARAN (Rp)
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**7,326,649,594.67**
	1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	34,999,004.36
	2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5,442,306,376.98
	3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	70,402,000.00
	4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	530,105,043.89
	5	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	351,298,697.44
	6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	591,788,472.00
	7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	305,750,000.00
II	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**		**1,133,001,532.57**
	1	Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	90,417,689.40
	2	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1,042,583,843.17
III	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**		**202,153,906.00**
	1	Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	60,161,036.00
	2	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	141,992,870.00
VI	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**		**152,806,322.45**
	1	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	152,806,322.45

V	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**		**605,714,517.44**
	1	Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	393,659,671.44
	2	Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	212,054,846.00
VI	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**		**360,825,043.50**
	1	Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	12,366,283.00
	2	Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	348,458,760.50
VII	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**		**5,377,385,327.53**
	1	Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	869,429,908.66
	2	Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	2,900,835,420.00
	3	Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	1,186,745,638.87
	4	Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	420,374,360.00
VIII	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**		**2,744,520,034.40**
	1	Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	982,320,034.40
	2	Kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1,762,200,000
	JUMLAH		**17,903,056,278.56**

H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun Sebelumnya

Berdasarkan Surat Inspektur Kabupaten Tanah Laut Nomor 7001.2.1/227/LHE AKIP/Insp/2025 Tanggal 29 Agustus 2025 Perihal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025 bahwa ada 4 (empat) komponen yang direkomendasikan untuk di tindaklanjuti, yaitu :

No	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggungjawab	Status/ Progres Penyelesaian
1.	Menyusun rumusan terkait cara menetapkan target kinerja yang SMART dalam bentuk berita acara dan disepakati bersama para pihak yang memangku target kinerja dari masing-masing.	Rapat Penyusunan Renstra dan target Kinerja	1 laporan	3 September 2025	Kepala Dinas P2KBP3A	Telah dilaksanakan Rapat Penyusunan Renstra dan target kinerja
		Rapat penyelarasan Renstra dan Pohon Kinerja serta Target Kinerja yang akan di capai	1 laporan	5 September 2025	Kepala Dinas P2KBP3A	Telah dilaksanakan Rapat penyelarasan Renstra dan Pohon Kinerja serta Target Kinerja yang akan di capai

		Penandatanganan berita acara dan disepakati bersama para pihak yang memangku target kinerja dari masing-masing.	1 Dokumen	24 September 2025	Kepala Dinas P2KBP3A	Akan dilaksanakan Penandatanganan berita acara dan disepakati bersama para pihak yang memangku target kinerja dari masing-masing
2.	Melakukan evaluasi dan penyempurnaan atas SOP Pengumpulan dan Pengukuran data kinerja yang telah ada, khususnya dalam mengantisipasi kondisi ketika data belum tersedia saat penyusunan laporan.	Menyusun SOP Pengumpulan dan Pengukuran data kinerja yang baru	1	10 September 2025	Kepala Dinas P2KBP3A	Telah disusun SOP Pengumpulan dan Pengukuran data kinerja yang baru

3.	Melakukan monitoring kinerja secara berkala dan terdokumentasi, disertai dengan analisa yang lengkap, memuat kondisi capaian kinerja triwulanan, kendala yang dihadapi, rencana aksi dan tindak lanjut rencana aksi untuk triwulan berikutnya.	Menyusun Laporan Kinerja Triwulan I, Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	4 Laporan	April, Juli, Oktober 2025 dan Januari 2026	Kepala Dinas P2KBP3A	Telah disusun Laporan Triwulan I dan Triwulan II
4.	Melakukan perbaikan dan penyempurnaan dokumen perencanaan dan pelaporan, serta melakukan pengukuran kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi kinerja berkala.	Menyampaikan Laporan Realisasi Fisik dan Realiasi Keuangan pada Sistem Si-Monev	12 laporan	Januari, Pebruari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, Nopember dan Desember 2025	Kepala Dinas P2KBP3A	Telah disampaikan Laporan Realisasi Fisik dan Realiasi Keuangan pada Sistem Si-Monev
		Melaksanakan revisi/pergeseran anggaran untuk sub kegiatan yang tidak bisa direalisasikan	3 Dokumen	Januari, Maret, April 2025	Kepala Dinas P2KBP3A	Telah disusun revisi/pergeseran anggaran untuk sub kegiatan yang tidak bisa

						direalisasikan
		Menyusun Rencana Kerja perubahan anggaran Tahun Anggaran 2025 berdasarkan hasil evaluasi kegiatan pada Triwulan I	1 Dokumen	Juni 2025	Kepala Dinas P2KBP3A	Telah disusun Rencana Kerja perubahan anggaran Tahun Anggaran 2025

I. Sistematika Penyajian

IKHTISAR EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Memaparkan tentang latar belakang penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Laut, menggambarkan struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Laut, aspek strategis organisasi, produk dan layanan.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Memaparkan tentang Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Laut yang meliputi Visi, Misi, tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja utama dan program/kegiatan dan sub kegiatan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menyajikan tentang capaian kinerja organisasi (capaian IKU dan capaian Sasaran Strategis organisasi) dan akuntabilitas keuangan (ringkasan realisasi anggaran menurut program dan kegiatan Tahun 2024 dan Tahun 2025 serta ringkasan anggaran dan realisasi berdasarkan program dan kegiatan.

BAB IV PENUTUP

Menampilkan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi, strategi di masa mendatang untuk meningkatkan kinerjanya dan penghargaan serta inovasi yang telah diraih.

BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Visi RPJMD

Visi merupakan suatu pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana Pemerintah Daerah bekerja, beraktualisasi dan berinovasi agar tetap eksis, kompatibel dan produktif. Jadi, Visi merupakan suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang merupakan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Pemerintah Daerah.

Pengertian Visi diartikan sebagai gambaran spesifik tentang apa yang ingin dicapai dan Misi adalah bagaimana Visi itu diwujudkan, kemudian berdasarkan Visi dan Misi tersebut kemudian dirumuskan Tujuan serta Sasaran-sasaran yang akan dicapai beserta Indikator-indikatornya. Visi pembangunan daerah Kabupaten Tanah Laut untuk periode RPJMD 2025-2029 sesuai dengan visi kepala daerah terpilih adalah sebagai berikut:

“Bersama Membangun Tanah Laut Simpun, Maju, dan Berkelanjutan)”

Visi tersebut mencerminkan komitmen kuat segenap unsur Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut sebagai pendukung utama (*supporting force*) penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dengan demikian Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak diharapkan mampu menampilkan perannya sebagai mitra strategis dan fasilitator yang efektif bagi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak. Peran ini diwujudkan melalui koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan daerah (Perda, Ranperda) serta penyediaan dukungan administratif, analisis dan teknis yang profesional. Dengan dukungan yang cepat,

responsif dan akurat, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dapat memberikan daya dukung yang kuat bagi fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Hal ini pada akhirnya akan mendorong seluruh proses pembangunan daerah agar berjalan tertib, aspiratif dan selaras dengan dinamika perkembangan serta tuntutan kemajuan masa depan.

Komitmen untuk mewujudkan Visi yang telah dirumuskan merupakan suatu tantangan yang harus dihadapi oleh segenap aparatur di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Laut. Sebagai bentuk kesungguhan dalam mewujudkan Visi yang telah dirumuskan tersebut. Pemerintah Daerah menetapkan Misi sebagai gambaran aktivitas yang sudah seharusnya dilaksanakan. Dengan Misi maka akan terlihat secara jelas kebutuhan apa yang harus dipenuhi oleh organisasi, siapa yang memiliki kebutuhan tersebut, dan bagaimana cara memenuhinya.

B. Misi RPJMD

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi pembangunan daerah. misi tersebut adalah :

1. Membangun SDM yang Unggul dan Berdaya Saing Dengan Nilai-nilai Agama
2. Membangun Ekonomi Inklusif Untuk Penurunan Kemiskinan Dengan Infrastruktur Yang Merata Dan Lingkungan Hidup Berkualitas
3. Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Dinamis.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Visi, Misi Bupati/Wakil Bupati sekaligus menjadi Visi, Misi bagi SKPD, untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Laut mengemban Misi ke: 1 “Membangun SDM yang Unggul dan Berdaya Saing Dengan Nilai-nilai Agama”.

C. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah

Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 maka disusunlah RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah. Dalam rangka menjaga keselarasan dengan dokumen perencanaan dan menjaga kesinambungan pembangunan antar periode, maka Pemerintah Kabupaten Tanah Laut merumuskan sebuah konsep Rencana RPJMD 2025-2029 yang mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.

1. Agenda Pembangunan RPJPN 2025-2045
2. Agenda Pembangunan RPJMN 2025-2029
3. Misi RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029.
4. Misi RPJPD Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2045
5. Isu-isu strategis Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029.

Dari hasil penyandingan muatan konsideran tersebut, teridentifikasi tiga aspek yang menjadi kesamaan dan dapat dijadikan fokus dari perencanaan periode 2025-2029. Ketiga aspek tersebut yaitu: Pembangunan manusia, pembangunan ekonomi dan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan pembangunan Tata Kelola Pemerintahan.

Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana termasuk dalam mendukung tujuan kesatu yaitu Meningkatkan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing dengan sasaran yaitu Meningkatnya Kesetaraan Gender. Adapun indikator keberhasilan dari sasaran Meningkatnya Kesetaraan Gender adalah Indeks Ketimpangan Gender.

Guna mewujudkan tujuan dan sasaran sebagaimana dimaksud diatas maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menetapkan tujuan dan sasaran yang dituangkan pada Dokumen Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025-2029. Adapun tujuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak serta Terwujudnya Keluarga yang Berkualitas dan sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah Meningkatnya Pangarusutamaan Gender dan Pemenuhan Hak Anak , serta Terkendalinya Penduduk.

Tabel 2.1
Matrik Hubungan Antara Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO	TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Realisasi Tahun 2024	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak serta Terwujudnya Keluarga yang Berkualitas		Indeks Ketimpangan Gender (Indeks)	0,473	0,47	0,45	0,43	0,41	0,39	0,37
			Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) (Nilai)	62,6	64	65,2	66,4	67,6	68,7	69,7
			Indeks Perlindungan Anak (IPA) (Nilai)	62,73	62,83	62,93	63,03	63,13	63,23	63,33
	1.	Meningkatnya Pangarusutamaan Gender dan Pemenuhan Hak Anak	Indeks Pemberdayaan Gender (Nilai)	76,45	77,13	77,81	78,49	79,17	79,85	80,53
			Nilai Kota/Kabupaten Layak Anak (Nilai)	575	605	650	705	755	805	850
	2.	Terkendalinya Penduduk	TFR (Total Fertility Rate) (Angka)	2,2	2,19	2,18	2,16	2,15	2,15	2,14

1. Indikator Kinerja Utama

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029 berdasarkan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 04 Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Laut Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN RUMUS
1	Meningkatnya Pangarusutamaan Gender dan Pemenuhan Hak Anak	Indeks Pemberdayaan Gender (Nilai)	Indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Komponen pembentukan IDG mencakup: 1. Keterlibatan Perempuan di parlemen 2. Jumlah Perempuan sebagai tenaga profesional 3. Sumbangan pendapatan Perempuan
		Nilai Kota/Kabupaten Layak Anak (Nilai)	KLA diukur berdasarkan 31 indikator yang terbagi dalam 5 klaster utama: hak sipil dan kebebasan, keluarga dan pengasuhan alternatif, Kesehatan dasar kesejahteraan, Pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya, serta perlindungan khusus.
	Terkendalinya Penduduk	TFR (Total Fertility Rate) (Angka)	$TFR = \sum$ ASFR X 5/1000 (interval kelompok umur)/(1000 penduduk pada usia 15-49 tahun)

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN RUMUS
			TFR adalah jumlah anak rata-rata yang dilahirkan oleh seorang perempuan selama masa reproduksinya. ASFR atau Age-Specific Fertility Rate, adalah ukuran demografi yang menunjukkan angka kelahiran pada kelompok umur tertentu (misalnya, 15-19 tahun) per 1.000 perempuan pada kelompok umur yang sama dalam satu tahun tertentu.

D. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya dijabarkan dalam kebijakan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang terkait dan ditetapkan oleh yang berkewenangan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah ataupun masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan yang diemban oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Laut.

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
1.	Meningkatkan kualitas hidup perempuan, melindungi hak-hak anak, dan mencegah segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak	pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui penguatan pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan	Meningkatkan Pengarusutamaan Gender dan Pemenuhan Hak Anak	
2.	Mewujudkan keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera melalui pengendalian pertumbuhan penduduk dan peningkatan kualitas keluarga	Optimalisasi nilai agama dan budaya serta peran keluarga dalam pembangunan karakter masyarakat	Terkendalinya Penduduk	

E. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja, yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja, yaitu :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.

4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 (hanya eselon II)

No.	Kinerja Utama (Sasaran Renstra)		Indikator Kinerja Utama	Target	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya Pangarusutamaan Gender dan Pemenuhan Hak Anak	1	Indeks Pemberdayaan Gender (Nilai)	77,13	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		2	Nilai Kota/Kabupaten Layak Anak (Nilai)	605	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	Terkendalinya Penduduk	1	TFR (Total Fertility Rate) (Angka)	2,19	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Untuk mewujudkan kinerja yang telah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja yang terdiri dari 2 sasaran di atas, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana didukung dengan dengan APBD sebesar Rp. 10.576.406.683,89. Rincian program dan anggaran untuk mendukung masing masing sasaran terdapat pada table berikut:

Tabel 2.6
Anggaran Penunjang Sasaran Strategis Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Program	Anggaran (Rp)
1	2	3	4
1	Meningkatnya Pangarusutamaan Gender dan Pemenuhan Hak Anak	program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	1.133.001.532,57
		program perlindungan perempuan	202.153.906,00
		program pemenuhan hak anak (PHA)	152.806.322,45
		program perlindungan khusus anak	605.714.517,44
2	Terkendalinya Penduduk	program pengendalian penduduk	360.825.043,50
		program pembinaan keluarga berencana (KB)	5.377.385.327,53
		program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS)	2.744.520.034,40
JUMLAH			**10.576.406.683,89**

Selain itu, terdapat program penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota yang menunjang kegiatan internal sekretariat sebesar Rp. 7.326.649.594,67.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas diartikan sebagai kemampuan untuk menjawab atas mandat yang diberikan kepada pengemban amanat, sedangkan kinerja diartikan sebagai prestasi kerja pengemban amanat atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, laporan ini mengungkapkan capaian kinerja sasaran dan hasil (*outcome*) yang dicapai dalam tahun 2025 Kabupaten Tanah Laut.

Laporan Kinerja tahun 2025 ini merupakan laporan kinerja tahun pertama Renstra 2025-2029 dan menyajikan pengukuran capaian indikator kinerja sasaran, sebagaimana yang dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Penetapan indikator kinerja dan targetnya merupakan prasyarat mutlak agar mekanisme suatu pengukuran kinerja dapat diterapkan sehingga capaian kinerja suatu instansi dapat diketahui tingkat keberhasilannya.

Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang telah dicapai. Dalam hal ini pembandingan tersebut dilakukan terhadap indikator kinerja, baik indikator kinerja hasil dari indikator kinerja sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja maupun kinerja tahun berjalan terhadap tahun sebelumnya. Terhadap terjadinya celah kinerja (*performance gap*),dilakukan analisis penyebab terjadinya celah kinerja tersebut, serta tindakan- tindakan perbaikan apa yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang.

Sesuai dengan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025-2029 terdapat 2 sasaran dengan 3 indikator, dengan hasil pengukuran rata-rata capaian IKU telah memenuhi kriteria **Tinggi** atau dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 91,18%.

A. AKUNTABILITAS KINERJA

1. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama bahwa IKU disusun dan ditetapkan sendiri oleh setiap organisasi dalam rangka mengukur keberhasilan organisasi secara menyeluruh dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029 berdasarkan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 25 Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1

Indikator Sasaran Strategis

Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak serta Terwujudnya Keluarga yang Berkualitas							
NO	**SASARAN STRATEGIS**	**INDIKATOR KINERJA**		**TARGET**	**REALISASI**	**CAPAIAN**	**KATEGORI**
1	**2**	**3**		**4**	**5**	**6**	**7**
1	Meningkatnya Pangarusutamaan Gender dan Pemenuhan Hak Anak	1	Indeks Pemberdayaan Gender (Nilai)	77.13	Belum rilis	-	-
		2	Nilai Kota/Kabupaten Layak Anak (Nilai)	605	501	82.81%	Tinggi
2	Terkendalinya Penduduk	1	TFR (Total Fertility Rate) (Angka)	2.19	2.20	99.54%	Sangat Tinggi
Rata-rata Capaian Kinerja Tahun 2025						91,18%	Tinggi

2. ANALISA CAPAIAN KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Capaian kinerja disajikan sesuai dengan keselarasan antara Renstra dengan penjabaran dalam perencanaan tahunan berupa dokumen rencana kinerja tahunan dan penetapan kinerja. Keselarasan mencakup visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan target kinerja dalam tahun 2025. Sesuai dengan dokumen Renstra 2025-2029, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana telah menetapkan 1 (Satu) tujuan. Masing-masing tujuan tersebut lebih konkrit dijabarkan lagi menjadi 2 sasaran, dan untuk mengukur pencapaian sasaran digunakan indikator kinerja sebanyak 3 buah.

Dalam rangka memberikan kesimpulan pengukuran kinerjanya, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut menetapkan kategorisasi pencapaian kinerja sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah berdasarkan capaian rata-rata atas indikator kinerja menjadi lima kategori sebagai sebagai berikut :

Tabel 3.4

Pengelompokkan Capaian Kinerja

URUTAN	RENTANG CAPAIAN	KATEGORI CAPAIAN
I	91% kurang dari sama dengan 100%	Sangat Tinggi
II	76% kurang dari sama dengan 90%	Tinggi
III	66% kurang dari sama dengan 75%	Sedang
IV	51% kurang dari sama dengan 65%	Rendah
V	kurang dari sama dengan 50%	Sangat Rendah

Ada dua jenis rumus pengukuran capaian kinerja yang dapat dilihat pada Tabel 3.5 sebagai berikut :

Tabel 3.5

Rumus Pengukuran Capaian Kinerja

KONDISI	URAIAN	RUMUS
Asumsi I (kondisi umum)	*Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, atau sebaliknya jika realisasi semakin rendah pencapaian kinerja semakin rendah*	**Realisasi ---------- X 100% Target**
	Contoh: jumlah produksi padi, angka partisipasi murni.	
Asumsi II (kondisi tidak umum)	*Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah,*	**Target ---------- X 100% Realisasi**
	Atau sebaliknya jika realisasi makin rendah pencapaian kinerja semakin baik,	**Target ---------- X 100% Realisasi**
	Contoh: angka kemiskinan, angka kematian	

Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai di atas adalah dengan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran. Adapun rincian dan analisis capaian kinerja masing-masing sasaran dan indikator sasaran sesuai dengan Tujuan adalah sebagai berikut :

TUJUAN 1

Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak serta Terwujudnya Keluarga yang Berkualitas

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Laut menetapkan tujuan ke I yaitu **Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak serta Terwujudnya Keluarga yang Berkualitas**.

Untuk mengukur keberhasilan tujuan tersebut, ditetapkan 3 indikator yaitu Indeks Ketimpangan Gender (Indeks), Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) (Nilai), dan Indeks Perlindungan Anak (IPA) (Nilai).

Tabel 3.1.1
Tujuan dan indikator tujuan I

No	Tujuan Pembangunan	Indikator Tujuan	Satuan	Target 2025
1	**Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak serta Terwujudnya Keluarga yang Berkualitas**	Indeks Ketimpangan Gender (Indeks)	Nilai	0.471
		Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) (Nilai)	Angka	62.83
		Indeks Perlindungan Anak (IPA) (Nilai)	Angka	64

Untuk mencapai tujuan tersebut, ditetapkan 2 sasaran yaitu:

1) Meningkatnya Pangarusutamaan Gender dan Pemenuhan Hak Anak
2) Terkendalinya Penduduk

Analisa Pencapaian Sasaran Strategis 1
Meningkatnya Pangarusutamaan Gender dan Pemenuhan Hak Anak

Meningkatnya Pangarusutamaan Gender dan Pemenuhan Hak Anak diukur melalui 2 indikator dengan realisasi dan capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.1.2
Capaian Kinerja Terhadap Target 2025

NO	Sasaran	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI			TAHUN 2025		
				TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya Pangarusutamaan Gender dan Pemenuhan Hak Anak	Indeks Pemberdayaan Gender (Nilai)	Nilai	73.54	76,45	76,98	77,13	Belum Rilis	-
		Nilai Kota/Kabupaten Layak Anak (Nilai)	Nilai	575,25	575,75	575,75	605	501	82.81%
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA 2025									82.81%

Tabel 3.1.3
Capaian Kinerja Terhadap Target Akhir Renstra

NO	Sasaran	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2025			TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN TAHUN 2025 THD TARGET AKHIR RENSTRA
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN		
1	Meningkatnya Pangarusutamaan Gender dan Pemenuhan Hak Anak	Indeks Pemberdayaan Gender (Nilai)	Nilai	77,13	Data tidak tersedia	-	79.85	-
		Nilai Kota/Kabupaten Layak Anak (Nilai)	Nilai	605 (Madya)	501 (Pratama)	82.81%	805	62.24%

Capaian Kinerja Terhadap Kabupaten/Kota Lain, Provinsi dan Nasional

NO	Sasaran	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Tanah bumbu	Balangan	Banjarbaru	Provinsi	Nasional
1	Meningkatnya Pangarusutamaan Gender dan Pemenuhan Hak Anak	Indeks Pemberdayaan Gender (Nilai)	Nilai	-	-	-		
		Nilai Kota/Kabupaten Layak Anak (Nilai)	Nilai	501 (Pratama)	725,39 (Nindya)	603,17 (Madya)		

a. Indeks Pemberdayaan Gender

Indeks pemberdayaan gender (IDG) memperlihatkan sejauh mana peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam

kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi yang menjelaskan capaian kinerja sasaran berdasarkan rata-rata capaian per sasaran/kinerja utama. Nilai IDG yang tinggi menunjukkan tingkat pemberdayaan dan kesetaraan gender yang lebih baik di suatu wilayah.

IDG dihitung berdasarkan tiga dimensi atau komponen utama yang mencerminkan peran aktif perempuan :

No.	Dimensi/Komponen	Deskripsi
1.	**Keterlibatan Perempuan di Parlemen**	Mengukur tingkat keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif (politik).
2.	**Perempuan sebagai Tenaga Profesional, Teknis, dan Manajerial**	Mengukur partisipasi perempuan dalam posisi pengambilan keputusan dan profesional di berbagai sektor.
3.	**Sumbangan Pendapatan Perempuan**	Mengukur kontribusi perempuan terhadap pendapatan ekonomi yang didekati melalui distribusi pendapatan.

Kesetaraan gender bukan hanya isu sosial, tetapi juga strategi pembangunan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa negara dengan tingkat kesetaraan gender tinggi memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil dan tingkat kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. IDG juga menjadi tolok ukur bagi pencapaian **Sustainable Development Goals (SDGs)**, khususnya tujuan ke-5, yaitu mewujudkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di semua level pembangunan.

Rumus Indeks pemberdayaan gender (IDG)

1/3 (Ipar + IDM + Iinc-dist)

<u>Keterangan :</u>

Ipar = Indeks Keterwakilan diparlemen
IDM = Indeks Pengambilan Keputusan
Linc-dis = Indeks distribusi Pendapatan

Sejak Tahun 2021 sampai dengan 2024 Nilai Indeks Pemberdayaan Perempuan secara keseluruhan meningkat setiap tahunnya, sedangkan tiga dimensi atau komponen utama yang mencerminkan peran aktif Perempuan diketahui bahwa untuk dimensi keterlinatan permpuan di parlemen setiap tahun semakin meningkat, dimensi Perempuan sebagai tenaga profesional mengalami peningkatan secara signifikan pada Tahun 2022 namun mengalami penurunan pada Tahun 2023 dan mulai meningkat Kembali di Tahun 2024. Pada Dimensi Sumbangan pendapatan Perempuan kurva kelihatan datar dan mengalami penurunan di Tahun 2022 dan Tahun 2024.

Grafik 3.1.6
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 2021-2024

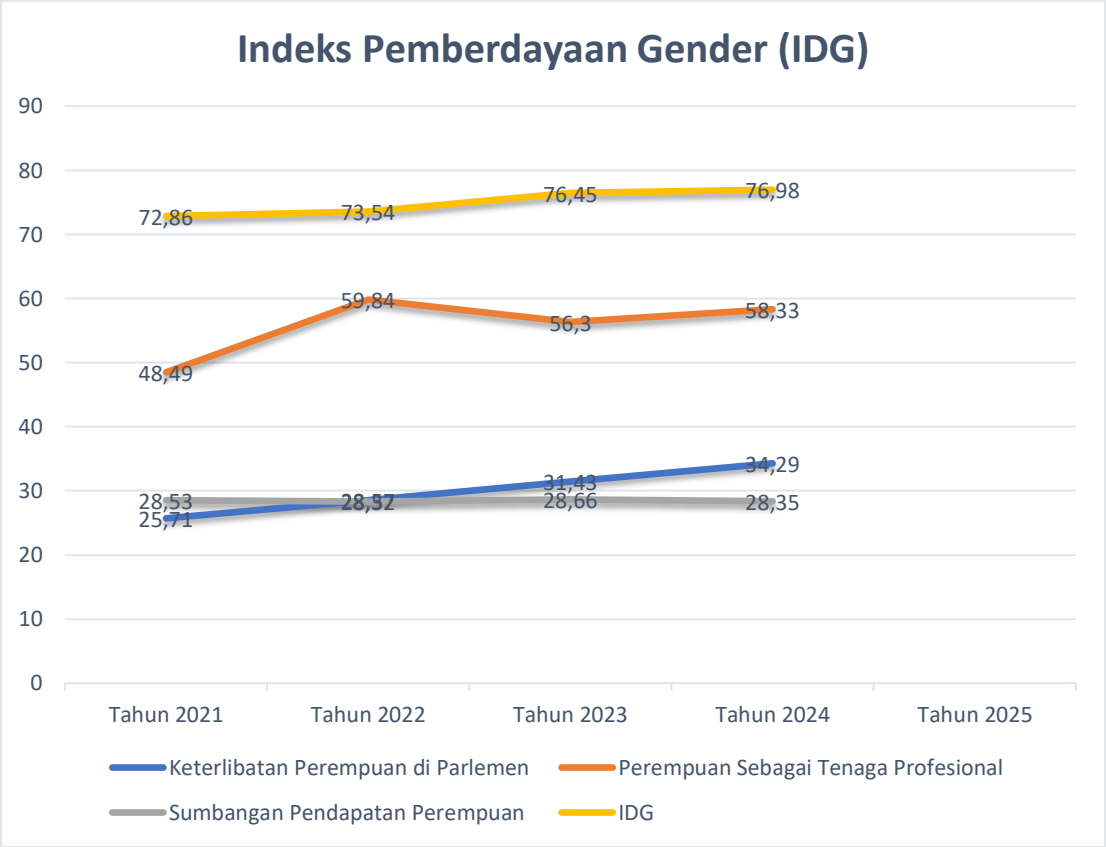

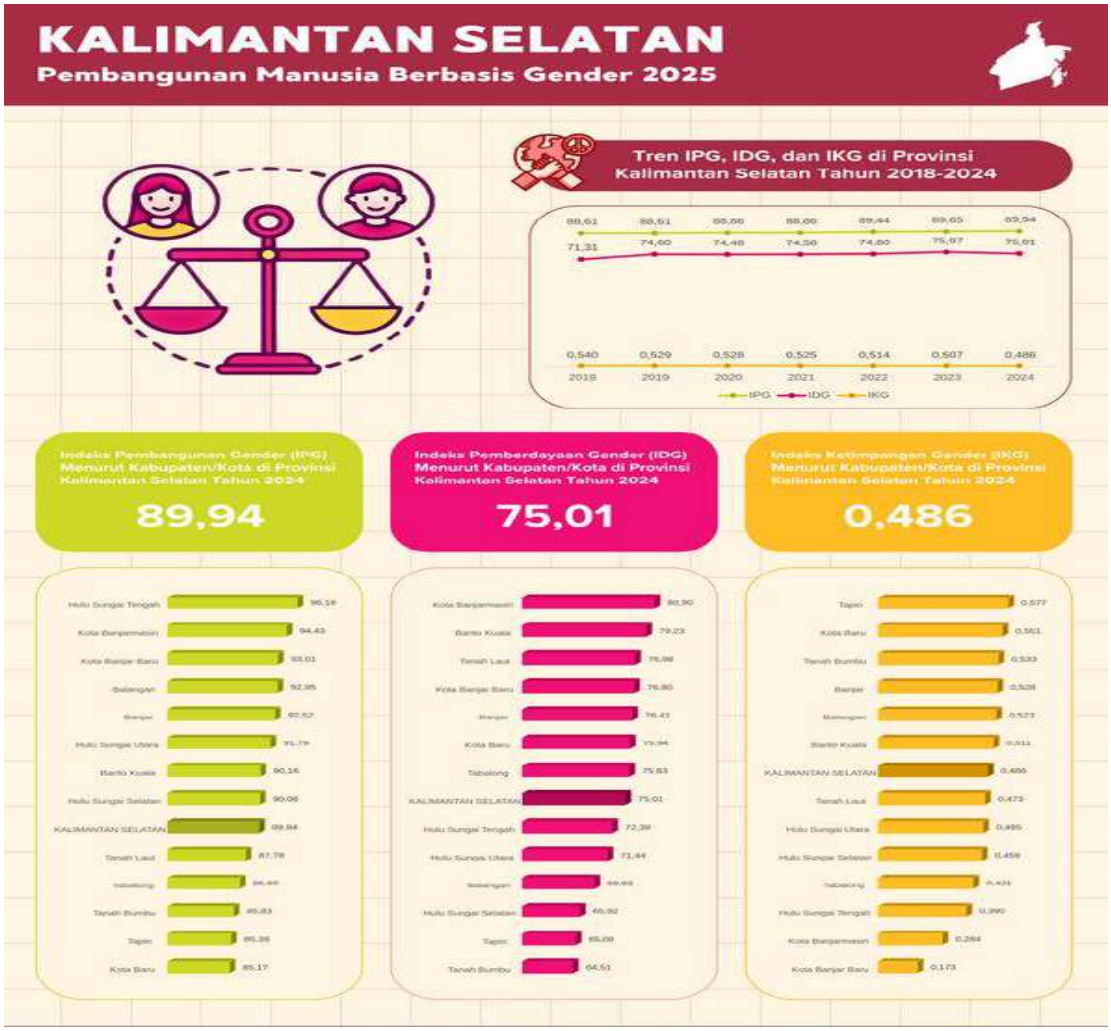

Informasi dari BPS RI, Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) mulai Tahun 2025 sudah tidak lagi dilakukan penghitungan dan mulai diganti dengan indicator lain yaitu Indeks Ketimpangan Gender (IKG). Berdasarkan hal tersebut maka beberapa indicator penyusun IDG yang meliputi : Persentase Keterlibatan Perempuan di Parlemen, Persentase perempuan sebagai Tenaga Profesional dan Persentase sumbangan pendapatan Perempuan juga tidak tersedia.

BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN TANAH LAUT
Jalan A. Syakran No. 9 Pelaihari 70814
Telp.: (0512) 21092 Faks.: (0512) 21213
Homepage: http://tanahlautkab.bps.go.id Email: bps6301@bps.go.id

SENSUS EKONOMI 2026

Pelaihari, 2 April 2026

Nomor : B-141/63010/HM.300/2026
Perihal : Data Indeks Pemberdayaan Gender

Kepada Yth.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Tanah Laut
di -
Tempat

Sehubungan dengan Surat Kepala Dinas Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Laut Nomor : 400.10.4.2/2/DP3AP2KB/IV/2026 perihal Permintaan Data terkait Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan indikator penyusunnya, dengan ini dapat kami jelaskan sebagai berikut :

1. Berdasarkan informasi dari BPS RI, Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) mulai tahun 2025 sudah tidak lagi dilakukan penghitungan dan mulai diganti dengan indikator lain yaitu Indeks Ketimpangan Gender (IKG).
2. Berdasarkan poin 1, maka beberapa indikator penyusun IDG yang meliputi : Persentase Keterlibatan Perempuan di Parlemen, Persentase Perempuan sebagai Tenaga Profesional, dan Persentase Sumbangan Pendapatan Perempuan juga tidak tersedia mulai tahun 2025.
3. Alasan IDG tidak dihitung lagi karena adanya kelemahan metodologis dalam penghitungannya, sehingga akan digantikan dengan IKG sebagaimana yang telah dilakukan *United Nations Development Programme* (UNDP).
4. IKG 2025 akan dirilis pada tanggal 5 Mei 2026 melalui website BPS. Sebagai informasi tambahan, kami lampirkan beberapa indikator terkait gender di Kabupaten Tanah Laut periode 2022-2025.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Badan Pusat Statistik
Kabupaten Tanah Laut

Siswo Widjanarko

BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN TANAH LAUT
Jalan A. Syakran No. 9 Pelaihari 70814
Telp.: (0512) 21092 Faks.: (0512) 21213
Homepage: http://tanahlautkab.bps.go.id Email: bps6301@bps.go.id

SENSUS EKONOMI 2026

Lampiran Surat Kepala BPS Kabupaten Tanah Laut
Nomor : B-141/63010/HM.300/2026
Tanggal : 2 April 2026

Data IKG, IPG dan IPM Menurut Jenis Kelamin
Kabupaten Tanah Laut, 2022-2025

Indikator	2022	2023	2024	2025
Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,481	0,421	0,473	Rilis 5 Mei 2026
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	87,84	88,22	88,54	89,26
IPM Laki-laki	77,08	77,62	77,98	78,46
IPM Perempuan	67,71	68,48	69,04	70,03

1) Perbandingan antar realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Capaian kinerja sasaran strategis perangkat daerah pada tahun 2025 masih belum rilis. Tren peningkatan dari tahun ke tahun menunjukkan progres yang baik, mengingat capaian indikator pada tahun 2021 hanya sebesar 72,86 dan terus meningkat menjadi 73,54 pada 2022, pada tahun 2023 memperoleh nilai 76,45 dan pada tahun 2024 sebesar 76,98. Hal ini mencerminkan adanya upaya perbaikan kinerja yang signifikan dalam meningkatkan Nilai Indeks Pemberdayaan Gender Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

2) Perbandingan Realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Organisasi

Indikator " Indeks Pemberdayaan Gender Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada tahun 2024 tercatat mencapai 76,98, yang setara dengan 99,75% dari target tahun 2025 yang ditetapkan sebesar 77,17. Jika dibandingkan dengan target jangka menengah (2029), yaitu sebesar 79,85, capaian hingga tahun 2025 telah mencapai 96,40% dari target akhir Renstra. Dengan laju peningkatan rata-rata sebesar 1,17 poin per tahun, organisasi berada pada jalur yang cukup optimis untuk mencapai target jangka menengah pada 2029, meskipun tetap membutuhkan akselerasi dan peningkatan kualitas pelayanan.

3) Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan Kabupaten/Kota lain, Provinsi dan Nasional

Indeks Pemberdayaan Gender Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2024 tercatat sebesar 76,98 Jika dibandingkan dengan Kota Banjarmasin yang mencatat indeks sebesar 80,90, Kabupaten Tanah Laut masih memiliki selisih sebesar 3,92 poin. Capaian Kota Banjarmasin menunjukkan tingkat peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik yang lebih tinggi, yang mengindikasikan bahwa capaian kinerja indikator Indeks Pemberdayaan Gender pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di kabupaten tersebut dinilai lebih optimal. Namun, jika dibandingkan dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, yang mencatat indeks tertinggi sebesar 75,01, Kabupaten Tanah Laut memiliki capaian IDG lebih tinggi, yaitu sebesar 1,97 poin. Jika di bandingkan dengan capaian Nasional, yang tercatat indeks sebesar 77,62 Kabupaten Tanah Laut memiliki capaian lebih rendah sebesar 0,64 poin.

Hal ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Tanah Laut perlu melakukan evaluasi untuk mengidentifikasi praktik terbaik yang diterapkan oleh Kota Banjarmasin dalam meningkatkan indeks Pemberdayaan Gender Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Peningkatan kualitas layanan, responsivitas, dan penyediaan fasilitas pendukung yang lebih baik dapat menjadi fokus utama perbaikan di masa mendatang.

4) Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Dalam mencapai sasaran strategis “Meningkatnya Pangarusutamaan Gender dan Pemenuhan Hak Anak”, dengan indikator Indeks Pemberdayaan Gender , Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melaksanakan Peningkatan Perempuan yang Produktif dan Peningkatan Penyelesaian Kasus Kekerasan pada Perempuan.

1. Peningkatan Perempuan yang Produktif

   Dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan keterampilan individu/kelompok, mendorong kemandirian ekonomi, meningkatkan pendapatan keluarga dan mengurangi angka kemiskinan, serta memperkuat peran serta perempuan dalam pembangunan daerah. Hal tersebut dilaksanakan melalui berbagai kegiatan yaitu sebagai berikut :

   a) Pelatihan Keterampilan Bagi Kepala Rumah Tangga Perempuan, terdiri dari Pelatihan pembuatan sasirangan di 4 Kecamatan, sosialisasi Peningkatan Ekonomi Keluarga dan Perizinan bagi Home Industri Perempuan dan Seminar Pemberdayaan Perempuan Rangkaian Kegiatan Peringatan Hari Ibu.

      Adapun dokumentasi pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut:

 Pelatihan Sasirangan Di Kecamatan Bati-Bati Tgl 16 Juni 2025	Peserta : Ibu Rumah Tangga Jumlah Peserta : 50 Orang Tempat : Rumah Peserta Desa Banyu Irang Kec. Bati-Bati
 Pelatihan Sasirangan Di Kecamatan Batu Ampar Tgl 17 Juni 2025	Peserta : Ibu Rumah Tangga Jumlah Peserta : 50 Orang Tempat : Aula Desa Damar Lima Kec. Batu Ampar

 Pelatihan Sasirangan Di Kecamatan Jorong Tgl 18 Juni 2025	Peserta : Ibu Rumah Tangga Jumlah Peserta : 50 Orang Tempat : Aula Desa Asri Mulya Kec. Jorong
 Pelatihan Sasirangan Di Kecamatan Pelaihari Tgl 19 Juni 2025	Peserta : Ibu Rumah Tangga Jumlah Peserta : 50 Orang Tempat : Aula Desa Sumber Mulia
 Sosialisasi Peningkatan Ekonomi Keluarga dan Perizinan bagi Home Industri Perempuan 10 Juli 2025	Peserta : Ibu Rumah Tangga Jumlah Peserta : 100 Orang Tempat : Aula Dinas P3AP2KB
	Peserta : Organisasi Wanita Jumlah Peserta : 250 Orang Tempat : Aula Poltek Tanah Laut

Seminar Pemberdayaan Perempuan Rangkaian Kegiatan Peringatan Hari Ibu Tahun 2025 tgl 07 Oktober 2025	

Dengan dilaksanakannya berbagai kegiatan tersebut sehingga para peserta khususnya para perempuan akan lebih berdaya guna dan mampu bersaing. Minimnya pendampingan pasca pelatihan sehingga peserta tidak mendapatkan bimbingan saat menghadapi kendala usaha. Disamping hal itu, keterbatasan modal dan manajemen usaha Pengelolaan keuangan yang kurang baik dan perputaran modal tidak lancar sehingga menyebabkan kegagalan perkembangan home industri.

b) Pelatihan Kepada Anggota Organisasi Perempuan

Pelatihan tersebut kepada Anggota Organisasi Perempuan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kualitas sumber daya anggota organisasi perempuan, baik dalam aspek kepemimpinan, manajerial, maupun teknis, memperkuat peran organisasi perempuan dalam pembangunan daerah, khususnya di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta meningkatkan pemahaman terhadap isu-isu strategis, seperti kesetaraan gender, perlindungan anak, kesehatan keluarga, dan ekonomi produktif.

Pelatihan tersebut dilaksanakan dalam bentuk Seminar Publik Speaking, Sosialisasi Pola Asuh Anak, dan Seminar Parenting. Adapun dokumentasi pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut :

 Seminar Publik Speaking Yang Dilaksanakan GATRIWARA Kab. Tanah Laut Tgl 14 Mei 2025	Peserta : Organisasi Wanita Jumlah Peserta : 200 Orang Tempat : Gedung Paripurna DPRD Kab. Tanah Laut
 Sosialisasi Pola Asuh Anak Gow Tanah Laut 07 Juli 2025	Peserta : Organisasi Wanita Jumlah Peserta : 50 Orang Tempat : Gedung Rakat Manuntung
 Seminar Parenting Keluarga Menuju Jannah Tgl 12 November 2025	Peserta : Organisasi Wanita Jumlah Peserta : 50 Orang Tempat : Kantor Kecamatan Pelaihari

 Seminar Publik Speaking Yang Dilaksanakan DWP Kab. Tanah Laut Tgl 02 Oktober 2025	Peserta : Organisasi Wanita Jumlah Peserta : 50 Orang Tempat : Gedung Paripurna DPRD Kab. Tanah Laut

2. Peningkatan Penyelesaian Kasus Kekerasan pada Perempuan
   a) Penanganan kasus kekerasan pada perempuan
      1) Pelaksanaan konseling pada perempuan korban kekerasan

      Pelaksanaan konseling pada perempuan korban kekerasan merupakan salah satu bentuk layanan pemulihan yang bertujuan untuk membantu korban dalam mengatasi dampak psikologis dan emosional akibat kekerasan yang dialami. Kegiatan ini dilaksanakan oleh tenaga konselor/psikolog yang memiliki kompetensi di bidang pendampingan korban kekerasan terhadap perempuan. Pelayanan konseling diawali dengan proses asesmen untuk mengidentifikasi kondisi psikologis, kebutuhan, serta permasalahan yang dihadapi korban. Selanjutnya, dilakukan pendampingan melalui sesi konseling secara terjadwal dan berkesinambungan, baik secara individu maupun kelompok. Pelaksanaan konseling mengedepankan prinsip kerahasiaan, empati, dan kenyamanan korban, sehingga tercipta suasana yang aman dan kondusif.

      Melalui pelaksanaan konseling ini, diharapkan korban mampu memulihkan kondisi mental dan emosional, meningkatkan rasa percaya diri, serta memiliki kesiapan untuk melanjutkan kehidupan secara mandiri dan produktif.

Gambar 1. Konseling klien perempuanyang dilakukan oleh psikolog di UPTD PPA

2) Pelaksanaan bantuan hukum pada perempuan korban kekerasan

Pelaksanaan bantuan hukum pada perempuan korban kekerasan bertujuan untuk memberikan perlindungan serta pemenuhan hak-hak korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bantuan hukum diberikan dalam bentuk konsultasi hukum, pendampingan dalam proses pelaporan, serta advokasi pada tahap penyelidikan, penyidikan, hingga persidangan.Kegiatan pendampingan hukum dilaksanakan oleh tenaga hukum yang profesional dan berkompeten, bekerja sama dengan lembaga bantuan hukum serta aparat penegak hukum. Dalam pelaksanaannya, korban diberikan pemahaman mengenai hak dan kewajiban, mekanisme hukum, serta prosedur penanganan perkara. Melalui pelaksanaan bantuan hukum ini, diharapkan korban memperoleh kepastian hukum, rasa keadilan, serta perlindungan hukum yang optimal dalam penyelesaian kasus kekerasan yang dialaminya.

3) Penanganan kasus perempuan di rumah perlindungan

Penanganan kasus perempuan di rumah perlindungan merupakan upaya perlindungan sementara bagi korban kekerasan yang membutuhkan tempat aman dari ancaman dan tekanan lingkungan. Rumah perlindungan berfungsi sebagai sarana pemulihan awal bagi korban sebelum kembali ke lingkungan sosialnya. Selama berada di

rumah perlindungan, korban memperoleh layanan pemenuhan kebutuhan dasar, layanan kesehatan, pendampingan psikologis, konseling. Selain itu, dilakukan pendampingan sosial dan pemantauan secara berkala terhadap perkembangan kondisi korban. Penanganan kasus dilaksanakan secara terpadu dengan melibatkan instansi terkait, seperti dinas sosial, dinas kesehatan, aparat penegak hukum, serta lembaga pendamping. Melalui penanganan di rumah perlindungan ini, diharapkan korban dapat pulih secara fisik dan mental, memiliki kesiapan sosial, serta mampu menjalani kehidupan yang aman, mandiri, dan sejahtera.

b) Peningkatan kapasitas konselor

Peningkatan kapasitas konselor, dilaksanakan melalui pelatihan dan bimbingan teknis (Bimtek) untuk meningkatkan kompetensi teknis dalam penanganan kasus, teknik konseling, serta pendekatan psikososial.

c) Pelatihan pencegahan kekerasan pada organisasi perempuan, dilaksanakan melalui Penyampaian materi edukatif dan regulasi terkait Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, dan Peningkatan pemahaman perspektif gender dan hak asasi manusia Untuk memperkuat kesadaran anggota organisasi dalam mengenali dan mencegah berbagai bentuk kekerasan.

Faktor Pendorong/Keberhasilan

1. Adanya kebijakan pemerintah yang mendukung kesetaraan gender.
2. Adanya peraturan daerah yang responsif gender.
3. Pemberian pelatihan kewirausahaan, literasi keuangan dan teknologi digital.
4. Adanya keterlibatan kepemimpinan perempuan dalam organisasi.
5. Pemanfaatan media sosial untuk promosi.

Faktor Penghambat/Kegagalan

1. Norma sosial yang membatasi perempuan dalam Pendidikan dan pekerjaan.
2. Kurangnya pelatihan ketrampilan yang sesuai kebutuhan pasar.
3. Kurangnya permodalan bagi penerima pelatihan.

Alternatif Solusi/Rencana Aksi yang Akan Dilakukan

1. Penguatan kebijakan dan implementasi sehingga mendorong responsif gender
2. Adanya integrasi perspektif gender dalam setiap perencanaan pembangunan
3. Pelaksanaan pelatihan ketrampilan baik dalam hal wirasusaha, digital marketing dan literasi keuangan
4. Pemberian bantuan modal
5. Pemberian edukasi kepada tokoh masyarakat dan tokoh agama tentang kesetaraan gender.

b. Nilai Kota/Kabupaten Layak Anak

Kabupaten/kota Layak Anak adalah Kabupaten/Kota yang mempunyai system pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak. Kota Layak Anak (KLA) mempunyai tujuan yaitu :

1) Secara Umum : Untuk memenuhi hak dan melindungi anak
2) Secara Khusus : Untuk membangun inisiatif pemerintahan kabupaten/kota yang mengarah pada upaya transformasi Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi dan intervensi pembangunan, dalam bentuk: kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk pemenuhan hak dan perlindungan anak (PHPA), pada suatu wilayah Kabupaten/Kota.

Indikator Kota Layak Anak KLA terdiri dari:

1) Merupakan variabel yang digunakan untuk mengukur pelaksanaan pemenuhan hak anak di daerah dalam upaya mewujudkan KLA.
2) Merupakan acuan bagi pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan pemenuhan hak anak untuk mewujudkan KLA

3) Terdiri dari 6 indikator kelembagaan dan 25 indikator subtansi yang dikelompokkan dalam 5 klaster hak anak yaitu
   - Hak Sipil dan Kebebasan
   - Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif
   - Kesehatan dan Kesejahteraan Dasar
   - Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya
   - Perlindungan khusus

Tingkat Penghargaan Kabupaten Layak Anak dari Kementerian

1. KLA Tingkat Pratama (nilai 500-600)
2. KLA Tingkat Madya (nilai 601-700)
3. KLA Tingkat Nindya (nilai 701-800)
4. KLA Tingkat Utama (nilai 801-900)
5. KLA (nilai 901-1000)

Berdasarkan Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2025 tentang Penetapan Peringkat dan Penerima Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak Tahun 2025 Kabupaten Tanah Laut medapatkan peringkat Pratama. Adapun Nilai Kota/ Kabupaten Layak Anak Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 adalah 501 .

Rapor Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak 2025

Seluruh Klaster dan Indikator

Kabupaten/Kota: KAB. TANAH LAUT (1)

N	Nama Indikator	Max	PM	VA	% Fi...
01	Peraturan/Kebijakan Daerah tentang Kabupaten/Kota Layak Anak	96	73,92	64,66	68,75%
02	Penguatan Kelembagaan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)	36	28,4	26,8	44,44%
03	Peran Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha, dan Media Massa dalam Pemenuhan H...	32	20	20	15,63%
04	Anak yang diregistrasi dan yang Memiliki Kutipan Akta Kelahiran	15	12	11	70,00%
05	Ketersediaan Fasilitas Informasi Layak Anak (ILA)	45	29	8	37,33%
06	Pelembagaan Partisipasi Anak	55	50	35	67,27%
07	Pencegahan Perkawinan Anak	36	30	30	52,78%
08	Penguatan Kapasitas Lembaga Konsultasi Penyedia Layanan Pengasuhan Anak b...	45	40	40	46,67%
09	Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD-HI)	13	12	12	71,15%
10	Standardisasi Lembaga Pengasuhan Alternatif dan Pengasuhan Sementara	27	22	20,6	57,78%
11	Ketersediaan Infrastruktur (Sarana dan Prasarana) Ramah Anak di Ruang Publik	35	18,6	18,6	21,71%
12	Persalinan di Fasilitas Kesehatan	23	23	23	100,00%
13	Status Gizi Balita	20	20	20	90,00%
14	Pemberian Makan pada Bayi dan Anak (PMBA) Usia di Bawah 2 Tahun	32	25	25	78,13%
15	Fasilitas Kesehatan dengan Pelayanan Ramah Anak	20	19,5	19,5	87,50%
16	Lingkungan Sehat (Akses Air Minum dan Sanitasi yang Layak)	25	20	20	84,00%
17	Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Larangan Iklan, Promosi, dan Sponsor (IPS) Rokok	30	28	26	76,67%
18	Wajib Belajar 12 Tahun	24	14	10	43,75%
19	Sekolah (Satuan Pendidikan) Ramah Anak (SRA)	51	38,6	34,6	36,08%
20	Ketersediaan Fasilitas untuk Kegiatan Budaya, Kreativitas, dan Rekreatif yang Ram...	35	33	29	31,43%

1 - 20 / 20

2024 D. PRATAMA
2023 D. PRATAMA
2021 D. PRATAMA
2022 D. PRATAMA
2023 D. PRATAMA
Prediksi (2021) D. PRATAMA

N	Nama Indikator	Max	PM	VA	% Fi...
21A	Pencegahan dalam Perlindungan Khusus	83	83	53,6	33,98%
21B	Pelayanan Bagi Anak Korban Kekerasan dan Eksploitasi	17	17	17	64,71%
21C	Anak yang Dibebaskan dari Pekerja Anak (PA) dan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terbur...	22	18,5	11,9	56,82%
22A	Pelayanan Bagi Anak Korban Pornografi, NAPZA, dan Terinfeksi HIV/AIDS	17	17	10	35,29%
22B	Pelayanan Bagi Anak Korban Bencana dan Konflik	18	17	15,2	15,56%
23A	Pelayanan Bagi Anak Penyandang Disabilitas, Kelompok Minoritas, dan Terisolasi	23	20	12,8	26,09%
23B	Pelayanan Bagi Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang (PSM)	4	4	4	50,00%
24A	Penyelesaian Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) melalui Diversi (...	14	13	11	35,71%
24B	Pelayanan Bagi Anak Korban Jaringan Terorisme dan Stigmatisasi Akibat dari Pela...	7	7	7	14,29%
25	Penyelenggaraan KLA di Kecamatan	21	14,35	13,35	46,90%
26	Penyelenggaraan KLA di Desa/Kelurahan	79	53,6	53,6	29,56%

1 - 11 / 11

KPPDANPA @KPP_PA @KEMENPPPA KEMENPPPA RI WWW.KEMENPPPA.GO.ID

Hasil Evaluasi KLA Kabupaten Tanah Laut :

1. **KLASTER KELEMBAGAAN**
   - Belum terdapat Peraturan/ kebijakan terkait Pemberian Makanan Bayi dan Anak (PMBA) usia di bawah 2 tahun
   - Perbup yang dilampirkan tidak khusus mengatur tentang penyelesaian kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) melalui diversi
   - Belum terlihat anggaran yang dilampirkan untuk lembaga pengasuhan alternatif terstandarisasi
   - Anggaran yang dilampirkan belum khusus menjawab indikator terkait fasilitas pelayanan kesehatan dengan pelayanan ramah anak
   - Anggaran yang dilampirkan tidak terkait indikator rumah tangga dengan akses air minum dan sanitasi yang layak
   - Anggaran khusus terkait SRA masih belum terlihat
   - Anggaran yang dilampirkan bukan khusus terkait indikator pelayanan bagi anak korban bencana dan konflik
   - Anggaran yang dilampirkan tidak khusus terkait indikator pelayanan bagi anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang (PSM)

- Dokumen yang dilampirkan tidak spesifik tentang indikator yang ditanyakan pelayanan bagi anak korban jaringan terorisme dan stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya
- Tidak ada bukti dukung terkait Pelatihan KHA bagi Tim Gugus Tugas
- RAD KLA yang mencakup Kelembagaan dan 5 Klaster, baru akan diinisiasi di tahun 2026 setelah Perda KLA terbit
- Pada pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD KLA, Tidak ada matriks dan dokumen pemantauan yang dilampirkan, file yang diterima juga kurang relevan
- Kemitraan yang dilampirkan belum khusus terkait indikator keterlibatan Lembaga Masyarakat, Media Massa, dan Dunia Usaha dalam bentuk kemitraan (bukan sekedar charity), untuk mendukung Klaster I, II, III, IV dan V Kabupaten/Kota Layak Anak
- Kemitraan yang dilampirkan belum khusus terkait indikator pada upaya Forum Koordinasi atau Komunitas Dunia Usaha yang terlibat dalam Pembangunan Anak untuk mendukung penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak

2. **KLASTER I. KLASTER HAK SIPIL DAN KEBEBASAN**

- Kemitraan antar PD dalam percepatan kepemilikan akta kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA), bukti dukung yang diunggah kurang relevan
- Terkait ketersediaan fasilitas layanan informasi anak di Lembaga Layanan Informasi Anak, Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) terstandarisasi, dan jumlah anak yang mengakses lembaga layanan ILA pertahun selama 2 tahun terakhir termasuk AMPK, serta kemitraan antar PD dalam penyediaan layanan fasilitas informasi layak anak termasuk penyediaan layanan ILA bagi AMPK di LPKA, LPKS, panti asuhan, dll. **Data dukung tambahan sudah diunggah namun masih perlu dilengkapi bukti kegiatan lainnya**
- Pada indikator forum anak/kelompok anak berperan sebagai Pelopor dan Pelapor (2P) data dukung belum memadai dan matriks yang dipersyaratkan belum diunggah
- Forum Anak/kelompok anak dilatih Konvensi Hak Anak belum memiliki data dukung belum memadai

- Pada kegiatan dalam pencegahan dan penanganan perkawinan anak yang melibatkan lintas sektoralsetelah penambahan dokumen pasca VLH dan diidentifikasi kegiatannya hanya ada 5, yakni: sosialisasi pencegahan perkawinan anak, komitmen bersama, sosialisasi & konseling oleh PUSPAGA, Konten edukasi via Medsos oleh PA Pelaihari, PIK-R, dan Konseling pernikahan oleh Pengadilan Agama

3. **KLASTER II. KLASTER : LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF**
   - Pembagian kartu kembang anak bukanlah inovasi. hingga batas akhir VLH tidak disampaikan inovasi pengganti lainnya
   - Tidak ada pelatihan KHA bagi SDM PAUD HI
   - Pada indikator jumlah lembaga pengasuhan alternatif (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak/LKSA) dan lembaga pengasuhan sementara/pengasuh pengganti (Pesantren, Sekolah Berasrama, dan Taman Penitipan Anak (Daycare/TPA)/Taman Anak Sejahtera (TAS)/Taman Asuh Ceria (TARA)) yang sesuai standar/terakreditas. Hanya ada SK Pesantren Ramah Anak terstandarisasi
   - Hanya ada 1 titIk RBA yang dilaporkan. RTH Desa Sumber Mulia
   - Terdapat hanya ada 2 layanan/program yang mendukung RASS yaitu langkar dan ZOSS diberbagai sekolah.
   - Bus Sekolah bukan inovasi, melainkan program dasar yang dimiliki beberapa daerah guna menunjang keselamatan anak dari dan ke menuju sekolah
4. **KLASTER III: KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN**
   - Pada indikator kemitraan antar Perangkat Daerah dan/atau masyarakat dalam pencegahan dan penanganan masalah gizi, hanya kemitraan dengan GOW yang dilaporkan, tidak ada kemitraan lainnya yang terkait.
   - Persentase perkantoran dan fasilitas umum yang telah memiliki Ruang ASI di bawah 50%. Dan belum ada menjelaskan upaya apa yang telah dilakukan untuk meningkatkan cakupan ruang asi di perkantoran dalam
   - Kemitraan antar Perangkat Daerah (PD) dan atau masyarakat dalam pengembangan fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah yang dilaporkan

hanya 1 dari DInas P2KBP3A berupa sosialisasi Kebijakan PRAP

- Pada indikator lembaga pengawas Kawasan Tanpa Rokok, tidak melampirkan KK memiliki lembaga/organisasi perangkat daerah yang ditunjuk sebagai pengawas KTR yang dapat dibuktikan melalui SK/SE atau kebijakan lain serta menyertakan dokumen pendukung terkait pelaksanaan proses pengawasan KTR berupa laporan kegiatan, program kerja, dll.
- Perda tidak dijelaskan terkait IPS Rokok. namun masih ada iklan dan promosi rokok

5. **KLASTER IV: PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG, DAN KEGIATAN BUDAYA**

- Persentase SRA untuk TK/RA sederajat, SD/MI sederajat,SMP/MTS sederajat yang telah di-SK- kan sampai dengan tahun penilaian evaluasi KLA, masih dibawah 25%
- Tidak ada Data SMA sederajat yang SRA
- Belum ada jumlah SRA yang terstandarisasi dan/atau SRA yang telah melakukan evaluasi mandiri didampingi OPD terkait
- Belum ada Pendidik dan Tenaga Pendidikan di Satuan Pendidikan Ramah Anak yang dilatih Konvensi Hak Anak dan Kebijakan Satuan Pendidikan Ramah Anak
- Peran dari PD/Lembaga pemerhati anak yang terlibat dalam melakukan pendampingan, monitoring dan evaluasi SRA, bukti dukung tidak lengkap
- Pada indikator lembaga yang melakukan pengawasan terhadap kegiatan budaya, kreativitas dan rekreatif bagi anak melalui PKA, bukti tidak sesuai
- TIdak ada SDM pengelola Pusat Kreativitas Anak (PKA) termasuk Rumah Ibadah Ramah Anak (RIRA) yang dilatih tentang Konvensi Hak Anak, Kebijakan PKA/RIRA
- tidak ada dinas/lembaga yang terlibat dalam melakukan evaluasi dan pemantauan PKA maupun RIRA? Siapa saja dinas/lembaga yang terlibat dalam melakukan evaluasi
- Pada Indikator program inovasi pengembangan RIRA, data dukung tidak sesuai

Sejak Tahun 2020 sampai dengan tahun 2025 Kabupaten Tanah Laut baru bisa mempertahankan penghargaan sebagai Kota Layak Anak dengan predikat Pratama.

Grafik 3.1.6
Skor Kota Layak Anak Kabupaten Tanah Laut 2020-2025

Sumber : DP2KBP3A Kab.Tanah Laut

1) Perbandingan antar realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Capaian kinerja sasaran strategis Dinas P3AP2KB pada Tahun 2025 menunjukan terdapat penurunan kinerja, hal ini disebabkan terdapat indicator yang belum mencapai target yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil data yang di sajikan, capaian indicator “Nilai Kota/Kabupaten Layak Anak” pada Tahun 2025 tercatat sebesar 501 dengan kategori Pratama atau setara 82,81% dari target yang telah ditetapkan sebesar 605. Sebagai perbandingan, realisasi capaian pada tahun 2024 adalah 575,75 dengan kategori Pratama.

Tren peningkatan terjadi di Tahun 2022 sampai 2024, pada tahun 2021 skor KLA sebesar 551 (Pratama) dan meningkat menjadi 575,25 (Pratama) tahun 2022 dan terus meningkat menjadi 575,75 (Pratama), dan mengalami penurunan pada tahun 2025 yaitu menjadi 501 (Pratama).

2) Perbandingan Realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Organisasi

Indikator "Kota/Kabupaten Layak Anak (KLA) pada tahun 2025 tercatat mencapai 501 (Pratama), yang setara dengan 82,81% dari target tahunan yang ditetapkan sebesar 605. Jika dibandingkan dengan target jangka menengah (2029), yaitu sebesar 805, capaian hingga tahun 2025 telah mencapai 62,24% dari target akhir Renstra. Dengan melakukan evaluasi atas menurunan yang terjadi di Tahun 2025 dan melaksanakan koordinasi kepada lintas sektor dan lintas program, organisasi berada pada jalur yang cukup optimis untuk mencapai target jangka menengah pada 2029.

3) Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan Kabupaten/Kota lain, Provinsi dan Nasional

Indikator "Kota/Kabupaten Layak Anak (KLA) pada tahun 2025 tercatat sebesar 501 (Pratama). Jika dibandingkan dengan Kabupaten Balangan yang mencatat skor sebesar 725,39, Kabupaten Tanah Laut masih memiliki selisih sebesar 224,39 poin. Capaian Balangan menunjukkan tingkat KLA pada kategori Nindya yang berada dua tingkat lebih tinggi, yang mengindikasikan bahwa kepada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak di kabupaten tersebut dinilai lebih optimal.

4) Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Dalam mencapai sasaran strategis “Meningkatnya Pangarusutamaan Gender dan Pemenuhan Hak Anak”, dengan indikator Nilai Kota/Kabupaten Layak Anak , Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melalui :

1. Peningkatan Penanganan Kasus Anak.

   a) Pelaksanaan konseling kasus anak

   Sepanjang tahun 2025, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana telah melaksanakan

kegiatan konseling terhadap kasus anak sebagai bagian dari upaya peningkatan penanganan dan pemenuhan hak anak. Konseling diberikan kepada anak korban kekerasan, penelantaran, maupun permasalahan psikososial lainnya yang dilaporkan melalui UPTD PPA maupun hasil rujukan dari kepolisian, sekolah, fasilitas kesehatan, dan masyarakat. Pelaksanaan konseling dilakukan oleh konselor/psikolog yang berkompeten dengan pendekatan ramah anak dan mengutamakan prinsip kerahasiaan, kepentingan terbaik bagi anak, serta non-diskriminasi. Setiap kasus yang ditangani melalui tahapan penerimaan pengaduan, asesmen awal, pendampingan konseling, pemantauan perkembangan anak, hingga tindak lanjut sesuai kebutuhan, termasuk rujukan ke layanan kesehatan, bantuan hukum, maupun rehabilitasi sosial.

Seluruh kegiatan konseling telah didokumentasikan secara tertib melalui pencatatan data kasus, berita acara konseling, lembar asesmen, laporan perkembangan korban, serta dokumentasi pendukung lainnya. Data konseling tersebut digunakan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas layanan penanganan kasus anak.

Kasus klien anak pada tahun 2025 sebanyak 43 klien

Kasus klien perempuan pada tahun 2025 sebanyak 21 klien

Gambar 1. Konseling lanjutan yang dilakukan penjangkauan di rumah klien anak

GAMBAR 2. KONSELING YANG DILAKUKAN DI UPTD PPA TANAH LAUT

b) Pemberian Bantuan Hukum pada Anak

Pemberian Bantuan Hukum pada Anak dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) adalah proses pendampingan dan perlindungan hukum yang diberikan kepada anak baik sebagai korban, saksi, maupun (dalam kondisi tertentu) pelaku yang terlibat dalam kasus perdagangan orang, untuk menjamin hak-haknya terpenuhi selama proses hukum.

Gambar 1. Rapat Koordinasi Pencegahan Kekerasan pada Perempuan dan Anak serta Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Tanggal 10 September 2025 di Atlas Coffe dengan Peserta SKPD lintas sector yang berjumlah 50 Orang

c) Pelaksanaan Puspaga

PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga) adalah layanan di bawah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) yang berfungsi memberikan edukasi, konsultasi, dan pendampingan bagi keluarga guna mencegah kekerasan terhadap anak, termasuk di lingkungan sekolah.

- Kendala yang Sering Dihadapi :
  1. Kurangnya kesadaran orang tua
  2. Minimnya partisipasi siswa
  3. Stigma terhadap korban
  4. Keterbatasan sumber daya
- Dampak Positif
  1. Meningkatnya kesadaran hukum dan psikologis warga sekolah
  2. Penurunan kasus perundungan
  3. Terciptanya lingkungan belajar yang aman

Gambar 1. Sosialisasi Pencegahan Kekerasan pada Perempuan di Ponpes Sirajul Huda Pelaihari Tanggal 20 Agustus 2025

Gambar 2. Sosialisasi Pencegahan Kekerasan pada Perempuan di Ponpes Nurul Muhibbin Tanggal 21 Agustus 2025 dengan seluruh santriwati yang berjumlah 100 orang.

Gambar 3. Sosialisasi Pencegahan Kekerasan pada Perempuan di Daarul Qur'an Istiqomah (DAQU) Tanggal 22 Agustus 2025 dengan seluruh santriwati yang berjumlah 100 orang.

2. Peningkatan Desa Ramah Perempuan Peduli Anak

   Peningkatan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) adalah upaya sistematis untuk memperkuat kapasitas desa agar responsif terhadap kebutuhan, perlindungan, dan pemberdayaan perempuan serta anak melalui kebijakan, program, dan partisipasi masyarakat.

   Program ini merupakan kebijakan nasional yang diinisiasi oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) dan diimplementasikan melalui pemerintah daerah hingga tingkat desa.

a) Pelatihan Kader Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat

   Pelatihan Kader Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) adalah kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat untuk membentuk dan memperkuat kader yang berperan dalam mencegah dan menangani kekerasan terhadap anak di tingkat desa/kelurahan.

Manfaat Pelatihan PATBM

- Masyarakat lebih sadar akan perlindungan anak
- Kasus kekerasan lebih cepat terdeteksi.
- Anak mendapat perlindungan lebih cepat.
- Desa menjadi lebih ramah anak.

Gambar 1. Rapat Koordinasi DRPPA sekaligus pembekalan kepada Aktivis PATBM Tanggal 16 Oktober 2025 di Aula DP3AP2KB dengan peserta 30 Orang.

Rapat koordinasi DRPPA ini dilaksanakan untuk pembekalan kepada Aktivis PATBM untuk meningkatkan pemahaman tentang hak anak, membekali kader dengan kemampuan mendeteksi dini kekerasan, menguatkan kemampuan melakukan pendampingan awal, membangun sistem rujukan ke UPTD PPA, PUSPAGA, kepolisian, atau layanan sosial, dan mendorong pencegahan perkawinan anak, eksploitasi, dan kekerasan seksual.

b) Pengusulan Desa Ramah Perempuan Peduli Anak

Pada Kabupaten Tanah Laut untuk Desa Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak (DRPPA) baru terbentuk 2 desa, yaitu Desa Sumber Mulya dan Desa Bajuin. Selanjutnya akan dibentuk lagi untuk beberapa desa, yaitu Desa Kunyit, Desa Bluru dan Desa Damar Lima.

3. Peningkatan Peran Forum Anak Dalam Perlindungan Anak

Peningkatan peran Forum Anak dalam perlindungan anak adalah penguatan fungsi mereka sebagai **Pelopor dan Pelapor (2P)** serta agen perubahan untuk mencegah kekerasan, perkawinan anak, dan pemenuhan hak anak. Hal ini diwujudkan melalui partisipasi aktif dalam perencanaan pembangunan, menjadi konselor sebaya, serta menjembatani aspirasi anak ke pemerintah (desa hingga nasional).

Berikut adalah rincian peningkatan peran Forum Anak dalam perlindungan anak:

- **Pelopor (2P):** Menjadi pelopor aksi positif, seperti mencegah napza, pergaulan bebas, pernikahan dini, serta menciptakan lingkungan sekolah dan ruang publik yang ramah anak.
- **Pelapor (2P):** Melaporkan kasus kekerasan, perkawinan anak, atau pelanggaran hak anak melalui berbagai saluran yang disediakan, seperti SAPA 129.
- **Konselor Sebaya:** Memberikan dukungan, pendampingan, dan pemahaman kepada teman sebaya yang mengalami permasalahan.
- **Partisipasi dalam Perencanaan:** Terlibat aktif dalam perencanaan pembangunan yang ramah anak (contoh: Musrenbang).
- **Agen Perubahan:** Menyebarkan nilai-nilai perlindungan anak dan mempromosikan lingkungan yang inklusif.
- **Pemberdayaan Berjenjang:** Pembentukan forum anak hingga tingkat desa/kelurahan untuk menjangkau akar rumput.

Peningkatan peran ini penting agar suara anak didengar dalam merumuskan kebijakan yang melindungi mereka.

a) Pelaksanaan Forum Anak

1.	Rapat Persiapan Jambore FAD tahun 2025 Tanggal Tujuan rapat persiapan kegiatan Forum Anak Daerah (FAD) adalah untuk menyusun rencana kerja, membagi tugas kepanitiaan, serta merumuskan teknis pelaksanaan agar kegiatan berjalan terstruktur. Rapat ini bertujuan memastikan partisipasi anak dalam perencanaan pembangunan, memperkuat peran pelopor dan pelapor (2P), serta menampung aspirasi suara anak di daerah.

Rapat persiapan pertama Rapat persiapan ke2 	• Tempat : Aula DP3AP2KB • Peserta : FAD

2. Jambore FAD tahun 2025

Jambore Forum Anak Daerah bertujuan utama memfasilitasi hak partisipasi anak dalam pembangunan, meningkatkan kapasitas sebagai pelopor dan pelapor (2P), serta memperkuat solidaritas dan kreativitas anak. Kegiatan ini menjadi wadah edukatif untuk menyampaikan suara, aspirasi, dan ide-ide anak dalam memecahkan permasalahan mereka.

- Tempat : Gedung Balairung Tuntung Pandang
- Peserta : Anak SMP/SMA di Kecamatan SeKabupaten Tanah Laut

3. Kegiatan SHANAK (Sabiji Hintalu Gasan Anak) tahun 2025

Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran anak akan manfaat telur sebagai sumber protein hewani berkualitas tinggi, kaya nutrisi (13 nutrisi penting), terjangkau, dan serbaguna bagi kesehatan semua usia. Hal ini juga menyoroti peran telur dalam ketahanan pangan dan mendukung industri unggas. Serta mengedukasi masyarakat khususnya pada anak tentang pentingnya telur untuk kesehatan, termasuk perkembangan otak, kekuatan otot, dan tulang pada masa pertumbuhan.

Tujuan utama kegiatan SHANAK (Sabuting Hintalu Gasan Anak) oleh Forum Anak Daerah (FAD) di Kalimantan Selatan adalah sebagai aksi sosial dan kepedulian untuk meningkatkan gizi anak serta mencegah stunting melalui pembagian telur, sekaligus menumbuhkan rasa kepedulian dan moralitas. Kegiatan ini juga menjadi inisiatif bersama Forum Anak Provinsi dan Kabupaten/Desa.

- Tempat : TK Waladun Soleh Pelaihari
- Peserta : Anak murid TK Waladun Soleh Pelaihari

4. Pengukuhan FAD Tanah Laut periode tahun 2025 s.d 2027

Kegiatan ini bertujuan mengesahkan wadah partisipasi resmi bagi anak untuk menyampaikan aspirasi, ide, dan kebutuhan mereka secara terstruktur kepada pemerintah. FAD berperan sebagai agen perubahan (pelopor dan pelapor) untuk melindungi hak anak, mendorong keterlibatan dalam perencanaan pembangunan, serta mewujudkan lingkungan yang ramah anak.

FAD menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam menyusun, memantau, dan mengevaluasi kebijakan/program yang berkaitan dengan anak (misalnya melalui Musrenbang).

- Tempat : Gedung Balayrung Tuntung Pandang
- Peserta : FAD Tanah Laut

5. Koordinasi Penetapan FAD Kecamatan Bati Bati

Tujuan utama penetapan Forum Anak Daerah (FAD) adalah sebagai wadah partisipasi anak untuk menjembatani komunikasi antara anak-anak dan pemerintah daerah, guna memastikan aspirasi, kebutuhan, serta kepentingan anak dipertimbangkan dalam perencanaan dan pembangunan. FAD juga

dibentuk untuk mempromosikan pemenuhan hak anak dan perlindungan anak secara menyeluruh.

- Tempat : Kecamatan Bati Bati
- Peserta : Kasi Kemasyarakatan Kec.Bati Bati

6. Rapat evaluasi Jambore FAD tahun 2025

Tujuan utama rapat evaluasi kegiatan Jambore Forum Anak Daerah adalah untuk mengukur capaian program, mengidentifikasi kendala teknis dan non-teknis, serta merumuskan perbaikan strategis agar kegiatan selanjutnya lebih efektif, inklusif, dan mampu memperkuat peran anak sebagai pelopor dan pelapor (2P).

Rapat ini menjadi dasar akuntabilitas dan perbaikan berkesinambungan bagi pengurus FAD. Serta merumuskan rekomendasi perbaikan berbasis suara anak (peserta) guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan Jambore di tahun berikutnya.

- Tempat : Aula DP3AP2KB Kab. Tanah Laut
- Peserta : FAD Tanah Laut

7. Rapat Koordinasi Pembentukan APSAI Kab.Tanah Laut

Rapat pembentukan Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) bertujuan untuk membangun wadah sinergi antara sektor swasta/dunia usaha dengan pemerintah dan masyarakat dalam rangka mempercepat upaya pemenuhan hak anak dan perlindungan anak di tingkat daerah maupun nasional. Serta menjadi pilar penggerak swasta dalam mendukung terwujudnya Kabupaten/Kota Layak Anak melalui program-program yang berperspektif anak. Secara keseluruhan, pembentukan APSAI diharapkan dapat mendorong dunia usaha untuk aktif melindungi hak-hak anak dan memperkuat kesejahteraan anak di Indonesia, selaras dengan target Indonesia Layak Anak (IDOLA) 2030.

- Tempat : Aula DP3AP2KB Kab. Tanah Laut
- Peserta : Dunia Usaha Tanah Laut

8. Rapat FAD dalam rangka pembentukan dan pengukuhan Forum Anak Kecamatan Tambang Ulang sekaligus sosialisasi FAD tahun 2025

Dalam upaya mendorong pemenuhan hak-hak anak salah satunya partisipasi anak dalam pembangunan di Kecamatan dan Desa, DP3AP2KB Kabupaten Tanah Laut Bidang PPPA program PHA menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi dan Pembentukan Forum Anak sekaligus pengukuhan bertempat di Kecamatan Tambang Ulang.

    	• Tempat : Aula Kecamatan Tambang Ulang • Peserta : Forum Anak Kecamatan Tambang Ulang

9. Koordinasi Pembentukan dan pengukuhan Forum Anak Kecamatan Batu Ampar

   Kegiatan ini bertujuan untuk Sinkronisasi kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi dengan efisiensi tertinggi dan menghindari kesalahan informasi dan persepsi dalam pelaksanaan kegiatan pembentukan dan pengukuhan FAD di Kecamatan.

- Tempat : Kantor Kecamatan Batu Ampar
- Peserta : Camat Batu Ampar, Kasi Kemasyarakatan Kec.Batu Ampar

10. Rapat FAD dalam rangka Pembentukan dan pengukuhan Forum Anak Kecamatan Batu Ampar sekaligus sosialisasi FAD. Dalam upaya mendorong pemenuhan hak-hak anak salah satunya partisipasi anak dalam pembangunan di Kecamatan dan Desa, DP3AP2KB Kabupaten Tanah Laut Bidang PPPA program PHA menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi dan Pembentukan Forum Anak Desa (FAD) bertempat di Kecamatan Batu Ampar.

- Tempat : Aula Kecamatan Batu Ampar
- Peserta : Forum Anak Kecamatan Batu Ampar

11. Rapat FAD dalam rangka penyampaian Program Kerja FAD tahun 2025

Penyampaian Program Kerja Forum Anak Daerah (FAD) bertujuan untuk mewujudkan wadah partisipasi anak yang terstruktur dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak. Program kerja ini disampaikan untuk menjembatani aspirasi anak kepada pemerintah, memastikan suara anak didengar dalam perencanaan pembangunan (Musrenbang), serta menjalankan peran sebagai Pelopor dan Pelapor (2P).

Secara rinci, tujuan penyampaian program kerja FAD meliputi:

- **Menyalurkan Aspirasi Anak:** Menjadi sarana resmi untuk menyampaikan suara, pendapat, dan kebutuhan anak kepada Pemerintah Daerah.
- **Wadah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang):** Mengintegrasikan usulan anak-anak ke dalam dokumen perencanaan pembangunan agar kebijakan yang diambil ramah anak.
- **Mengoptimalkan Peran 2P (Pelopor dan Pelapor):** Mengedukasi dan mendorong anak-anak untuk menjadi **Pelopor** (agen perubahan) dan **Pelapor** (melaporkan pelanggaran hak anak) atas masalah seperti perundungan (bullying), pernikahan dini, dan pekerja anak.
- **Pengembangan Potensi dan Interaksi:** Menyediakan ruang bagi anak untuk mengembangkan kemampuan di luar sekolah, berkumpul, dan berinteraksi secara positif.
- **Mewujudkan Lingkungan Ramah Anak:** Memastikan pemenuhan hak anak serta pencegahan kekerasan terhadap anak melalui kegiatan yang terencana dan terukur.
- **Mitra Strategis Pemerintah:** Sebagai jembatan interaksi antara anak-anak dan Pemerintah Daerah agar kebijakan yang dibuat sesuai dengan kebutuhan anak.

Program kerja yang disampaikan membantu anggota FAD bekerja secara terstruktur, terukur, dan mencapai target yang diharapkan.

- Tempat : Aula UPTD PPA
- Peserta : FAD Tanah Laut

12. Rapat FAD dalam rangka Pembelajaran Forum Anak ke Kantor Pengadilan Negeri Pelaihari

Tujuan utama kunjungan pembelajaran Forum Anak ke Pengadilan Negeri Pelaihari adalah untuk memberikan edukasi dini mengenai sistem peradilan, pemahaman hukum, serta mendukung perwujudan Kabupaten Layak Anak. Kunjungan ini bertujuan mengenalkan peran pengadilan dalam perlindungan anak, proses hukum, dan keadilan ramah anak.

Berikut rincian tujuan pembelajarannya:

- **Meningkatkan Pemahaman Hukum:** Memberikan pengetahuan mendasar kepada anggota Forum Anak mengenai fungsi pengadilan dan prosedur peradilan.
- **Mengenal Sistem Peradilan Anak:** Memahami mekanisme penanganan perkara anak (baik sebagai saksi, korban, maupun pelaku) yang berlandaskan sistem peradilan pidana anak yang ramah.
- **Mendukung Kota/Kabupaten Layak Anak (KLA):** Memperkuat sinergi antara lembaga peradilan dan Forum Anak untuk memastikan hak-hak anak terlindungi di mata hukum.
- **Edukasi Hak Anak:** Memberikan wawasan mengenai hak-hak anak di depan hukum.

Kunjungan ini merupakan bagian dari wisata edukasi yang bertujuan membentuk generasi yang cerdas hukum sejak dini.

 	• Tempat : Kantor Kecamatan Batu Ampar • Peserta : Camat Batu Ampar, Kasi Kemasyarakatan Kec.Batu Ampar

13. Pembelajaran FAD Tanah Laut ke Sekretariat FAD Provinsi Kal Sel tahun 2025

Berdasarkan rangkaian kegiatan Temu Forum Anak Daerah (FAD) Provinsi Kalimantan Selatan, tujuan pembelajaran dan kunjungan FAD Tanah Laut ke Sekretariat FAD Provinsi Kalsel (atau melalui temu forum anak) umumnya meliputi:

- **Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas:** Meningkatkan kapasitas FAD Kabupaten Tanah Laut sebagai Pelopor dan Pelapor (2P) dalam pembangunan di Kalimantan Selatan.
- **Peningkatan Peran Partisipasi Anak:** Memperkuat peran anak dalam proses perencanaan pembangunan daerah (Suara Anak).
- **Sinergi dan Koordinasi:** Menjalin sinergi antara Forum Anak tingkat kabupaten dengan pemerintah provinsi dan pemangku kepentingan terkait.
- **Studi Banding dan Edukasi:** Mempelajari praktik terbaik (best practices) mengenai program kegiatan, pengelolaan sekretariat, dan 5 kluster pemenuhan hak anak dari FAD tingkat provinsi.
- **Penyampaian Suara Anak:** Menyampaikan aspirasi anak dari Kabupaten Tanah Laut secara langsung kepada tingkat provinsi, yang seringkali mencakup isu seperti perundungan, pendidikan, dan perlindungan khusus anak.

Secara keseluruhan, kunjungan ini bertujuan untuk memastikan partisipasi aktif anak dalam pengambilan keputusan, sebagaimana ditegaskan dalam Temu FAD Provinsi Kalsel 2025 yang menekankan peran "Anak Banua Berpotensi, Berprestasi, Berkembang Bersama sebagai Pelopor dan Pelapor yang Siap Beraksi".

   	• Tempat : Sekretariat FAD Provinsi KalSel • Peserta : FAD Tanah Laut

14. Koordinasi Pembentukan dan pengukuhan Forum Anak Kecamatan Tambang Ulang

Kegiatan ini bertujuan untuk Sinkronisasi kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi dengan efisiensi tertinggi dan menghindari kesalahan informasi dan persepsi dalam pelaksanaan kegiatan pembentukan dan pengukuhan FAD di Kecamatan.Dalam upaya mendorong pemenuhan hak-hak anak salah satunya partisipasi anak dalam pembangunan di Kecamatan dan Desa, DP3AP2KB Kabupaten Tanah Laut Bidang PPPA program PHA menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi dan Pembentukan sekaligus pengukuhan Forum Anak bertempat di Kecamatan Tambang Ulang.

- Tempat : Kantor Kecamatan Tambang Ulang
- Peserta : Camat Tambang Ulang, Kasi Kemasyarakatan Kec.Tambang Ulang

15. Kegiatan Shanak oleh FAD Tanah Laut untuk Santriwati di Pondok Pesantren Alqonitat Pelaihari

Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran anak akan manfaat telur sebagai sumber protein hewani berkualitas tinggi, kaya nutrisi (13 nutrisi penting), terjangkau, dan serbaguna bagi kesehatan semua usia. Hal ini juga menyoroti peran telur dalam ketahanan pangan dan mendukung industri unggas. Serta mengedukasi masyarakat khususnya pada anak tentang pentingnya telur untuk kesehatan, termasuk perkembangan otak, kekuatan otot, dan tulang pada masa pertumbuhan.

Tujuan utama kegiatan SHANAK (Sabuting Hintalu Gasan Anak) oleh Forum Anak Daerah (FAD) di Kalimantan Selatan adalah sebagai aksi sosial dan kepedulian untuk meningkatkan gizi anak serta mencegah stunting melalui pembagian telur, sekaligus menumbuhkan rasa kepedulian dan moralitas. Kegiatan ini juga menjadi inisiatif bersama Forum Anak Provinsi dan Kabupaten/Desa.

	• Tempat : Ponpes Alqonitat Pelaihari
Kegiatan Shanak oleh FAD Tanah Laut untuk anak2 pengunjung di RBRA Desa Sumber Mulia	• Tempat : RBRA desa Sumber Mulia

16. Verifikasi Lapangan Evalusi KLA Tahun 2025 secara online

Tujuan utama Verifikasi Lapangan (VL) Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) adalah memvalidasi kesesuaian data administratif dengan kondisi riil di lapangan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak. Ini mencakup pengecekan infrastruktur, sarana prasarana, serta komitmen lintas sektor dalam menerapkan 24 indikator KLA secara langsung. Verifikasi lapangan ini sering dilakukan secara hybrid (online dan fisik) oleh Tim Verifikator dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA).

 	• Tempat : Command Center Tanah Laut • Peserta : FAD Tanah Laut, wakil Bupati, sekDa, Kepala SKPD terkait, Kepala Desa Sumber Mulia, kepala Puskesmas Pelaihari

b) Sosialisasi Perlindungan Anak

Sosialisasi perlindungan anak adalah kegiatan penyampaian informasi, edukasi, dan peningkatan kesadaran kepada masyarakat mengenai hak anak, bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak, serta mekanisme pencegahan dan penanganannya sesuai peraturan perundang-undangan.

Tujuan Sosialisasi

- Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban anak.
- Mencegah terjadinya kekerasan fisik, psikis, seksual, penelantaran, dan eksploitasi.
- Mendorong partisipasi masyarakat dalam perlindungan anak.
- Membangun mekanisme pelaporan yang aman dan ramah anak.

1. Rapat Koordinasi Forum Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak dan Perempuan Tanggal 16 Januari 2025

- Tempat : Ruang Rapat Wakil Bupati
- Peserta : Tim Forum Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak dan Perempuan
- Jumlah : 20 Orang

2. Sosialisasi Hukum Dan Restitusi di Kec. Takisung Narasumber dari Pengadilan Negeri Pelaihari Tanggal 18 Februari 2025

- Tempat : Aula Kec. Takisung
- Peserta : Babinsa dan Bhabinkamtibmas
- Jumlah : 15 Orang

3. Sosialisasi Hukum Dan Restitusi di Kec. Tambang Ulang Narasumber dari Kejaksaan Negeri Tanah Laut dan BNNK Kab. Tanah Laut Tanggal 25 Februari 2025

	• Tempat : Aula Kec. Tambang Ulang • Peserta : Babinsa dan Bhabinkamtibmas • Jumlah : 20 Orang
4. Sosialisasi Hukum Dan Restitusi di Kec. Bajuin Narasumber dari Pengadilan Negeri Pelaihari dan Kodim 1009 Tanah Laut Tanggal 27 Februari 2025	
	• Tempat : Aula Kec. Bajuin • Peserta : Babinsa dan Bhabinkamtibmas • Jumlah : 15 Orang
5. Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Pada Anak di Man Insan Cendekia Tanah Laut Narasumber dari Pengadilan Negeri Pelaihari dan IPK Kalimantan Selatan Tanggal 13 Maret 2025	

	• Tempat : MAN IC Tanah Laut • Peserta : Siswa Siswi Kelas XI • Jumlah : 100 Orang
6. Sosialisasi Hukum Dan Restitusi di Kec. Pelaihari Narasumber dari Kejaksaan Negeri Tanah Laut dan BNNK Kab. Tanah Laut Tanggal 16 April 2025	
	• Tempat : Aula Kec. Pelaihari • Peserta : Babinsa dan Bhabinkamtibmas • Jumlah : 15 Orang
7. Sosialisasi Hukum Dan Restitusi di Kec. Bati-Bati Narasumber dari Pengadilan Negeri Pelaihari dan Polres Tanah Laut Tanggal 17 April 2025	

	• Tempat : Aula Kec. Bati-Bati • Peserta : Babinsa dan Bhabinkamtibmas • Jumlah : 20 Orang
8. Sosialisasi Hukum Dan Restitusi di Kec. Kurau Narasumber dari Pengadilan Negeri Pelaihari dan Balai Pemasyarakatan Kelas IB Banjarmasin Tanggal 29 April 2025	
	• Tempat : Aula Kec. Kurau • Peserta : Babinsa dan Bhabinkamtibmas • Jumlah : 20 Orang
9. Sosialisasi Hukum Dan Restitusi di Kec. Jorong Narasumber dari Polres Tanah Laut dan BNNK Kab. Tanah Laut Tanggal 30 April 2025	

	• Tempat : Aula Kec. Jorong • Peserta : Babinsa dan Bhabinkamtibmas • Jumlah : 20 Orang
10. Sosialisasi Hukum Dan Restitusi di Kec. Bumi Makmur Narasumber dari Polres Tanah Laut dan Balai Pemasyarakatan Kelas IB Banjarmasin Tanggal 19 Mei 2025	
	• Tempat : Aula Kec. Bumi Makmur • Peserta : Babinsa dan Bhabinkamtibmas • Jumlah : 15 Orang
11. Sosialisasi Hukum Dan Restitusi di Kec. Panyipatan Narasumber dari Pengadilan Negeri Pelaihari dan BNNK Kab. Tanah Laut Tanggal 20 Mei 2025	

	• Tempat : Aula Kec. Panyipatan • Peserta : Babinsa dan Bhabinkamtibmas • Jumlah : 15 Orang
12. Sosialisasi Hukum Dan Restitusi di Kec. Kintap Narasumber dari Pengadilan Negeri Pelaihari dan Kejaksaan Negeri Tanah Laut Tanggal 21 Mei 2025	
	• Tempat : Aula Kec. Kintap • Peserta : Babinsa dan Bhabinkamtibmas • Jumlah : 15 Orang
13. Sosialisasi Hukum Dan Restitusi di Kec. Batu Ampar Narasumber dari Kodim 1009 Tanah Laut dan Rutan Kelas II B Pelaihari Tanggal 23 Mei 2025	

	• Tempat : Aula Kec. Batu Ampar • Peserta : Babinsa dan Bhabinkamtibmas • Jumlah : 20 Orang
14. Sosialisasi Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) di Kec. Bati-Bati Tanggal 2 Juli 2025	
	• Tempat : Aula Kec. Bati-Bati • Peserta : Seluruh Kepala Desa • Jumlah : 20 Orang
15. Sosialisasi Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) di Kec. Batu Ampar Tanggal 3 Juli 2025	

	• Tempat : Aula Kec. Batu Ampar • Peserta : Seluruh Kepala Desa • Jumlah : 20 Orang
16. Sosialisasi Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) di Kec. Kintap Tanggal 14 Juli 2025	
	• Tempat : Aula Kec. Kintap • Peserta : Seluruh Kepala Desa • Jumlah : 20 Orang
17. Sosialisasi Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) di Kec. Jorong Tanggal 15 Juli 2025	
	• Tempat : Aula Kec. Jorong • Peserta : Seluruh Kepala Desa • Jumlah : 15 Orang

18. Sosialisasi Pencegahan Kekerasan pada Anak di MTsN 2 Tanah Laut Tanggal 7 Agustus 2025	
	• Tempat : MTsN 2 Tanah Laut • Peserta : Siswa Siswi • Jumlah : 100 Orang
19. Sosialisasi Pencegahan Kekerasan pada Anak di SMKN 1 Pelaihari Tanggal 8 Agustus 2025	
	• Tempat : SMKN 1 Pelaihari • Peserta : Siswa Siswi • Jumlah : 100 Orang
20. Sosialisasi Pencegahan Kekerasan pada Anak di SMPN 1 Pelaihari Tanggal 11 Agustus 2025	

	• Tempat : SMPN 1 Pelaihari • Peserta : Siswa Siswi • Jumlah : 100 Orang
21. Sosialisasi Pencegahan Kekerasan pada Anak di SMPN 2 Pelaihari Tanggal 12 Agustus 2025	
	• Tempat : SMPN 2 Pelaihari • Peserta : Siswa Siswi • Jumlah : 100 Orang
22. Sosialisasi Pencegahan Kekerasan pada Anak di SMPN 5 Pelaihari Tanggal 1 September 2025	

	• Tempat : SMPN 5 Pelaihari • Peserta : Siswa Siswi • Jumlah : 100 Orang
23. Sosialisasi Pencegahan Kekerasan pada Anak di SMPN 4 Pelaihari Tanggal 2 September 2025	
	• Tempat : SMPN 4 Pelaihari • Peserta : Siswa Siswi • Jumlah : 100 Orang
24. Sosialisasi Pencegahan Kekerasan pada Anak di SMPN 7 Pelaihari Tanggal 16 September 2025	

	• Tempat : SMPN 7 Pelaihari • Peserta : Siswa Siswi • Jumlah : 100 Orang
25. Sosialisasi Pencegahan Kekerasan pada Anak di SMKN 2 Pelaihari Tanggal 22 September 2025	
	• Tempat : SMKN 2 Pelaihari • Peserta : Siswa Siswi • Jumlah : 100 Orang
26. Pelatihan Konvensi Hak Anak Tanggal 24 s.d 26 September 2025, peserta perwakilan forkopimda dan beberapa SKPD	

	• Tempat : Hotel Aeris Banjarbaru • Peserta : Forkopimda • Jumlah : 25 Orang
27. Sosialisasi Pencegahan Kekerasan pada Anak di Kantor Desa Kuringkit Tanggal 2 Oktober 2025	
	• Tempat : Kantor Desa Kuringkit • Peserta : Siswa Siswi dan Masyarakat • Jumlah : 100 Orang
28. Sosialisasi Pencegahan Kekerasan pada Anak di MTsS Darul Ilmi Panyipatan Tanggal 2 Oktober 2025	

	• Tempat : MTsS Darul Ilmi • Peserta : Siswa Siswi dan Masyarakat • Jumlah : 100 Orang
29. Sosialisasi Pencegahan Kekerasan pada Anak di MTsN 4 Tanah Laut Tanggal 13 Oktober 2025	
	• Tempat : MTsN 4 Tanah Laut • Peserta : Siswa Siswi • Jumlah : 100 Orang
30. Sosialisasi Pencegahan Kekerasan pada Anak di SMPN 8 Pelaihari Tanggal 10 November 2025	

	• Tempat : SMPN 8 Pelaihari • Peserta : Siswa Siswi • Jumlah : 100 Orang
31. Sosialisasi Pencegahan Kekerasan pada Anak di SDN Damar Lima Tanggal 2 November 2025	
	• Tempat : SDN Damar Lima • Peserta : Siswa Siswi • Jumlah : 100 Orang
32. Rapat Koordinasi Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Rangka Raperbup Cegah Kawin Anak Tanggal 12 November 2025	

	• Tempat : UPTD PPA • Peserta : SKPD Lintas Sektor • Jumlah : 25 Orang
33. Rapat Evaluasi Perlindungan Perempuan Dan Anak Sekaligus Rbra Rth Sumber MulyaTanggal 11 November 2025	
	• Tempat : Ruang Executive Lounge Setda • Peserta : SKPD Lintas Sektor • Jumlah : 25 Orang

Kegiatan sosialisasi di sekolah dapat memberikan dampak meningkatnya kesadaran hukum masyarakat, berkurangnya kasus kekerasan terhadap anak, terbentuknya lingkungan keluarga dan sekolah yang aman dan anak merasa terlindungi dan dihargai haknya.

Faktor Pendorong/Keberhasilan

Faktor pendorong utama keberhasilan pemenuhan hak anak meliputi kehadiran orang dewasa yang suportif dan penuh kasih sayang, penguatan peran keluarga, serta dukungan kebijakan pemerintah melalui Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). Sinergi lintas sektor, termasuk peran masyarakat dan dunia usaha, sangat penting dalam menyediakan sarana dan lingkungan aman.

Berikut adalah faktor pendorong keberhasilan pemenuhan hak anak secara lebih terperinci:

1. **Kehadiran Orang Dewasa yang Suportif:** Kehadiran orang tua, guru, atau wali yang konsisten memberikan rasa aman, kasih sayang, dan pengasuhan positif adalah faktor paling utama bagi ketahanan dan tumbuh kembang anak.
2. **Penguatan Peran Keluarga dan Lingkungan:** Pemahaman keluarga mengenai hak anak serta lingkungan sosial yang mendukung akan memotivasi anak secara internal untuk berkembang.
3. **Kebijakan Pemerintah dan Sistem Hukum:** Ratifikasi Konvensi Hak Anak, peraturan perundang-undangan, dan inisiatif seperti *Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)* menjadi landasan hukum utama.
4. **Sinergi Lintas Sektor:** Dukungan dari lembaga masyarakat, dunia usaha, dan instansi pemerintah yang berkolaborasi menyediakan sarana prasarana, pendidikan, dan kesehatan.
5. **Partisipasi Anak:** Adanya wadah seperti Forum Anak di berbagai tingkat membantu anak memahami dan menyuarakan hak-hak mereka sendiri.
6. **Sosialisasi dan Advokasi:** Publikasi yang gencar mengenai hak-hak anak untuk menyamakan persepsi di tingkat keluarga, masyarakat, dan pemerintah.

Faktor Penghambat/Kegagalan

Faktor penghambat utama pemenuhan hak anak di tingkat Kabupaten meliputi keterbatasan anggaran, kurangnya sarana-prasarana (seperti ruang aman/LPKS), lemahnya koordinasi antar instansi (ego sektoral), kurangnya SDM ahli, serta rendahnya pemahaman masyarakat dan budaya perkawinan usia anak. Tantangan ini seringkali mengakibatkan pengabaian hak sipil, pendidikan, dan perlindungan khusus.

Berikut adalah rincian faktor penghambat tersebut:

- **Keterbatasan Anggaran & Fasilitas:** Anggaran daerah yang terbatas untuk program anak dan minimnya fasilitas (rumah aman, fasilitas LPKA) menghambat perlindungan yang optimal.
- **Lemahnya Koordinasi & SDM:** Kurangnya tenaga ahli di lembaga pendukung (KPAD/UPTD PPA) dan ego sektoral menyebabkan program tidak berjalan efisien.
- **Faktor Sosial & Budaya:** Rendahnya kesadaran orang tua/masyarakat, budaya perkawinan anak, dan pola asuh yang kurang tepat (termasuk *broken home*).
- **Kondisi Ekonomi:** Kemiskinan memaksa anak putus sekolah dan menjadi pekerja anak.
- **Administrasi & Hukum:** Rendahnya kesadaran pengurusan akta lahir dan kurangnya sosialisasi hak anak.
- **Lemahnya Penegakan Hukum:** Kurang responsifnya aparat terhadap kekerasan pada anak.
- **Kurangnya Pelatihan Kovensi Hak Anak** kepada berbagai pihak yang terlibat dalam pengasuhan, pelayanan, dan pengambilan kebijakan terkait anak.
- **Belum adanya Perda tentang Kabupaten Layak Anak**.

Kombinasi faktor-faktor di atas, terutama di wilayah kabupaten, membuat implementasi kebijakan Kabupaten Layak Anak (KLA) menjadi tidak optimal.

Alternatif Solusi/Rencana Aksi yang Akan Dilakukan

1. Mengalokasikan anggaran untuk mendukung program pemenuhan hak anak seperti pelatihan konvensi hak anak (KHA) dan pelatihan tata laksana Kekerasan Terhadap anak (KTA) serta standarisasi fasilitas layanan yang ramah anak.

2. Meningkatkan Advokasi dan Sosialisasi mengenai Standarisasi Sekolah Ramah Anak, Rumah Ibadah Ramah Anak, Puskesmas Ramah Anak, Ruang Bermain Ramah Anak, serta Pembentukan Forum Anak daerah di Tingkat Kecamatan hingga Desa.
3. Akreditasi/Standarisasi UPTD PPA dan Puspaga Kabupaten Tanah Laut
4. Peningkatan dan Pengembangan Pusat Kreativitas Anak dan Pusat Informasi Sahabat Anak.
5. Penguatan Tim Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak.
6. Pembentukan FAD di setiap Kecamatan, Kelurahan dan Desa di seluruh Kabupaten.
7. Pembentukan PATBM dan DRPPA di setiap Desa pada seluruh wilayah Kabupaten serta pembekalan dan pelatihan.
8. Pelatihan Konvensi Hak Anak kepada berbagai pihak yang terlibat dalam pengasuhan, pelayanan, dan pengambilan kebijakan terkait anak dengan tujuan meningkatkan pemahaman mengenai lima klaster hak anak, implementasi KHA, serta memperkuat perlindungan dan pemenuhan hak.
9. Perlindungan anak merupakan upaya untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya yang berfokus pada pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak, perlindungan dari pekerja anak, paenanganan anak berhadapan dengan hukum dan pencegahan perkawinan anak. Sedangkan pemenuhan hak anak merupakan upaya untuk memastikan setiap anak memperoleh hak-haknya secara utuh sesuai peraturan perundang-undangan dan Konvensi Hak Anak, dengan berfokus pada memberikan dan menjamin hak anak agar tumbuh dan berkembang secara optimal. Sehingga kedua hal tersebut mempunyai peran yang berbeda.

Analisa Pencapaian Sasaran Strategis 2

Terkendalinya Penduduk

Terkendalinya Penduduk diukur melalui 1 indikator dengan realisasi dan capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.1.2
Capaian Kinerja Terhadap Target 2025

NO	Sasaran	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI			TAHUN 2025		
				TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terkendalinya Penduduk	TFR (Total Fertility Rate) (Angka)	Angka	2,12	2,04	2,2	2,19	2,2	99,54%
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA 2025									99,54%

Tabel 3.1.3
Capaian Kinerja Terhadap Target Akhir Renstra

NO	Sasaran	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2025			TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN TAHUN 2025 THD TARGET AKHIR RENSTRA
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN		
1	Terkendalinya Penduduk	TFR (Total Fertility Rate) (Angka)	Angk a	2,19	2,2	99,54%	2,15	97,73%

Capaian Kinerja Terhadap Kabupaten/Kota Lain, Provinsi dan Nasional

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tanah bumbu	Banjar	Banjarbaru	Provinsi	Nasional
1	Terkendalinya Penduduk	TFR (Total Fertility Rate) (Angka)	Angka	2.41	2.27	2.06	2.29	2.12

a. TFR (Total Fertility Rate)

Total Fertility Rate (TFR)/ Angka Kelahiran Total adalah jumlah anak rata-rata yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan selama masa reproduksinya. Manfaat TFR adalah sebagai indikator untuk membandingkan keberhasilan antar wilayah dalam melaksanakan pembangunan sosial ekonomi, menunjukkan tingkat keberhasilan program KB, membantu para perencana program pembangunan untuk meningkatkan rata-rata usia kawin, meningkatkan program pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan pelayanan ibu hamil dan perawatan anak, serta mengembangkan program penurunan tingkat kelahiran. Pada pengukuran target kinerja TFR jika realisasi semakin rendah maka pencapaian kinerja semakin baik.

Rumus TFR

TFR = ∑ ASFR X 5/1000
(interval kelompok umur)/(1000 penduduk pada usia 15-49 tahun)

TFR adalah jumlah anak rata-rata yang dilahirkan oleh seorang perempuan selama masa reproduksinya.
ASFR atau Age-Specific Fertility Rate, adalah ukuran demografi yang menunjukkan angka kelahiran pada kelompok umur tertentu (misalnya, 15-19 tahun) per 1.000 perempuan pada kelompok umur yang sama dalam satu tahun tertentu.

Perhitungan realisasi TFR tahun 2025

AGE SPESIFIK FERTALITY RATE (ASFR)					
No	Kelompok Umur Wanita	Jumlah Penduduk Wanita	Jumlah Kelahiran	ASFR	Tahun
1	15-19 TH	14.966	365	24,38	2025
2	20-24 TH	15.103	2745	181,42	
3	25-29 TH	13.739	1621	117,98	
4	30-34 TH	14.033	981	69,91	
5	35-39 TH	14.321	604	42,17	
6	40-44 TH	14.743	54	3,66	
7	45-49 TH	13.795	34	2,46	
JUMLAH		100.700	5067	441,98	

RUMUS

TFR = $\sum ASFR \ X \frac{5}{1000}$

= (24,38 + 181,42 + 117.98 +69,91 +42,17 + 3,66 + 2,46)

= 441,98 x 5

= 2,20 per 1000 penduduk pada usia 15-49 tahun

Grafik

Total Fertility Rate (TFR) Tahun 2021-2025

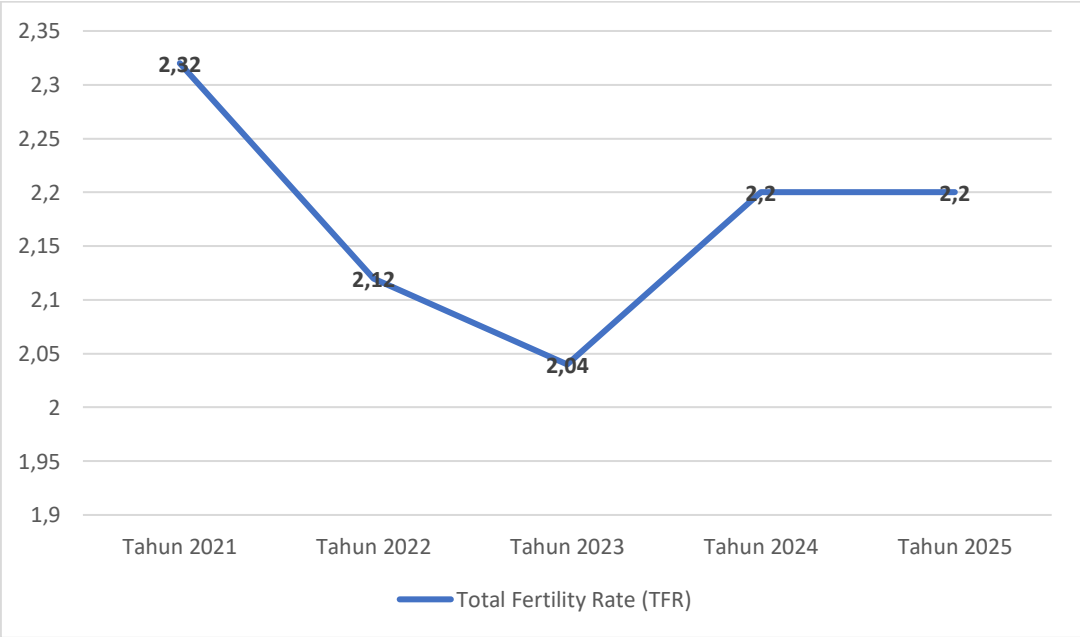

1) Perbandingan antar realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Capaian kinerja sasaran strategis perangkat daerah pada tahun 2025 menunjukkan hasil yang cukup signifikan, meskipun indikator mencapai target yang telah ditetapkan. Berdasarkan data yang disajikan, capaian indikator "Total Fertility Rate (TFR) pada tahun 2025 tercatat sebesar 2,20, atau setara dengan 99,54% dari target yang telah ditetapkan sebesar 2,19. capaian kinerja pada tahun 2025 belum mencapai. Sebagai perbandingan, realisasi capaian pada tahun 2024 adalah 2.20.

Tren peningkatan dari tahun ke tahun menunjukkan progres yang baik, mengingat capaian indikator pada tahun 2021 hanya sebesar 2,32 dan terus meningkat menjadi 2,12 pada 2022, pada tahun 2023 memperoleh nilai 2,04, namun menurun pada tahun 2024 sebesar 2,20, dan tetap pada tahun 2025 sebesar 2,20. Hal ini mencerminkan adanya upaya perbaikan kinerja namun belum signifikan dalam meningkatkan Capaian Total Fertility Rate (TFR) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

2) Perbandingan Realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Organisasi

Indikator " Total Fertility Rate (TFR)" Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada tahun 2025 tercatat mencapai 2,20 yang setara dengan 99,54% dari target tahunan yang ditetapkan sebesar 2,19. Jika dibandingkan dengan target jangka menengah (2029), yaitu sebesar 2,15, capaian hingga tahun 2025 telah mencapai 97,73% dari target akhir Renstra.

3) Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan Kabupaten/Kota lain, Provinsi dan Nasional

Indeks Total Fertility Rate (TFR) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2025 tercatat sebesar 2,20. Jika dibandingkan dengan Kota

Banjarbaru yang mencatat indeks sebesar 2,06 Kabupaten Tanah Laut masih memiliki selisih sebesar 0,14 poin. Capaian Kota Banjarbaru menunjukkan Total Fertility Rate (TFR) yang lebih baik, yang mengindikasikan bahwa kualitas layanan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di kabupaten tersebut dinilai lebih optimal. Namun, jika dibandingkan dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, yang mencatat indeks Total Fertility Rate (TFR) sebesar 2,29, Kabupaten Tanah Laut memiliki selisih capaian yang lebih baik, yaitu sebesar 0,09 poin. Apabila dibandingkan dengan Nasional yang mencatat sebesar 2,12 yang berarti capaian kabupaten Tanah Laut masih dibawah capaian Nasional 0,08 poin.

Hal ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Tanah Laut perlu melakukan evaluasi untuk mengidentifikasi praktik terbaik yang diterapkan oleh Kota Banjarbaru dalam meningkatkan indeks Total Fertility Rate (TFR) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Peningkatan kualitas layanan, responsivitas, dan penyediaan fasilitas pendukung yang lebih baik serta peningkatan kompetensi para Penyuluh KB, Kader IMP dan Kader TPK dapat menjadi fokus utama perbaikan di masa mendatang.

4) Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Dalam mencapai sasaran strategis “Terkendalinya Penduduk”, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melaksanakan Peningkatan Kualitas Informasi Data Keluarga, Peningkatan Pengetahuan Program Bangga Kencana, Peningkatan Kepesertaan Keluarga Bencana, Dan Peningkatan Ketahanan Dan Keluarga Sejahtera.

1. Peningkatan Kualitas Informasi Data Keluarga
   a) Pelatihan Teknis Penyuluh KB

      Mengikut sertakan penyuluh KB untuk mengikuti:

      - Pembekalan Tim Pelaksana dalam Penyiapan PMT berbasis pangan lokal bagi bumil KEK serta Balita Bermasalahan Gizi Tk. Kab/Kota dan Puskesmas pada tanggal 22 Mei 2025 di Aula UPTD Puskesmas Takisung.

- Sosialisasi Program Bangga Kencana Bersama mitra kerja di Provinsi Kalimantan Selatan yang dilaksanakan pada tanggal 9 Juni 2025 di Balairung Tuntung Pandang.
- Kegiatan bimbingan teknis peran Kesehatan dalam optimalisasi program kerja Integritas Layanan Primer (ILP) yang dilaksanakan tanggal 22 s/d 25 Agustus 2025 di Hotel Rattan Inn Banjarmasin.

b) Monitoring Dan Evaluasi Data Melalui Aplikasi SIGA

Telah dilaksanakan Rapat monitoring dan evaluasi Data SIGA pada tanggal 10 November 2025, dengan narasumber Tim Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan dan peserta para Penyuluh KB/PLKB dan Operator SIGA dari DP3AP2KB sebanyak 25 orang bertempat di Aula DP3AP2KB Kabupaten Tanah Laut.

Gambar 1. Rapat Evaluasi Data Siga, 10 November 2025, Jumlah Peserta 25 Orang

c) Pembinaan Kampung KB

- Telah dilaksanakan Pertemuan POKJA Kampung KB pada tanggal 31 Juli 2025, dengan narasumber Angoota Tim Pengendalian Penduduk

Perwkilan BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan dan peserta para pengelola Pokja Kampung KB sebanyak 30 orang bertempat di Gedung Hutan Jati Setda Kabupaten Tanah Laut.

Gambar 1. Pembekalan Pokja Kampung KB, 31 Juli 2025, Jumlah Peserta 30 Orang

- Telah dilaksanakan Rapat Penguatan Kampung KB pada tanggal 31 Juli 2025, dengan Ketua Tim Pengendalian Penduduk Perwkilan BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan dan peserta SKPD terkait Kampung KB sebanyak 25 orang bertempat di Ruang Rapat Lantai III Setda Kabupaten Tanah Laut.
- Telah dilaksanakan Rapat Penguatan Kampung KB pada tanggal 18 Desember 2025, dengan narasumber Anggota Tim Pengendalian Penduduk Perwkilan BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan dan peserta para pejabat dari Kecamatan dan Anggota Pokja Kampung KB serta pengelola/operator website Kampung KB sebanyak 55 orang bertempat di Ruang Dialektika BAPPERIDA Kabupaten Tanah Laut.

Gambar 1. Rapat Penguatan Kampung Kb, 18 Desember 2025, Jumlah Peserta 55 Orang

d) Pembinaan Rumah DataKU

Telah dilaksanakan Pelatihan Rumah Dataku pada tanggal 29 Juli 2025, dengan narasumber Penyuluh KB dan peserta para pengelola/operator website Kampung KB sebanyak 66 orang bertempat di Aula DP3AP2KB Kabupaten Tanah Laut.

Gambar 1. Pembinaan Rumah Dataku, 29 Juli 2025, Jumlah Peserta 66 Orang

2. Peningkatan Pengetahuan Program Bangga Kencana

a) Pelaksanaan Advokasi KIE

1) Advokasi Program Bangga Kencana Kepada Stakeholder Dan Mitra Kerja

Rapat Koordinasi Tim Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting Tingkat Kabupaten sekaligus Rembuk Stunting pada tanggal 5, 6 dan 7 Agustus 2025 adalah upaya dalam memberikan Advokasi Program Bangga Kencana Kepada Stakeholder dan Mitra Kerja dengan target sebanyak 202 organisasi yaitu dari Organisasi Perangkat Daerah, Instansi Vertikal, Pemerintah Desa, Lembaga Pendidikan, BAZNAS termasuk Wartawan yang tergabung dalam PWI. Adapun peserta yang diundang dan menghadiri kegiatan ini telah sesuai target 100% yaitu mewakili dari 202 Organisasi yang terdiri dari Organisasi Perangkat Daerah sebanyak 40 SKPD, Instansi Vertikal (Keajaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, Polres, Kodim, Kemenag, Pengadilan Agama), Pemerintah Desa sebanyak 135 Desa/Kelurahan, Puskesmas sebanyak 22 Puskesmas, Lembaga Pendidikan (Politala), BAZNAS serta wartawan. Pada kegiatan tersebut menghasilkan komitmen bersama dalam upaya Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting di Kabupaten Tanah Laut.

2) Pelaksanaan Operasional Bangga Kencana Tingkat Kecamatan/Desa

- Pelaksanaan Operasional Bangga Kencana Tingkat Kecamatan dilaksanakan melalui kegiatan Mini Lokakarya (Minilok) Tingkat Kecamatan.

  kegiatan Mini Lokakarya (Minilok) Tingkat Kecamatan adalah forum pertemuan lintas sektor yang dipimpin Camat untuk mengevaluasi dan merencanakan percepatan penurunan stunting. Fokus utamanya adalah koordinasi Tim Pendamping Keluarga (TPK), evaluasi intervensi (seperti Elsimil), dan memastikan sinergi antara Puskesmas, KUA, PKK, dan desa

  Kegiatan Mini Lokakarya (Minilok) Tingkat Kecamatan dengan target 110 kali dan sudah dilaksanakan sebanyak 110 kali (100%) dengan rincian masing-masing Kecamatan di laksanakan sebanyak 10 kali.

- Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana Tingkat Desa, dilaksanakan melalui Kegiatan Pertemuan Kelompok Kerja (POKJA) di Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB).

  Kampung KB adalah satuan wilayah setingkat desa dimana terdapat integrasi dan konvergensi penyelenggaraan pemberdayaan dan penguatan institusi keluarga dalam seluruh demensinya guna meiningkatkan kualitas sumber daya manusia, keluarga dan masyarakat, di Kabupaten Tanah Laut telah dibentuk Kampung KB di semua Desa dan Kelurahan yaitu sebanyak 135 Desa dan Kelurahan.

  Pertemuan POKJA di Kampung KB dilaksanakan dalam rangka penguatan Kampung KB telah dilaksanakan sesuai dengan target 100% yaitu sebanyak 159 kali pertemuan dengan rincian 3 kali pertemuan di 53 Kampung KB.

3) Promosi dan KIE Program Bangga Kencana

Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) dilaksanakan sesuai rencana yaitu :

- Melalui media massa elektronik radio, bekerjasama dengan radio Tuntung Pandang FM dengan membuat dan menayangkan iklan terkait Program Bangga Kencana sebanyak 100 kali tayang, yang terdiri dari 5 tema yang terdiri dari tema Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting(GENTING), Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI), Taman Asuh Sayang Anak (TAMASYA), Program Lansia Berdaya (SIDAYA) dan iklan tentang rencana layanan AI – SuperApps Tentang Keluarga Kemundukbangga/BKKBN.
- Melalui media cetak, dengan mencetak leaflet dan poster yang dibagikan kepada masyarakat melalui para penyuluh KB dan dibagikan saat Pameran Tanah Laut Expo.
- Media Luar Ruang, telah dilaksanakan dengan mencetak spanduk yang dipasang di depan kantor DP3AP2KB, semua kantor Kecamatan dan di area Gunung Kayangan.

- Melalui media sosial baik instagram dan facebook resmi DP3AP2KB, serta Instagram masing-masing Balai Penyuluh KB di semua Kacamatan Kabupaten Tanah Laut, serta melalui website Kampung KB .

b) Peningkatan kapasitas SDM Lini Lapangan KB

1) Pembinaan Tenaga Lini Lapangan

Kegiatan pembinaan tenaga lini lapangan adalah dukungan operasional untuk peningkatan kapasitas tenaga lini lapangan dan pengelolaan data dengan tujuan meningkatkan capaian Program Bangga Kencana dan mendukung pencegahan dan percepatan penurunan stunting.

Sasaran kegiatan antara lain penyuluh KB dan PLKB, mitra kerja, Kader Institusi Masyarakat Perdesaan/Perkotaan (IMP) Bangga Kencana, Tim Pendamping Keluarga (TPK) dan pengelola data.

Pembinaan Tenaga Lini lapangan telah dilaksanakan oleh para Penyuluh KB/PLKB sesuai target/rencana yaitu sebanyak 110 kali dengan rincian 10 kali pada masing-masing balai Penyuluh KB dengan peserta adalah Kader PPKBD dan Sub Kader PPKBD sebanyak 10 orang peserta pada setiap kali pelaksanaan kegiatan pembinaan.

2) Peningkatan kapasitas penyuluh KB dan bidang pelayanan KB

Dalam upaya peningkatan pengetahuan dan keterampilan bidan dalam hal pelayanan KB merupakan salah satu upaya penting dalam meningkatkan Kesehatan ibu dan anak serta mengendalikan laju pertumbuhan penduduk, kegiatan ini bertujuan dalam rangka meningkatkan kompetensi dan keterampilan bagi tenaga pelayanan KB baik bidan di Puskesmas maupun bidan desa, guna memberikan pelayanan yang lebih baik, bermutu kepada masyarakat serta mengurangi efek samping kegagalan pengunaan alat kontrasepsi KB, peserta kegiatan adalah seluruh perwakilan bidan dari pusekesmas dan bidan desa yang tersebar di seluruh Kabupaten Tanah Laut, dengan menghadirkan narasumber dokter Spesialis Obgyn yang menyampaikan materi terkait penanganan komplikasi pelayanan KB Khususnya Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dan Narasumber selanjutnta Ketua Tim Kerja peningkatan akses dan kualitas Pelayanan KB dan kesehatan Reproduksi dari perwakilan Kemendukbagga/BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan yang menyampaikan materi mengenai metode kontrasepsi Impalnt/susuk. Melalui kegiatan ini para bidan semakin terampil dalam memberikan pelayanan KB yang aman, nyaman dan berkualitas bagi masayarakat.

Dokumen : Peningkatan dan Pengetahuan Pelayanan KB Bagi Bidan

3. Peningkatan Kepesertaan Keluarga Bencana

a) Pelaksanaan promosi konseling dan pembinaan pelayanan KB

Dalam rangka mendukung keberhasilan program KB, telah dilaksanakan kegiatan promosi dan konseling pelayanan KB kepada masayarakat sebagai upaya penting untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran serta partisipasi Masayarakat dalam pengunaan alat dan metode kontrasepsi yang tepat sesuai dengan kebutuhan akseptor, kegiatan ini merupakan upaya dalam mewujudkan perluasan akses pelayanan KB kepada seluruh lapisan masayarakat.

Dokumen : Promosi dan Konseling Pelayanan KB

b) Penyediaan penggunaan kontrasepsi Alat dan Obat Kontrasepsi

Dalam rangka mendukung kelancaran pelayanan Keluarga Berencana (KB) diperlukan ketersedian alat dan Obat kontrasepsi (ALOKON) yang cukup dan merata oleh karena itu dilakukan kegiatan pendistribusian Alokon KB ke Fasilitas Kesehatan (faskes) maupun Praktek Bidan Mandri (PMB) sesuai dengan kebutuhan dan permintaan agar menjamin ketersediaan Alokon di Fasilitas Kesehatan Maupin Praktek Bidan Mandiri guna mendukung kelancaran pelayanan KB dan meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan KB.

Dokumen : Pendistribusian Alokon ke Fasilitas Kesehatan (FASKES)

4. Peningkatan Ketahanan dan Keluarga Sejahtera
   f. Peningkatan kapasitas kelompok kegiatan dan kesejahteraan keluarga
      3) Pelatihan kader kesejahteraan dan ketahanan keluarga

      Kegiatan Orientasi Bina keluarga balita (BKB) dilaksanakan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman bagi kader BKB dalam mendukung Tumbuh kembang balita secara optimal, peningkatan pengetahuan kader BKB memahami konsep dasar tumbuh kembang balita yang meliputi aspek fisik, motorik, kognitif, Bahasa, sosial dan emosial, kegiatan ini dilaksanakan diseluruh kecamatan dengan menghadirkan psikolog sebagai narasumber.

Dokumen : Peran Kader dalam Tumbuh Kembang Balita

4) Pelaksanaan pelatihan peningkatan ekonomi keluarga Akseptor

Pada kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan peran keluarga akseptor dalam pemberdayaan dan peningkatan pendapatan ekonomi keluarga, kegiatan ini berfokus pada pembelajaran pembuatan industri kerajinan anyaman purun, pelatihan usaha peningkatan pendapatan keluarga akseptor (UPPKA) ini merupakan Langkah strategis dalam memperdayakan keluarga akseptor melalui pengembagan usaha ekonomi produktif dengan meningkatkan keterampilan dan akses terhadap peluang usaha, program ini diharapkan meningkatkan ksejahteraan keluarga serta mewujudkan kemandirian ekonomi Bersama kegiatan pelatihan ini dilaksanakan di Aula Dinas P3AP2KB yang dihadiri oleh kader Kelompok UPPKA dari 11 Kecamatan berjumlah 44 Orang adapun Narasumber pada kegiatan pelatihan ini berasal dari LPK Borneo Insan Kreatif.

Dokumen : Pelatihan Peningkatan Ekonomi Keluarga

Selain pembelajar tentang kerajinan ayaman purun pada kelompok UPPKA juga dilaksanakan pelatihan tata rias sebagai upaya peningkatan keterampilan dan pemberdayaan ekonomi anggota kelompok, kegiatan ini bertujuan untuk membekali peserta dengan pengetahuan dan keterampilan tata rias yang dapat dikembangkan

menjadi peluang usaha mandiri, pelatihanan meliputi pemberian materi tentang pengenalan alat dan kosmetik, teknis tata rias dasar hingga praktek langsung tata rias, peserta dibimbing langsung dengan narasumber yang berpengalaman sehingga mampu memahami Teknik make up secara benar dan adaptif, kegiatan ini dilaksanakan di 11 Kecamatan di Kabupaten Tanah Laut.

Dokumen : Pelatihan Tata Rias / Make UP

g. Edukasi calon pengantin

1) Pelatihan pendampingan calon pengantin

Dalam mendukung percepatan penurunan stunting diperlukan upaya pencegahan sejak hulu, salah satunya melalui pendampingan calon pengantin (CATIN) oleh kader Tim Pendaping Keluarga (TPK) yang memiliki peran strategis dalam memberikan edukasi dan pendampingan kepada calon pengantin agar siap secara Kesehatan, gizi dan psikososial sebelum memasuki kehidupan berkeluarga oleh karena itu dilaksanakan kegiatan pelatihan pendampingan calon pengantin bagi kader Tim Pendamping keluarga melalui zoom metting yang diikuti sebanyak 801 kader Tim Pendamping Keluarga yang terdiri dari Kader KB, Kader PKK Desa dan Bidan/Perawat, dengan tujuan meningkatkan kapasitas kader Tim pendamping Keluarga dalam melakukan

pendapingan calon pengantin dalam meningkatkan Kesehatan dan gizi calon pengantin serta kemampuan dalam melakukan edukasi dan konseling dasar kepada para calon pengantin.

2) Pelaksanaan pendampingan calon pengantin, keluarga beresiko dan balita stunting dilaksanakan sebagai upaya percepatan penurunan stunting dan peningkatan kualitas Kesehatan keluarga, kegiatan ini dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan dengan melibatkan Tim Pendamping Keluarga (TPK), pendampingan keluarga stunting dilakukan melalui kunjungan rumah dan pemantaun rutin, sasaran keluarga berisiko meliputi ibu hamil dengan kekurangan energi kronis, anemia, jarak kehamilan terlalu dekat, dalam pendampingan ini keluarga diberikan edukasi terkait pemenuhan gizi seimbang, perawatan ibu hamil, pola asuh anak, serta penting nya akses layanan Kesehatan dan sanitasi layak

Dokumen : Pelaksanan Kegiatan Tim Pendamping Keluarga

Faktor Pendorong/Keberhasilan

1. Tercapainya capaian program KB di Kabupaten Tanah Laut juga didukung dengan adanya promosi terkait pelayanan KB gratis baik berupa media sosial dan pelayanan

langsung kelapangan pada setiap moment besar seperti peringatan Hari Kartini, Pelayanan KB serentak, Harganas (Hari Keluarga Nasional) dan peringatan besar lainnya, serta inovasi kunjungan layanan KB keliling yang langsung menyasar ke Desa-desa di luar gedung dan pada kegiatan pelayanan KB momentum mendapatkan bingkisan atau sembako bagi para akseptor yang melakukan pemasangan KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang.

Dokumen : Pelayanan KB keliling di Perusahaan

Pelayanan KB Metode Operasi Wanita (MOW) juga dilaksanakan sebagai salah satu upaya pengendalian kelahiran dan peningkatan Kesehatan ibu melalui pengunaan metode kontrasepsi yang permanen, pelayanan ini ditujukan bagi pasangan usia subur yang telah memiliki anak yang cukup dan telah mendapatkan persetujuan serta konseling yang telah memadahi antara pasangan usia subur. Kegiatan pelayanan KB Metode Operasi Wanita (MOW) ini juga mendapatkan dari Ketua PKK yang menijau dan memberikan dukungan langsung kepada para peserta Metode Operasi Wanita (MOW)

Dokumen : Pelayanan KB Metode Operasi Wanita (MOW)

2. Tingginya angka TFR pada tahun 2025 sebesar 2,20 juga merupakan hasil dari capaian KB aktif Tanah Laut yaitu sebesar 75,72%, dimana jenis metode kontrasepsi suntik merupakan jenis KB yang tertinggi (23.602 akseptor), sedangkan untuk metode MKJP yang tertinggi yaitu Implant (3766 akseptor).Dimana pada tahun 2025 dengan tersedianya jenis Implant 1 batang maka minat masyarakat untuk menggunakan KB MKJP semakin meningkat.

KODE	KECAMATAN	JUMLAH PESERTA KB AKTIF	METODE KONTRASEPSI MODERN									METODE KONTRASESI TRADISIONAL
			SUNTIK	PIL	KONDOM	IMPLAN	IUD	VASEKTOMI	TUBEKTOMI	MAL	TOTAL	
1	2	3=12+13	4	5	6	7	8	9	10	11	12=∑(4-11)	13
01	TAKISUNG	4935	2121	2255	54	294	46	5	149	4	4928	7
02	JORONG	4345	2790	907	71	416	48	0	99	3	4334	11
03	PELAIHARI	7666	4298	2232	103	559	216	14	216	2	7640	26
04	KURAU	1999	1242	562	23	139	10	3	19	0	1998	1
05	BATI BATI	5939	2839	2433	48	424	89	0	98	0	5931	8
06	PANYIPATAN	3472	2226	605	71	429	69	2	64	2	3468	4
07	KINTAP	4950	2733	1526	79	364	66	10	144	5	4927	23
08	TAMBANG ULANG	2583	1197	965	52	290	21	0	54	3	2582	1
09	BATU AMPAR	3870	2111	925	91	408	140	6	173	0	3854	16
10	BAJUIN	2867	1179	1007	64	324	157	2	131	0	2864	3
11	BUMI MAKMUR	1797	866	740	19	119	5	2	26	0	1777	20
JUMLAH TOTAL		44423	23602	14157	675	3766	867	44	1173	19	44303	120

3. Target Pembinaan Tenaga Lini Lapangan. Pembinaan Tenaga Lini lapangan telah terlaksana 100%.
4. Terpenuhinya sarana prasarana dan alat obat kontrasepsi (Alokon) termasuk pendistribusiannya ke fasilitas kesehatan di Kabupaten Tanah Laut. Tahun 2025 dilaksanakan pengadaan implant removal kit dan sterilisator sebanyak 20 unit yang dibagikan ke fasilitas kesehatan dan pendistribusian alokon secara rutin ke fasilitas kesehatan untuk menunjang pelayanan KB di Kabupaten Tanah Laut.
5. Penyerahan Bantuan Alat Tepat Guna (ATTG) kepada kelompok UPPKA guna dilaksanakan sebagai bentuk dukungan pemerintah dalam meningkatkan produktivitas dan kemandirian ekonomi keluarga, dengan bantuan Alat Tepat Guna (ATTG) diharapkan kelompok UPPKA mampu meningkatkan pendapatan keluarga, memperkuat ketahanan ekonomi rumah tangga, serta berkontribusi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat umum.

Faktor Penghambat/Kegagalan

1. Terbatasnya Tenaga Penyuluh KB yang ada, seharusnya satu penyuluh KB menangani satu desa namun kondisi saat ini satu penyuluh KB menangani 3 sampai 5 desa.
2. Masih kurangnya kompetensi tenaga Penyuluh KB/PLKB yang ada.
3. Belum dilaksanakan evaluasi terhadap hasil monitoring Pembinaan Tenaga Lini Lapangan**.** Hasil monitoring pembinaan Tenaga Lini lapangan yang telah dilaksanakan oleh para Penyuluh KB/PLKB terhadap para Kader PPKBD dan Sub Kader PPKBD pada Tahun 2025 belum di evaluasi oleh pejabat yang membidangi dari DP3AP2KB Kabupaten Tanah Laut.
4. Masih kurangnya kompetensi tenaga kesehatan sehingga terjadi kegagalan dalam pemasangan implant pada pelayanan KB.
5. Modal yang dimiliiki anggota kelompok relatif terbatas sehingga menghambat pengembangan skala usaha, pembelian bahan baku, serta inovasi produk, serta pengunaan alat teknologi digital (seperti pemasaran online) masih rendah akibat keterbatasan pengetahuan dan pendampingan.

Alternatif Solusi/Rencana Aksi yang Akan Dilakukan

1. Mengajukan usulan penambahan penyuluh KB/PLKB ke Perwakilan Kemendukbangga/BKKKBN Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Mengusulkan peningkatan kompetensi Tenaga Penyuluh KB/PLKB melalui diklat/bimtek, workshop dan lain-lain ke Perwakilan Kemendukbangga/BKKKBN Provinsi Kalimantan Selatan serta instansi lain.
3. **Akan dilaksanakan evaluasi terhadap hasil Monitoring Pembinaan Tenaga Lini Lapangan.** Pelaksanaan Evaluasi terhadap Hasil monitoring pembinaan Tenaga Lini lapangan yang telah dilaksanakan oleh para Penyuluh KB/PLKB terhadap para Kader PPKBD dan Sub Kader PPKBD pada Tahun 2025 akan dilaksanakan pada Bulan Februari 2026 oleh pejabat yang membidangi dari DP3AP2KB Kabupaten Tanah Laut.
4. Melaksanakan koordinasi dengan Dinas Kesehatan maupun instansi terkait lainnya untuk peningkatan kompetensi tenaga kesehatan di bidang pelayanan KB melalui pelatihan CTU.
5. Mendorong akses permodalan melalui bantuan stimuan, dana bergulir, koperasi, maupun Kerjasama dengan lembanga keuangan mikro, kelompok juga diarahakan untuk mengelola tabungan dan kas kelompok secara berkelanjutan, melaksankan pelatihan kewirausahan, manajemen usaha, pengemasan produk, dan pengelolaan keuangan sederhana agar mampu mengelola usaha secara lebih propesional.

Dalam mencapai sasaran Meningkatnya Pangarusutamaan Gender dan Pemenuhan Hak Anak dan Terkendalinya penduduk di dukung oleh Sumber daya manusia yang terdiri dari 46 ASN pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta di dukung oleh 7 Program dengan Pagu Rp. 10.576.406.683,89 dan terealisasi Rp. 9.069.779.185,00 atau sebesar 89,75%.

Tabel 3.1.4
REALISASI PROGRAM PENUNJANG

NO.	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	PAGU	REALISASI
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Meningkatnya Pangarusutamaan Gender dan Pemenuhan Hak Anak	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	1.133.001.532,57	909.952.534,00
		Program Perlindungan Perempuan	202.153.906,00	86.526.040,00
		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	152.806.322,45	129.811.500,00
		Program Perlindungan Khusus Anak	605.714.517,44	413.079.695,00
JUMLAH			**2.093.676.278,46**	**1.539.369.769,00**
2	Terkendalinya Penduduk	Program Pengendalian Penduduk	360,825,043.50	221.660.800
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	5,377,385,327.53	4.916.221.151,00
		Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	2,744,520,034.40	2.392.527.465,00
JUMLAH			**8.482.730.405,43**	**7.530.409.416,00**

Dalam rangka memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian kinerja berdasarkan perbandingan antara sumber daya yang digunakan dengan hasil yang diperoleh. Efisiensi kinerja diukur menggunakan rumus berikut :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^{n}((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^{n}(PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan:

E : Efisiensi

PAKi : Pagu anggaran keluaran i

RAKi : Realisasi anggaran keluaran i

CKi : Capaian keluaran i

1. Indeks Pemberdayaan Gender (Nilai)

$$\text{Efisiensi} = \frac{(1.335.155.438,57 \times 0\%) - 996.478.574,00}{(1.335.155.438,57 \times 0\%)} \times 100\%$$

Efisiensi = 0% (capaian kinerja belum rilis)

Tabel 3.1.5
Efisiensi Indikator 1

Capaian Kinerja	Realisasi Keuangan	Efisiensi
0%	74,63%	0%

2. Nilai Kota/Kabupaten Layak Anak (Nilai)

$$\text{Efisiensi} = \frac{(758.520.839,89 \times 82,81\%) - 542.891.195,00}{(758.520.839,89 \times 82,81\%)} \times 100\%$$

Efisiensi = 13,57%

Tabel 3.1.5
Efisiensi Indikator 2

Capaian Kinerja	Realisasi Keuangan	Efisiensi
82,81%	71,57%	13,57%

3. TFR (Total Fertility Rate) (Angka)

$$\text{Efisiensi} = \frac{(8.482.730.405,43 \text{x } 99,54\%) - 7.530.409.416,00}{(8.482.730.405,43 \text{ x } 99,54\%)} \text{ X } 100\%$$

Efisiensi = 10,82%

Tabel 3.1.5
Efisiensi Indikator 3

Capaian Kinerja	Realisasi Keuangan	Efisiensi
99,54%	88,77%	10,82%

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran yang ditetapkan, APBD Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025 (setelah Perubahan APBD) ditetapkan dengan jumlah anggaran belanja sebesar Rp. 17.903.056.278,56. Realisasi APBD Kabupaten Tanah Laut untuk Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 15.200.158.038,00

TUJUAN I
Tabel 3.6
Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak serta Terwujudnya Keluarga yang Berkualitas

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Program				
						Uraian		Anggaran	Realiasasi	Persentase
								Rp	Rp	%
1	Meningkatnya Pangarusutamaan Gender dan Pemenuhan Hak Anak	1	Indeks Pemberdayaan Gender (Nilai)	77,13	-	1	Program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	1.133.001.532,57	909.952.534,00	80,31
						2	Program Perlindungan Perempuan	202.153.906,00	86.526.040,00	42,80
		2	Nilai Kota/Kabupaten Layak Anak (Nilai)	600	501	3	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	152.806.322,45	129.811.500,00	84,95
						4	Program Perlindungan Khusus Anak	605.714.517,44	413.079.695,00	68,20
2	Terkendalinya Penduduk	1	TFR (Total Fertility Rate) (Angka)	2,19	2,20	5	Program Pengendalian Penduduk	360.825.043,50	221.660.800,00	61,43
						6	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	5.377.385.327,53	4.916.221.151,00	91,42
						7	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	2.744.520.034,40	2.392.527.465,00	87,17

Tabel 3.12

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5 = (4 / 3) * 100*	*6*
5	**BELANJA DAERAH**	**17.903.056.278,56**	**15.200.158.038,00**	**84,90**	**14.850.922.498,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**16.935.916.675,38**	**14.271.055.038,00**	**84,27**	**14.017.972.498,00**
5.1.01	Belanja Pegawai	5.437.306.584,00	4.492.412.443,00	82,62	4.330.395.698,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.765.306.580,00	2.299.829.664,00	83,17	2.243.689.688,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.834.853.474,00	1.633.324.998,00	89,02	1.580.329.714,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.699.999.994,00	1.514.945.950,00	89,11	1.551.741.714,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	134.853.480,00	118.379.048,00	87,78	28.588.000,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	123.000.002,00	92.106.950,00	74,88	94.096.992,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	105.000.000,00	84.109.664,00	80,10	90.895.136,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	18.000.002,00	7.997.286,00	44,43	3.201.856,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	105.000.000,00	92.930.000,00	88,50	66.165.000,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	105.000.000,00	92.930.000,00	88,50	66.165.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	68.040.006,00	22.490.000,00	33,05	50.160.000,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	50.000.006,00	17.480.000,00	34,96	46.920.000,00
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	18.040.000,00	5.010.000,00	27,77	3.240.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	53.999.994,00	51.475.833,00	95,33	44.995.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	47.999.994,00	46.480.000,00	96,83	44.815.000,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	6.000.000,00	4.995.833,00	83,26	180.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	77.326.398,00	62.842.455,00	81,27	58.587.780,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	64.999.998,00	56.034.975,00	86,21	56.922.120,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	12.326.400,00	6.807.480,00	55,23	1.665.660,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	309.662.406,00	209.887.454,00	67,78	218.892.327,00

5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	303.162.406,00	209.887.454,00	69,23	218.892.327,00
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	28.004,00	21.851,00	78,03	21.010,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	23.996,00	18.549,00	77,30	20.465,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	4.008,00	3.302,00	82,39	545,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	166.800.000,00	121.175.978,00	72,65	117.402.972,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	153.000.000,00	111.935.714,00	73,16	115.172.739,00
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	13.800.000,00	9.240.264,00	66,96	2.230.233,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	4.896.333,00	3.393.529,00	69,31	3.259.716,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	4.500.000,00	3.125.995,00	69,47	3.197.967,00
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	396.333,00	267.534,00	67,50	61.749,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	13.150.000,00	10.180.616,00	77,42	9.779.177,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	12.100.000,00	9.378.032,00	77,50	9.593.930,00
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	1.050.000,00	802.584,00	76,44	185.247,00
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	8.549.963,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	8.549.963,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.672.000.004,00	2.192.582.779,00	82,06	2.086.706.010,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	2.172.000.000,00	1.809.505.946,00	83,31	1.706.412.170,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.981.000.000,00	1.699.636.154,00	85,80	1.679.809.007,00
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	191.000.000,00	109.869.792,00	57,52	26.603.163,00

5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	500.000.004,00	383.076.833,00	76,62	380.293.840,00
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	500.000.004,00	383.076.833,00	76,62	380.293.840,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.498.610.091,38	9.778.642.595,00	85,04	9.687.576.800,00
5.1.02.01	Belanja Barang	2.509.674.435,38	2.180.829.680,00	86,90	1.827.975.636,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.509.674.435,38	2.180.829.680,00	86,90	1.827.975.636,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	8.100.000,00	3.500.000,00	43,21	3.500.000,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	33.950.659,61	30.075.000,00	88,58	2.634.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	343.721.890,59	246.119.865,00	71,60	274.234.988,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	29.129.225,35	24.545.660,00	84,26	22.866.790,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	2.633.000,00	2.600.000,00	98,75	1.600.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	29.192.833,50	24.351.000,00	83,41	16.703.408,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	22.466.550,85	17.892.150,00	79,64	12.721.500,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	5.412.688,00	5.139.400,00	94,95	3.062.100,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00	0,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	178.679.933,93	161.360.600,00	90,31	103.840.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	0,00	0,00	0,00	4.279.200,00
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	79.545.375,00	0,00	0,00	1.535.000,00

5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	465.993.583,45	442.618.003,00	94,98	386.425.250,00
5.1.02.01.01.0040	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	139.769.505,10	126.144.002,00	90,25	3.846.400,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	0,00	0,00	0,00	54.000.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	235.140.000,00	225.870.000,00	96,06	201.075.000,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	44.600.000,00	33.060.000,00	74,13	12.190.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	778.885.000,00	734.650.000,00	94,32	691.292.000,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	23.920.500,00	21.450.000,00	89,67	15.370.000,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	46.513.440,00	41.904.000,00	90,09	0,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	29.581.500,00	28.225.000,00	95,41	16.800.000,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	11.238.750,00	10.125.000,00	90,09	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	4.670.323.656,00	3.734.136.241,00	79,95	5.081.298.229,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	4.366.194.000,00	3.516.789.561,00	80,55	4.774.054.929,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	406.544.000,00	338.300.000,00	83,21	277.720.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	210.055.000,00	114.380.000,00	54,45	2.221.056.900,00
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	877.500.000,00	787.800.000,00	89,78	476.700.000,00
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	500.000,00	500.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	301.155.000,00	286.955.085,00	95,28	200.739.931,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	504.000.000,00	418.000.000,00	82,94	240.000.000,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	360.000.000,00	343.200.000,00	95,33	0,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1.363.840.000,00	1.005.380.000,00	73,72	981.201.200,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	4.900.000,00	3.350.000,00	68,37	26.700.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	0,00	0,00	0,00	78.978.000,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	0,00	0,00	0,00	48.000.000,00

5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	11.750.000,00	11.750.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	85.950.000,00	68.000.000,00	79,12	30.950.000,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	0,00	0,00	0,00	3.100.000,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	18.000.000,00	16.106.800,00	89,48	7.367.400,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	156.000.000,00	71.743.276,00	45,99	129.106.970,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	66.000.000,00	51.324.400,00	77,76	50.034.528,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	41.310.456,00	31.312.626,00	75,80	23.874.900,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	36.960.000,00	29.228.226,00	79,08	22.060.500,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1.933.536,00	926.398,00	47,91	890.388,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	2.416.920,00	1.158.002,00	47,91	924.012,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	114.149.200,00	70.554.200,00	61,81	12.256.900,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	10.600.000,00	10.600.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	10.749.200,00	10.749.200,00	100,00	4.281.900,00
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	22.100.000,00	15.005.000,00	67,90	3.095.000,00
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	35.000.000,00	5.000.000,00	14,29	0,00
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	32.300.000,00	25.800.000,00	79,88	4.880.000,00
5.1.02.02.04.0195	Belanja Sewa Sumber Tenaga	3.400.000,00	3.400.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	120.670.000,00	94.479.854,00	78,30	42.057.000,00
5.1.02.02.05.0025	Belanja Sewa Bangunan Terbuka	8.540.000,00	8.540.000,00	100,00	2.857.000,00
5.1.02.02.05.0030	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	4.250.000,00	2.800.000,00	65,88	0,00

5.1.02.02.05.0037	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	43.700.000,00	26.650.000,00	60,98	39.200.000,00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	64.180.000,00	56.489.854,00	88,02	0,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	28.000.000,00	21.000.000,00	75,00	229.054.500,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	0,00	0,00	0,00	219.645.000,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	28.000.000,00	21.000.000,00	75,00	9.409.500,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	305.750.000,00	286.765.500,00	93,79	179.040.658,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	280.750.000,00	264.160.500,00	94,09	147.213.658,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	37.500.000,00	36.813.400,00	98,17	34.464.761,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	210.000.000,00	201.554.100,00	95,98	102.748.897,00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	12.000.000,00	8.943.000,00	74,53	0,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	9.000.000,00	6.000.000,00	66,67	6.000.000,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	7.000.000,00	5.600.000,00	80,00	2.500.000,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	5.250.000,00	5.250.000,00	100,00	1.500.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	25.000.000,00	22.605.000,00	90,42	31.827.000,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	25.000.000,00	22.605.000,00	90,42	26.827.000,00

5.1.02.03.03.0032	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	3.840.312.000,00	3.417.361.174,00	88,99	2.480.362.277,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.840.312.000,00	3.417.361.174,00	88,99	2.480.362.277,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	602.112.000,00	515.516.174,00	85,62	485.242.277,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.238.200.000,00	2.901.845.000,00	89,61	1.995.120.000,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	172.550.000,00	159.550.000,00	92,47	118.900.000,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	172.550.000,00	159.550.000,00	92,47	118.900.000,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	155.000.000,00	142.000.000,00	91,61	108.250.000,00
5.1.02.05.01.0004	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	17.550.000,00	17.550.000,00	100,00	10.650.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	**16.935.916.675,38**	**14.271.055.038,00**	**84,27**	**14.017.972.498,00**
5.2	**BELANJA MODAL**	**967.139.603,18**	**929.103.000,00**	**96,07**	**832.950.000,00**
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	602.482.321,74	572.499.000,00	95,02	820.275.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	66.561.385,00	59.210.000,00	88,96	117.785.000,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	15.501.416,00	13.700.000,00	88,38	53.237.000,00
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	15.501.416,00	13.700.000,00	88,38	12.719.000,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	0,00	0,00	0,00	40.518.000,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	51.059.969,00	45.510.000,00	89,13	64.548.000,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	0,00	0,00	0,00	12.798.000,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	24.419.969,00	21.510.000,00	88,08	5.500.000,00
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	0,00	0,00	0,00	650.000,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	26.640.000,00	24.000.000,00	90,09	45.600.000,00

5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	34.798.500,00	31.150.000,00	89,52	14.300.000,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	34.798.500,00	31.150.000,00	89,52	14.300.000,00
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	16.650.000,00	14.900.000,00	89,49	0,00
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	18.148.500,00	16.250.000,00	89,54	14.300.000,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	364.203.210,00	355.104.000,00	97,50	0,00
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	364.203.210,00	355.104.000,00	97,50	0,00
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	79.588.110,00	75.594.000,00	94,98	0,00
5.2.02.07.01.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	284.615.100,00	279.510.000,00	98,21	0,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	131.917.683,74	122.535.000,00	92,89	82.210.000,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	118.597.683,74	110.503.000,00	93,17	70.850.000,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	118.597.683,74	110.503.000,00	93,17	70.850.000,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	13.320.000,00	12.032.000,00	90,33	11.360.000,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	13.320.000,00	12.032.000,00	90,33	11.360.000,00
5.2.02.16	Belanja Modal Alat Peraga	0,00	0,00	0,00	605.980.000,00
5.2.02.16.01	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	0,00	0,00	0,00	605.980.000,00
5.2.02.16.01.0003	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya	0,00	0,00	0,00	605.980.000,00
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	5.001.543,00	4.500.000,00	89,97	0,00
5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	5.001.543,00	4.500.000,00	89,97	0,00
5.2.02.19.01.0002	Belanja Modal Peralatan Permainan	5.001.543,00	4.500.000,00	89,97	0,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	364.657.281,44	356.604.000,00	97,79	12.675.000,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	139.019.996,00	136.500.000,00	98,19	0,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	139.019.996,00	136.500.000,00	98,19	0,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	55.500.000,00	54.168.000,00	97,60	0,00

5.2.03.01.01.0033	Belanja Modal Bangunan Parkir	83.519.996,00	82.332.000,00	98,58	0,00
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	225.637.285,44	220.104.000,00	97,55	12.675.000,00
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	225.637.285,44	220.104.000,00	97,55	12.675.000,00
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	225.637.285,44	220.104.000,00	97,55	12.675.000,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	**967.139.603,18**	**929.103.000,00**	**96,07**	**832.950.000,00**
	JUMLAH BELANJA	**17.903.056.278,56**	**15.200.158.038,00**	**84,90**	**14.850.922.498,00**
	SURPLUS/DEFISIT	**(17.903.056.278,56)**	**(15.200.158.038,00)**	**84,90**	**(14.850.922.498,00)**

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut

Tabel 3.13
Perbandingan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	REALISASI 2024	% Kenaikan Penurunan
1	*2*	*3*	*4*	*6*	*7*
5	**BELANJA DAERAH**	**17.903.056.278,56**	**15.200.158.038,00**	**14.850.922.498,00**	**1,02**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**16.935.916.675,38**	**14.271.055.038,00**	**14.017.972.498,00**	**1,02**
5.1.01	Belanja Pegawai	5.437.306.584,00	4.492.412.443,00	4.330.395.698,00	1,04
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.765.306.580,00	2.299.829.664,00	2.243.689.688,00	1,03
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.834.853.474,00	1.633.324.998,00	1.580.329.714,00	1,03
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.699.999.994,00	1.514.945.950,00	1.551.741.714,00	0,98
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	134.853.480,00	118.379.048,00	28.588.000,00	4,14
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	123.000.002,00	92.106.950,00	94.096.992,00	0,98
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	105.000.000,00	84.109.664,00	90.895.136,00	0,93
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	18.000.002,00	7.997.286,00	3.201.856,00	2,50
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	105.000.000,00	92.930.000,00	66.165.000,00	1,40
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	105.000.000,00	92.930.000,00	66.165.000,00	1,40
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	68.040.006,00	22.490.000,00	50.160.000,00	0,45
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	50.000.006,00	17.480.000,00	46.920.000,00	0,37
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	18.040.000,00	5.010.000,00	3.240.000,00	1,55
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	53.999.994,00	51.475.833,00	44.995.000,00	1,14
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	47.999.994,00	46.480.000,00	44.815.000,00	1,04
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	6.000.000,00	4.995.833,00	180.000,00	27,75
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	77.326.398,00	62.842.455,00	58.587.780,00	1,07
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	64.999.998,00	56.034.975,00	56.922.120,00	0,98
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	12.326.400,00	6.807.480,00	1.665.660,00	4,09

5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	309.662.406,00	209.887.454,00	218.892.327,00	0,96
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	303.162.406,00	209.887.454,00	218.892.327,00	0,96
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	6.500.000,00	0,00	0,00	-
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	28.004,00	21.851,00	21.010,00	1,04
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	23.996,00	18.549,00	20.465,00	0,91
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	4.008,00	3.302,00	545,00	6,06
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	166.800.000,00	121.175.978,00	117.402.972,00	1,03
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	153.000.000,00	111.935.714,00	115.172.739,00	0,97
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	13.800.000,00	9.240.264,00	2.230.233,00	4,14
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	4.896.333,00	3.393.529,00	3.259.716,00	1,04
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	4.500.000,00	3.125.995,00	3.197.967,00	0,98
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	396.333,00	267.534,00	61.749,00	4,33
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	13.150.000,00	10.180.616,00	9.779.177,00	1,04
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	12.100.000,00	9.378.032,00	9.593.930,00	0,98
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	1.050.000,00	802.584,00	185.247,00	4,33
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	8.549.963,00	0,00	0,00	-
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	8.549.963,00	0,00	0,00	-
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.672.000.004,00	2.192.582.779,00	2.086.706.010,00	1,05
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	2.172.000.000,00	1.809.505.946,00	1.706.412.170,00	1,06
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.981.000.000,00	1.699.636.154,00	1.679.809.007,00	1,01

5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	191.000.000,00	109.869.792,00	26.603.163,00	4,13
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	500.000.004,00	383.076.833,00	380.293.840,00	1,01
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	500.000.004,00	383.076.833,00	380.293.840,00	1,01
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.498.610.091,38	9.778.642.595,00	9.687.576.800,00	1,01
5.1.02.01	Belanja Barang	2.509.674.435,38	2.180.829.680,00	1.827.975.636,00	1,19
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.509.674.435,38	2.180.829.680,00	1.827.975.636,00	1,19
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	8.100.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	1,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	33.950.659,61	30.075.000,00	2.634.000,00	11,42
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	343.721.890,59	246.119.865,00	274.234.988,00	0,90
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	29.129.225,35	24.545.660,00	22.866.790,00	1,07
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	2.633.000,00	2.600.000,00	1.600.000,00	1,63
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	29.192.833,50	24.351.000,00	16.703.408,00	1,46
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	22.466.550,85	17.892.150,00	12.721.500,00	1,41
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	5.412.688,00	5.139.400,00	3.062.100,00	1,68
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	-
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	178.679.933,93	161.360.600,00	103.840.000,00	1,55
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	0,00	0,00	4.279.200,00	0,00
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	79.545.375,00	0,00	1.535.000,00	0,00

5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	465.993.583,45	442.618.003,00	386.425.250,00	1,15
5.1.02.01.01.0040	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	139.769.505,10	126.144.002,00	3.846.400,00	32,80
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	0,00	0,00	54.000.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	235.140.000,00	225.870.000,00	201.075.000,00	1,12
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	44.600.000,00	33.060.000,00	12.190.000,00	2,71
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	778.885.000,00	734.650.000,00	691.292.000,00	1,06
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	23.920.500,00	21.450.000,00	15.370.000,00	1,40
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	46.513.440,00	41.904.000,00	0,00	
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	29.581.500,00	28.225.000,00	16.800.000,00	1,68
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	11.238.750,00	10.125.000,00	0,00	-
5.1.02.02	Belanja Jasa	4.670.323.656,00	3.734.136.241,00	5.081.298.229,00	0,73
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	4.366.194.000,00	3.516.789.561,00	4.774.054.929,00	0,74
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	406.544.000,00	338.300.000,00	277.720.000,00	1,22
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	210.055.000,00	114.380.000,00	2.221.056.900,00	0,05
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	877.500.000,00	787.800.000,00	476.700.000,00	1,65
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	500.000,00	500.000,00	0,00	-
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	301.155.000,00	286.955.085,00	200.739.931,00	1,43
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	504.000.000,00	418.000.000,00	240.000.000,00	1,74
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	360.000.000,00	343.200.000,00	0,00	-
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1.363.840.000,00	1.005.380.000,00	981.201.200,00	1,02
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	4.900.000,00	3.350.000,00	26.700.000,00	0,13
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	0,00	0,00	78.978.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	0,00	0,00	48.000.000,00	0,00

5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	11.750.000,00	11.750.000,00	0,00	-
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	85.950.000,00	68.000.000,00	30.950.000,00	2,20
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	0,00	0,00	3.100.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	18.000.000,00	16.106.800,00	7.367.400,00	2,19
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	156.000.000,00	71.743.276,00	129.106.970,00	0,56
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	66.000.000,00	51.324.400,00	50.034.528,00	1,03
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	41.310.456,00	31.312.626,00	23.874.900,00	1,31
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	36.960.000,00	29.228.226,00	22.060.500,00	1,32
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1.933.536,00	926.398,00	890.388,00	1,04
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	2.416.920,00	1.158.002,00	924.012,00	1,25
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	114.149.200,00	70.554.200,00	12.256.900,00	5,76
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	10.600.000,00	10.600.000,00	0,00	-
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	10.749.200,00	10.749.200,00	4.281.900,00	2,51
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	22.100.000,00	15.005.000,00	3.095.000,00	4,85
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	35.000.000,00	5.000.000,00	0,00	-
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	32.300.000,00	25.800.000,00	4.880.000,00	5,29
5.1.02.02.04.0195	Belanja Sewa Sumber Tenaga	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	120.670.000,00	94.479.854,00	42.057.000,00	2,25
5.1.02.02.05.0025	Belanja Sewa Bangunan Terbuka	8.540.000,00	8.540.000,00	2.857.000,00	2,99
5.1.02.02.05.0030	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	4.250.000,00	2.800.000,00	0,00	-

5.1.02.02.05.0037	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	43.700.000,00	26.650.000,00	39.200.000,00	0,68
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	64.180.000,00	56.489.854,00	0,00	-
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	28.000.000,00	21.000.000,00	229.054.500,00	0,09
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	0,00	0,00	219.645.000,00	0,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	28.000.000,00	21.000.000,00	9.409.500,00	2,23
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	305.750.000,00	286.765.500,00	179.040.658,00	1,60
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	280.750.000,00	264.160.500,00	147.213.658,00	1,79
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	37.500.000,00	36.813.400,00	34.464.761,00	1,07
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	210.000.000,00	201.554.100,00	102.748.897,00	1,96
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	12.000.000,00	8.943.000,00	0,00	-
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	9.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	1,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	7.000.000,00	5.600.000,00	2.500.000,00	2,24
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	5.250.000,00	5.250.000,00	1.500.000,00	3,50
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	25.000.000,00	22.605.000,00	31.827.000,00	0,71
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	25.000.000,00	22.605.000,00	26.827.000,00	0,84

5.1.02.03.03.0032	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	3.840.312.000,00	3.417.361.174,00	2.480.362.277,00	1,38
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.840.312.000,00	3.417.361.174,00	2.480.362.277,00	1,38
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	602.112.000,00	515.516.174,00	485.242.277,00	1,06
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.238.200.000,00	2.901.845.000,00	1.995.120.000,00	1,45
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	172.550.000,00	159.550.000,00	118.900.000,00	1,34
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	172.550.000,00	159.550.000,00	118.900.000,00	1,34
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	155.000.000,00	142.000.000,00	108.250.000,00	1,31
5.1.02.05.01.0004	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	17.550.000,00	17.550.000,00	10.650.000,00	1,65
	JUMLAH BELANJA OPERASI	**16.935.916.675,38**	**14.271.055.038,00**	**14.017.972.498,00**	**1,02**
5.2	**BELANJA MODAL**	**967.139.603,18**	**929.103.000,00**	**832.950.000,00**	**1,12**
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	602.482.321,74	572.499.000,00	820.275.000,00	0,70
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	66.561.385,00	59.210.000,00	117.785.000,00	0,50
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	15.501.416,00	13.700.000,00	53.237.000,00	0,26
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	15.501.416,00	13.700.000,00	12.719.000,00	1,08
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	0,00	0,00	40.518.000,00	0,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	51.059.969,00	45.510.000,00	64.548.000,00	0,71
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	0,00	0,00	12.798.000,00	0,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	24.419.969,00	21.510.000,00	5.500.000,00	3,91
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	0,00	0,00	650.000,00	0,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	26.640.000,00	24.000.000,00	45.600.000,00	0,53

5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	34.798.500,00	31.150.000,00	14.300.000,00	2,18
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	34.798.500,00	31.150.000,00	14.300.000,00	2,18
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	16.650.000,00	14.900.000,00	0,00	-
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	18.148.500,00	16.250.000,00	14.300.000,00	1,14
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	364.203.210,00	355.104.000,00	0,00	-
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	364.203.210,00	355.104.000,00	0,00	-
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	79.588.110,00	75.594.000,00	0,00	-
5.2.02.07.01.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	284.615.100,00	279.510.000,00	0,00	-
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	131.917.683,74	122.535.000,00	82.210.000,00	1,49
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	118.597.683,74	110.503.000,00	70.850.000,00	1,56
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	118.597.683,74	110.503.000,00	70.850.000,00	1,56
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	13.320.000,00	12.032.000,00	11.360.000,00	1,06
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	13.320.000,00	12.032.000,00	11.360.000,00	1,06
5.2.02.16	Belanja Modal Alat Peraga	0,00	0,00	605.980.000,00	0,00
5.2.02.16.01	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	0,00	0,00	605.980.000,00	0,00
5.2.02.16.01.0003	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya	0,00	0,00	605.980.000,00	0,00
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	5.001.543,00	4.500.000,00	0,00	-
5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	5.001.543,00	4.500.000,00	0,00	-
5.2.02.19.01.0002	Belanja Modal Peralatan Permainan	5.001.543,00	4.500.000,00	0,00	-
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	364.657.281,44	356.604.000,00	12.675.000,00	28,13
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	139.019.996,00	136.500.000,00	0,00	-
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	139.019.996,00	136.500.000,00	0,00	-
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	55.500.000,00	54.168.000,00	0,00	-

5.2.03.01.01.0033	Belanja Modal Bangunan Parkir	83.519.996,00	82.332.000,00	0,00	-
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	225.637.285,44	220.104.000,00	12.675.000,00	17,37
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	225.637.285,44	220.104.000,00	12.675.000,00	17,37
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	225.637.285,44	220.104.000,00	12.675.000,00	17,37
	JUMLAH BELANJA MODAL	**967.139.603,18**	**929.103.000,00**	**832.950.000,00**	**1,12**
	JUMLAH BELANJA	**17.903.056.278,56**	**15.200.158.038,00**	**14.850.922.498,00**	**1,02**
	SURPLUS/DEFISIT	**(17.903.056.278,56)**	**(15.200.158.038,00)**	**(14.850.922.498,00)**	**1,02**

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025 merupakan laporan pertanggungjawaban tahun pertama terhadap Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2029 sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 64 Tahun 2025.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian terhadap **2 Sasaran 3 Indikator Kinerja Utama** yang sudah diuraikan dalam Bab III Akuntabilitas Kinerja dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja seluruh indikator adalah 91,18% dengan tingkat capaian kinerja berkategori **Tinggi** dengan rentang capaian lebih dari 90%.

B. Strategi Peningkatan Kinerja

Upaya-upaya yang akan dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam rangka peningkatan kinerja sebagai berikut:

1. Memperkuat budaya organisasi yang mengacu pada nilai-nilai *good corporate governance* (tata kelola organisasi yang baik) dan berorientasi pada *outcome;*
2. Memastikan bahwa alokasi anggaran belanja mendukung pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan selama 5 Tahun kedepan sesuai dengan Visi Misi Bupati terpilih 2025-2029.
3. Melaksanakan monev kinerja pertriwulan melalui Aplikasi E-SAKIP sebagai bahan penentuan target indikator kinerja pada periode yang akan datang
4. Mengingkatkan fungsi pengawasan keahlian profesional, baik mengikuti diklat, bimtek, kaji tiru termasuk mengikuti perkembangan terbaru di bidang manajemen pemerintahan dan auditing, dan diharapkan dapat memberikan sumbangan yang berarti untuk menyelesaikan temuan dan perbaikan kinerja instansi pemerintah terhadap kinerja yang dihasilkan.

5. Meningkatkan penyajian informasi pelaporan kinerja SKPD yang menggambarkan pencapaian kinerja, efektivitas program dan efisiensi anggaran;
6. Membuat terobosan/inovasi yang dapat mempercepat pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Laut.
7. Evaluasi kinerja dilakukan setelah pencapaian target kinerja yang ditentukan dan hasil dijadikan umpan balik. Dari hasil evaluasi kinerja akan mendapatkan penilaian kinerja serta rekomendasi-rekomendasi supaya menjadi bahan pertimbangan perbaikan kinerja. Dalam tahap evaluasi, melibatkan berbagai pihak agar penilaian dapat obyektif.

Pelaihari, Februari 2026

Kepala Dinas,

MARIA ULFAH, S,Psi, M.M
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP.197911132005012008

LAMPIRAN

DAFTAR CAPAIAN KINERJA SELURUH PEJABAT STRUKTURAL
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2025		
			Target	Realisasi	Capaian
1	**Kepala Dinas**				
	Meningkatnya Pengarustamaan Gender dan Pemenuhan Hak Anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	77,13	Belum rilis	-
		Nilai Kota/Kab Layak Anak (KLA)	605	501	83%
	Terkendalinya Penduduk	Total Fertility Rate (TFR)	2,14	2,2	103%
2	**Sekretaris**				
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangat Daerah	82	82,25	100,30%
	Meningkatnya Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	90,00	90,00	100%
3	**Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**				
	Meningkatnya perempuan produktif	Persentase Perempuan yang Produktif secara Ekonomi	7%	89,62%	1280%
	Meningkatnya Penyelesaian Kasus Kekerasan pada Perempuan	Persentase penyelesaian kasus kekerasan pada perempuan	65%	134%	206%
	Meningkatnya peran forum anak dalam perlindungan anak	Persentase forum anak yang aktif berkontribusi dalam perlindungan	90%	100%	111%
	Meningkatnya Perlindungan Anak	Persentase penyelesaian kasus kekerasan pada anak	60%	82%	137%
4	**Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Data dan Informasi**				
	Meningkatnya Kualitas Informasi Data Keluarga	Persentase Informasi Data Keluarga yang Valid	75%	75%	100%
	Meningkatan pengetahuan program bangga kencana	Jumlah Keluarga/Masyarakat yang teredukasi program bangga kencana	52,700	72,08	137%
5	**Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera**				
	Meningkatnya Kepersertaan Keluarga Berencana	Persentase Cakupan KB Aktif	77,2	75,80	98%
	Meningkatnya Ketahanan dan Keluarga Sejahtera	Persentase Keluarga yang diintervensi Poktan Meningkat Kualitasnya	70	75	107%
		Jumlah Calon Pengantin yang Terpenuhi Syarat Pranikah	2718	1017	37%
6	**Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan**				
	Meningkatnya Ketaatan Penyusunan Dokumen	Persentase Dokumen Perencanaan yang tersusun tepat waktu	100%	100%	100%
	Meningkatnya layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Keuangan PD	100%	100%	100%
	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	6	100%
	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6	5	83%
	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30	30	100%
	Terlaksananya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5	5	100%
7	**Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**				
	Meningkatnya Kualitas Layanan Perkantoran	Persentase layanan Perkantoran sesuai SOP	100%	100%	100%
	Meningkatnya kualitas layanan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang terlayani kepegawaiannya dengan baik	100%	100%	100%
	Meningkatnya Kualitas sarana dan prasarana penunjang kinerja Perangkat Daerah	Persentase aset dalam kondisi baik	100%	100%	100%

Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	30	30	100%
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4	3	75%
Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	100%
Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9	9	100%
Terlaksananya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	1	100%
Terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3	3	100%
Terlaksananya Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3	3	100%
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	100%
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12	12	100%
Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	100%
Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	100%
Terlaksananya Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4	4	100%
Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	1	100%
Terlakasannya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	1	100%
Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	1	100%
Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15	15	100%
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	51	39	76%
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	100%

Kepala Dinas P3AP2KB Kabupaten Tanah Laut,

MARIA ULFAH, S.Psi, M.M
NIP. 197911132005012008

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Jalan. A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari 70814
Website : https://dp3ap2kb.tanahlautkab.go.id Email : dinasp3ap2kbtanahlaut@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MARIA ULFAH, S.PSI., MM

Jabatan : Kepala Dinas

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : H. RAHMAT TRIANTO

Jabatan : Bupati

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menegah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

TANAH LAUT, 2 September 2025

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
H. RAHMAT TRIANTO	MARIA ULFAH, S.PSI., MM NIP 199711132005012008

Didownload dari Simpun KABUPATEN TANAH LAUT

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
TANAH LAUT

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	SASARAN		
1	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dan Pemenuhan Hak Anak	Indeks Pemberdayaan Gender	77,13 Angka
		Nilai Kota/Kab Layak Anak	605 Nilai
2	Terkendalinya Penduduk	TFR (Total Fertility Rate)	2,19 Angka

	Program	Anggaran
1	Program Pengendalian Penduduk	360.825.044
2	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	5.377.385.327
3	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	2.744.520.034
4	Program Perlindungan Khusus Anak	605.714.517
5	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	1.133.001.532
6	Program Perlindungan Perempuan	202.153.906
7	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	152.806.322
8	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.326.649.593

TANAH LAUT, 2 September 2025

Bupati TANAH LAUT

H. RAHMAT TRIANTO

Kepala Dinas

MARIA ULFAH, S.PSI., MM
NIP 199711132005012008

Didownload dari Simpun KABUPATEN TANAH LAUT

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Jalan. A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari 70814
Website : https://dp3ap2kb.tanahlautkab.go.id Email : dinasp3ap2kbtanahlaut@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : HJ. SITI ZURAIDA, SKM, M.AP

Jabatan : Sekretaris

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : MARIA ULFAH, S.Psi., MM

Jabatan : Kepala Dinas

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menegah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanah Laut, 2 September 2025

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
MARIA ULFAH, S.Psi., MM	HJ. SITI ZURAIDA, SKM, M.AP
NIP. 199711132005012008	NIP 196710201990122001

Didownload dari Simpun KABUPATEN TANAH LAUT

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
TANAH LAUT

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Layanan Internal dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota)	Persentase Kepuasan Pegawai pada Layanan Internal Perangkat Daerah	100
	Meningkatnya Kualitas Layanan Internal dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82

No	Program	Anggaran
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.326.649.593

Tanah Laut, 2 September 2025

Kepala Dinas,

MARIA ULFAH, S.Psi., MM
NIP. 199711132005012008

Sekretaris,

HJ. SITI ZURAIDA, SKM, M.AP
NIP. 196710201990122001

Didownload dari Simpun KABUPATEN TANAH LAUT

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Jalan. A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari 70814
Website : https://dp3ap2kb.tanahlautkab.go.id Email : dinasp3ap2kbtanahlaut@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Iba Nurkasihani, S.H, M.H.

Jabatan : Kepala Bidang PPPA

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Maria Ulfah, S.Psi., MM

Jabatan : Kepala Dinas

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menegah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanah Laut, 2 September 2025

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
MARIA ULFAH, S.Psi., MM	IBA NURKASIHANI, S.H, M.H.
NIP.199711132005012008	NIP. 198005272009032006

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
TANAH LAUT

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Perempuan Produktif (PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN)	Persentase Perempuan yang Produktif secara Ekonomi	9%
2	Meningkatnya Penyelesaian Kasus Kekerasan pada Perempuan (PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN)	Persentase penyelesaian kasus kekerasan pada perempuan	70 %
		Penanganan Kasus Kekerasan pada Perempuan	18 Orang
3	- (PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA)	Angka Perkawinan Anak	2,95
4	- (PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA))	Persentase Forum Anak yang Aktif Berkontribusi dalam Perlindungan	90 %
5	Meningkatnya Perlindungan Anak (PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK)	Persentase Penyelesaian Kasus Kekerasan pada Anak	65 %
		Penanganan Kasus Kekerasan pada Anak	43 Anak
6	- (Pelembagaan	Persentase SKPD yang	100 Persen

Didownload dari Simpun KABUPATEN TANAH LAUT

	Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota)	melaksanakan PPRG	
	Meningkatnya Peran Organisasi Perempuan dalam Perlindungan Kekerasan	Jumlah organisasi perempuan yang berperan aktif dalam pemberdayaan ekonomi	100 Organisasi
7	Meningkatnya Pengembangan Keterampilan Perempuan (Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota)	Peningkatan pembinaan pada kelompok industri rumahan	0 kelompok
8	Meningkatnya Penanangan Kasus Kekerasan pada Perempuan di UPTD PPA (Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota)	Persentase Perangkat Daerah yang berpartipasi dalam pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan	90 Persen
9	Peningkatan Kapasitas Pendamping (Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota)	Persentase Capaian Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen
10	Meningkatnya Desa Ramah Perempuan Peduli Anak	Jumlah peserta dari kecamatan yang berpartisipasi pada Jambore	0 Kecamatan

	(Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota)	FAD	
11	- (Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota)	Persentase Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen
12	Meningkatnya Penanganan Kasus Anak (Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota)	Persentase Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Persen
13	Telaksananya Puspaga (Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen
14	Bimbingan Teknik (Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota)	Jumlah SDM yangmemperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG	50 Orang
15	Terlaksananya Pelatihan kepada Anggota Organisasi Perempuan	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan	980 Orang

	(Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota)	Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	
16	Pengusulan Desa Ramah Perempuan Peduli Anak (Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Dokumen
17	Bantuan Hukum pada Perempuan Korban Kekerasan (Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota)	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	45 Perangakat Daerah
18	Tersalurkan Bantuan Alat Usaha (Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota)	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik	16 Orang
19	Terlaksananya Forum Anak (Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen

Didownload dari Simpun KABUPATEN TANAH LAUT

	Kabupaten/Kota)		
20	Bantuan Hukum pada Anak (Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA)	Jumlah kegiatan pencegahan KtA terpadu	32 Kegiatan
21	Konseling Kasus Anak (Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota)	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	50 Orang

	Kegiatan Sub Kegiatan Program	Anggaran
	Kegiatan	
1	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	90.417.689
2	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1.042.583.843
3	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	60.161.036
4	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	141.992.870
5	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan	152.806.322

	Kabupaten/Kota	
6	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	393.659.671
7	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	212.054.846
	Sub Kegiatan	
8	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	53.029.616
9	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	37.388.073
10	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1.042.583.843
11	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	53.403.016
12	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	6.758.020
13	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	141.992.870
14	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	152.806.322
15	Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA	393.659.671
16	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak	212.054.846

	yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
	Program	
17	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	1.133.001.532
18	Program Perlindungan Perempuan	202.153.906
19	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	152.806.322
20	Program Perlindungan Khusus Anak	605.714.517

Tanah Laut, 2 September 2025

Kepala Dinas,

MARIA ULFAH, S.Psi., MM
NIP. 199711132005012008

Kepala Bidang PPPA,

IBA NURKASIHANI, S.H, M.H.
NIP. 198005272009032006

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Jalan. A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari 70814
Website : https://dp3ap2kb.tanahlautkab.go.id Email : dinasp3ap2kbtanahlaut@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : JAMI'AH, S.SOS

Jabatan : Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Data dan Informasi

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : MARIA ULFAH, S.Psi., MM

Jabatan : Kepala Dinas

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menegah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanah Laut, 2 September 2025

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
MARIA ULFAH, S.Psi., MM	JAMI'AH, S.SOS
NIP. 199711132005012008	NIP. 197405101994032006

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
TANAH LAUT

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Informasi Data Keluarga (PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK)	Persentase Informasi Data Keluarga yang Valid	80 %
2	- (PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB))	Jumlah Keluarga/Masyarakat yang teredukasi program bangga kencana	52.700 Angka
3	Pelaksanaan Advokasi KIE (Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk)	Jumlah Sasaran Edukasi yang Mendapatkan Edukasi	4 Keluarga
	-	Jumlah Sekolah Siaga Kependudukan yang terbentuk di Sekolah SLTP dan SLTA se Kabupaten Tanah Laut	4 Sekolah
4	Terupdate Data Informasi Keluarga (Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota)	Jumlah Kegiatan Pemutakhiran Data Informasi Keluarga	0 Kegiatan
	-	Persentase Tersedianya Data Mikro di Semua Desa	0 23,70 Persen
5	- (Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal)	Cakupan Pasangan Usia Subur ingin ber KB tidak Terpenuhi (Unmet Need)	8,4 Persen

	-	Jumlah Sasaran Edukasi yang Mendapatkan Edukasi	8,4 Orang
6	Meningkatnya Kapasitas SDM Lini Lapangan KB (Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB))	Persentase SDM penyuluh yang terlatih	100 %
	-	Persentase capaian Pendayagunaan Petugas KB di Lini Lapangan	100 Persen
7	- (Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB)	Persentase Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	100 Persen
8	- (Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal)	Jumlah Kerjasama Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal yang dilaksanakan	4 Kegiatan
9	Pelatihan Teknis Penyuluh KB terkait Updating Data melalui aplikasi SIGA (Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga)	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	11 Laporan
10	- (Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga)	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	1 Laporan
11	Monitoring dan Evaluasi Hasil Updating Data melalui Aplikasi SIGA (Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB)	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	1 Dokumen
12	Pembinaan Rumah DataKU (Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan	10 Unit

	Program Bangga Kencana di Sektor Lain)	Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk	
13	- (Pengendalian Program KKBPK)	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	2 Laporan
14	- (Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana)	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	10 Laporan
15	Pelaksanaan Operasional Bangga Kencana tingkat kecamatan/desa (Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok))	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	10 Laporan
16	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang)	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	1 Dokumen
17	- (Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal)	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	1 Dokumen
18	Advokasi Program Bangga Kecana kepada Stakeholder dan Mitra Kerja (Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja)	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	202 Organisasi

19	Pemilihan Tenaga Lini Lapanagn Berprestasi (Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP))	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	556 Orang
20	- (Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB)	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	1 Dokumen
21	- (Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas)	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	30 Kampung

	Kegiatan Sub Kegiatan Program	Anggaran
	Kegiatan	
1	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	12.366.283
2	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	348.458.761
3	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	869.429.908
4	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	2.900.835.420
5	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	420.374.360
	Sub Kegiatan	
6	Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	12.366.283
7	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	4.430.000
8	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan	169.395.000

	dan Pelayanan KB	
9	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain	64.833.761
10	Pengendalian Program KKBPK	33.100.000
11	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	214.500.000
12	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	171.341.209
13	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	214.000.000
14	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	2.900.835.420
15	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	298.534.360
16	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	109.800.000
17	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	176.550.000
18	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	59.938.699
19	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	121.840.000
	Program	
20	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	360.825.044
21	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	5.377.385.327

Tanah Laut, 2 September 2025

Kepala Dinas,

MARIA ULFAH, S.Psi., MM
NIP. 199711132005012008

Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Data dan Informasi,

JAMI'AH, S.SOS
NIP 197405101994032006

Didownload dari Simpun KABUPATEN TANAH LAUT

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Website : https://dp3ap2kb.tanahlautkab.go.id Email : dinasp3ap2kbtanahlaut@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MAHANI, S.KEP., NERS.

Jabatan : Kepala Bidang KB dan KS

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : MARIA ULFAH, S.Psi., MM

Jabatan : Kepala Dinas

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menegah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanah Laut, 2 September 2025

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
Maria Ulfah, S.Psi., MM	MAHANI, S.KEP., NERS.
NIP. 199711132005012008	NIP 197011251991032007

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
TANAH LAUT

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kepersertaan Keluarga Berencana (PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB))	Persentase Cakupan KB Aktif	77,35 %
2	Meningkatnya Ketahanan dan Keluarga Sejahtera (PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS))	Persentase Keluarga yang diintervensi Poktan Meningkat Kualitasnya	70 %
3	-(Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota)	Persentase Meningkatnya Pelayanan KB	75,70 %
	Meningkatkan PUS memenuhi syarat menggunakan MKJP	Persentase PUS yang menggunakan MKJP	9,2 %
4	Meningkatnya kapasitas Kelompok Kegiatan dan Kesejahteraan Keluarga (Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga)	Jumlah kelompok kegiatan yang terlatih	22 Kegiatan
	Teredukasinya Calon Pengantin dalam Pembinaan Keluaraga	Jumlah Kelompok kegiatan yang terbentuk	252 Kelompok
5	-(Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan	12 Laporan

	Jejaringnya)	Jejaringnya	
6	Tersedianya Kesertaan Pengunaan Kontrasepsi Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP))	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	850 Orang
7	- (Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB)	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	45 unit
8	Terlaksananya Promosi Konseling dan Pembinaan Pelayanan KB (Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya)	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	23 Laporan
9	- (Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi)	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	170 Orang
10	- (Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS))	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	10 Laporan / Dokumen
11	Pendampingan kepada Calon pengantin, keluarga beresiko dan balita stunting oleh kader TPK (Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)))	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1 Laporan
12	Tersalurkannya Bantuan Alat Teknologi Tepatguna bagi kelompok UPPKA (Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	47 Unit

	Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))		
13	Pelatihan Kader Kesejahteraan dan Ketahanan Keluarga (Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	220 Orang
14	Telaksananya Pelatihan bagi Peningkatan Ekonomi Keluarga Akseptor (Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	1 Laporan
15	Pendampingan Calon Pengantin (Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	120 Orang
16	- (Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita))	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	8 laporan
17	- (Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita))	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	8 laporan

	Kegiatan Sub Kegiatan Program	Anggaran
	Kegiatan	
1	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	1.186.745.639
2	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	982.320.034
	Sub Kegiatan	
3	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	55.568.356
4	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	602.566.921
5	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	446.857.623
6	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	24.073.990
7	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	57.678.749
8	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	123.614.244
9	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	330.762.792
10	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	85.228.950
11	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	174.544.324
12	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	162.569.724
13	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	105.600.000
14	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	801.000.000

15	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	961.200.000
	Program	
16	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	5.377.385.327
17	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2.744.520.034

Tanah Laut, 2 September 2025

Kepala Dinas,

Maria Ulfah, S.Psi., MM
NIP. 199711132005012008

Kepala Bidang KB dan KS,

MAHANI, S.KEP., NERS.
NIP 197011251991032007

Didownload dari Simpun KABUPATEN TANAH LAUT

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Jl. A. Syairani Komplek Perkantoran, Pelaihari. Kode Pos 70814

KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR :04 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2025 - 2029

BUPATI TANAH LAUT

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka Bupati wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;

b. Bahwa demi menjadi pedoman sebagaimana mana maksud pada huruf a maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Laut dalam melaksanakan pembangunan priode tahun 2025 – 2029 di pemerintah Kabupaten Tanah Laut secara konsisten dan berkesinambungan perlu dituangkan dalam suatu indikator kinerja utama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Laut;

c. bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 - 2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 _ tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat Il Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-UndangDarurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 _ tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 _ tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang beberapa kali terakhir Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Inodnesia Nomor 6856);

5. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Inodnesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Tanah Laut Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 62);

8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;

11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

12. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 118 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 Nomor 118);

13. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 43 Tahun 2025 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Dan Uraian Tugas Badan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 Nomor 45)

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2025 - 2029.

KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Laut Priode 2025-2029 sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) ini menjadi acuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten

Tanah Laut dalam merencanakan kegiatan setiap tahunnya selama periode 2025-2029

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut.

KEEMPAT : Apabila terdapat kekliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
Pada tanggal 21 Februari 2025

a.n. BUPATI TANAH LAUT
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana,

MARIA ULPAH, S.Psi., M.M
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP 19791113 200501 2 008

Tembusan Yth:
Yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 04 Tahun 2025
TANGGAL : **21 Februari 2025**

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN TANAH LAUT

Kabupaten : Tanah Laut

Nama SKPD : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Tugas : Melaksanakan urusan penunjang pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, bidang pengendalian penduduk dan bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, bidang pengendalian penduduk dan bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera yang terintegrasi di Daerah;
b. Pelaksanaan tugas teknis bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, bidang pengendalian penduduk dan bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera yang terintegrasi di Daerah;
c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, bidang pengendalian penduduk dan bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera yang terintegrasi di Daerah;
d. Pelaksanaan administrasi Dinas;
e. Pembinaan UPT Dinas;
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

No.	Kinerja Utama/ Outcome/Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja Utama		Penjelasan Rumus	Penanggungjawab / Sumber Data
1	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dan Pemenuhan Hak Anak		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Komponen pembentukan IDG mencakup: 1. Keterlibatan Perempuan di parlemen 2. Jumlah Perempuan sebagai tenaga profesional 3. Sumbangan pendapatan Perempuan	DP3AP2KB / BPS /KEMENDUKBANGGA

No.	Kinerja Utama/ Outcome/Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja Utama		Penjelasan Rumus	Penanggungjawab / Sumber Data
			Nilai Kota/Kab Layak Anak (KLA)	KLA diukur berdasarkan 31 indikator yang terbagi dalam 5 klaster utama: hak sipil dan kebebasan, keluarga dan pengasuhan alternatif, Kesehatan dasar kesejahteraan, Pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya, serta perlindungan khusus.	DP3AP2KB / KEMENPPA / DPPPAKB PROV KALSEL
2	Terkendalinya Penduduk		TFR (Total Fertility Rate)	$TFR = \sum$ ASFR X 5/1000 (interval kelompok umur)/(1000 penduduk pada usia 15-49 tahun) TFR adalah jumlah anak rata-rata yang dilahirkan oleh seorang perempuan selama masa reproduksinya. ASFR atau Age-Specific Fertility Rate, adalah ukuran demografi yang menunjukkan angka kelahiran pada kelompok umur tertentu (misalnya, 15-19 tahun) per 1.000 perempuan pada kelompok umur yang sama dalam satu tahun tertentu.	DP3AP2KB / KEMENDUKBANGGA / DISDUKCAPIL

a.n. BUPATI TANAH LAUT

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,

MARIA ULFAH, S.Psi., M.M
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP 19791113 200501 2 008

RENCANA AKSI
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
TAHUN 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Anggaran	TW 1			TW 2			TW 3			TW 4			Sumber Anggaran
											Rp	%	Kinerja	Rp	%	Kinerja	Rp	%	Kinerja	Rp	%	Kinerja	
	--	--	--	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Kepuasan Pegawai pada Layanan Internal Perangkat Daerah		100													100	
							Nilai SAKIP Perangkat Daerah		82													82	
						Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100	-		0%			0%			0%				100	
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun*)		6	29.999.702	7.499.927,00			7.499.925,00		2	7.499.925,00		2	7.499.925,00		2	
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	6	4.999.302	-			-		2	-		2	4.999.302,00		2	
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	-		0%			0%			0%				100	
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	30	5.216.578.774	1.304.144.695,00		30	1.304.144.693,00		30	1.304.144.693,00		30	1.304.144.693,00		30	
						Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	5	4.999.793	1.249.949,00		-	1.249.948,00		-	1.249.948,00		2	1.249.948,00		3	
						Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100	-		0%			0%			0%				100	
						Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	29	23.920.500	-			-			-			23.920.500,00		29	
						Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	7	49.000.000	12.250.000,00		1	12.250.000,00		2	12.250.000,00		2	12.250.000,00		2	
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100	-		0%			0%			0%				100	
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	3.917.212	979.303,00			979.303,00		1	979.303,00			979.303,00			
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	9	214.767.654	-			-		3	-		3	214.767.654,00		3	

						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	9.270.597	2.317.650,00			2.317.649,00			2.317.649,00		1	2.317.649,00			
						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	3	13.260.587	-			-			-			13.260.587,00		3	
						Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	3	31.409.422	7.852.357,00			7.852.355,00		1	7.852.355,00		1	7.852.355,00			
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	113.466.000	-		3	-		3	-		3	113.466.000,00		3	
						Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	12	4.997.023	-		3	-		3	-		3	4.997.023,00		3	
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100	-		0%			0%			0%				100	
						Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	4	15.501.416	3.875.354,00		1	3.875.354,00		1	3.875.354,00		1	3.875.354,00		1	
						Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	26.640.000	6.660.000,00			6.660.000,00			6.660.000,00			6.660.000,00		1	
						Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	83.519.996	20.879.999,00			20.879.999,00			20.879.999,00			20.879.999,00		1	
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	-		0%			0%			0%				100	
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	174.000.000	43.500.000,00		3	43.500.000,00		3	43.500.000,00		3	43.500.000,00		3	
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	362.288.472	90.572.118,00		3	90.572.118,00		3	90.572.118,00		3	90.572.118,00		3	
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	-		0%			0%			0%				100	
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	37.500.000	9.375.000,00		1	9.375.000,00			9.375.000,00			9.375.000,00			

						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	15	222.000.000	55.500.000,00		3	55.500.000,00		5	55.500.000,00		5	55.500.000,00		2	
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	51	21.250.000	5.312.500,00		10	5.312.500,00		15	5.312.500,00		15	5.312.500,00		11	
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	25.000.000	6.250.000,00			6.250.000,00			6.250.000,00			6.250.000,00		1	
	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dan Pemenuhan Hak Anak	Indeks Pemberdayaan Gender	Angka	77,13	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		Persentase Perempuan yang Produktif secara Ekonomi		9														9	
		Nilai Kota/Kab Layak Anak	Nilai	605		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi perempuan yang berperan aktif dalam pemberdayaan ekonomi	Organisasi	100	-		0%			0%			0%					100	
							Persentase SKPD yang melaksanakan PPRG	Persen	100	-		0%			0%			0%					100	
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	53.029.616	-			-			-			53.029.616,00		1	
						Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	Jumlah SDM yangmemperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG	Orang	50	37.388.073	-			-			-			37.388.073,00		50	
						Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan pembinaan pada kelompok industri rumahan	kelompok	0	-		0%			0%			0%						
						Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Orang	980	397.810.977	-			-			-			397.810.977,00		980	
	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dan Pemenuhan Hak Anak	Indeks Pemberdayaan Gender	Angka	77,13	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		Persentase penyelesaian kasus kekerasan pada perempuan	%	70														70	
		Nilai Kota/Kab Layak Anak	Nilai	605		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah yang berpartipasi dalam pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan	Persen	90	-		0%			0%			0%					90	

						Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	6	53.942.898	-			-			-			53.942.898,00		6	
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	6														6	
						Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangakat Daerah	45	6.758.020	-			-			-			6.758.020,00		45	
						Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persen	100	-		0%			0%			0%					100	
						Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik	Orang	16	142.037.870	-			-			-			142.037.870,00		16	
	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dan Pemenuhan Hak Anak	Indeks Pemberdayaan Gender	Angka	77,13	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)		Persentase Forum Anak yang Aktif Berkontribusi dalam Perlindungan	%	100														100	
		Nilai Kota/Kab Layak Anak	Nilai	605		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta dari kecamatan yang berpartisipasi pada Jambore FAD	Kecamatan	0	-		0%			0%			0%						
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	2	152.846.599	-			-			-			152.846.599,00		2	
	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dan Pemenuhan Hak Anak	Indeks Pemberdayaan Gender	Angka	77,13	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		Persentase Penyelesaian Kasus Kekerasan pada Anak	%	65														65	

		Nilai Kota/Kab Layak Anak	Nilai	605		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persen	100	-		0%			0%			0%				100	
						Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA	Jumlah kegiatan pencegahan KtA terpadu	Kegiatan	32	395.359.154	-			-			-			395.359.154,00		32	
						Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persen	100	-		0%			0%			0%				100	
						Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	Orang	50	311.033.941	-			-			-			311.033.941,00		50	
	Terkendalinya Penduduk	TFR (Total Fertility Rate)	Angka	2,14	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK		Persentase Informasi Data Keluarga yang Valid	%	80													80	
						Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah Sasaran Edukasi yang Mendapatkan Edukasi	Keluarga	4	-		0%			0%			0%				4	
							Jumlah Sekolah Siaga Kependudukan yang terbentuk di Sekolah SLTP dan SLTA se Kabupaten Tanah Laut	Sekolah	4	-		0%			0%			0%				4	
						Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Jumlah Kerjasama Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal yang dilaksanakan	Kegiatan	4	12.426.283	-			-			-			12.426.283,00		4	
						Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemutakhiran Data Informasi Keluarga	Kegiatan	0	-		0%			0%			0%					
							Persentase Tersedianya Data Mikro di Semua Desa	23,70 Persen	0	-		0%			0%			0%				23,70	

						Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Laporan	11	52.430.000	-			-			-			52.430.000,00		11	
						Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Dokumen	1	37.395.000	-			-			-			37.395.000,00		1	
						Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk	Unit	10	64.833.761	-			-			-			64.833.761,00		10	
	Terkendalinya Penduduk	TFR (Total Fertility Rate)	Angka	2,14	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)		Jumlah Keluarga/Masyarakat yang teredukasi program bangga kencana	Angka	52700													52700	
							Persentase Cakupan KB Aktif	%	77													77	
						Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Sasaran Edukasi yang Mendapatkan Edukasi	Orang	8,4	-		0%			0%			0%					8,4	
							Cakupan Pasangan Usia Subur ingin ber KB tidak Terpenuhi (Unmet Need)	Persen	8,4	-		0%			0%			0%					8,4	
						Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	Laporan	2	49.100.000	-			-			-			49.100.000,00		2	
						Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Laporan	10	44.770.000	-			-			-			44.770.000,00		10	
						Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Dokumen	1	203.306.176	-			-			-			203.306.176,00		1	

						Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Organisasi	202	27.390.000	-			-			-			27.390.000,00		101	
						Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase SDM penyuluh yang terlatih	%	100	-		0%			0%			0%					100	
							Persentase capaian Pendayagunaan Petugas KB di Lini Lapangan	Persen	100	-		0%			0%			0%					100	
						Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Orang	556	1.352.015.420	-			-			-			1.352.015.420,00		556	
						Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PUS yang menggunakan MKJP	%	0	-		0%			0%			0%						
							Persentase Meningkatnya Pelayanan KB	75,70 Persen	0	-		0%			0%			0%					75,70	
						Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	12	50.200.947	-			-			-			50.200.947,00		12	
						Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Orang	850	331.422.247	-		200	-		200	-		200	331.422.247,00		250	
						Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	unit	45	367.312.248	91.828.062,00		10	91.828.062,00		15	91.828.062,00		20	91.828.062,00		10	
						Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	23	10.573.990	-			-			-			10.573.990,00		23	
						Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Orang	170	108.678.829	-			-			-			108.678.829,00		170	

						Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persen	100	-		0%			0%			0%				100	
						Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Dokumen	1	723.504.360	-			-			-			723.504.360,00		1	
	Terkendalinya Penduduk	TFR (Total Fertility Rate)	Angka	2,14	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		Jumlah Calon Pengantin yang Terpenuhi Syarat Pranikah	Catin	2918													2918	
							Persentase Keluarga yang diintervensi Poktan Meningkat Kualitasnya	%	100													100	
						Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah kelompok kegiatan yang terlatih	kelompok	0	-		0%			0%			0%					
							Jumlah Kelompok kegiatan yang terbentuk	252 Kelompok	0	-		0%			0%			0%				252	
						Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Laporan	1	142.614.539	-			-			-			142.614.539,00		1	
						Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	Unit	47	394.355.500	98.588.875,00		11	98.588.875,00		11	98.588.875,00		11	98.588.875,00		14	
						Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Orang	220	77.527.256	-			-			-			77.527.256,00		220	

						Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	Laporan	1	174.544.871	-			-			-			174.544.871,00		1	
						Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	Orang	120	162.569.724	-			-			-			162.569.724,00		120	

Pelaihari, 21 Februari 2025
Kepala Dinas,

MARIA ULFAH, S.Psi., M.M
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP.197011132005012008

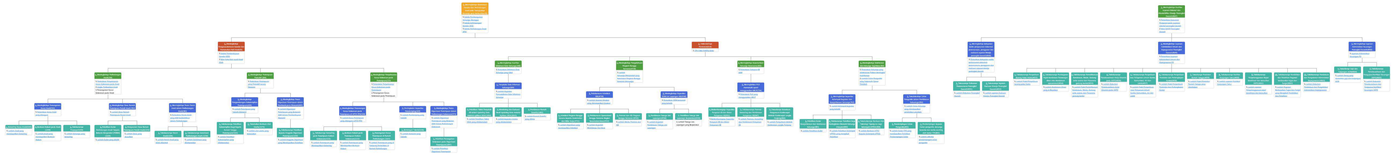

CASCADING DP3AP2KB

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
- Meningkatnya Kesetaraan Gender	Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak serta Terwujudnya Keluarga yang Berkualitas				Indeks Ketimpangan Gender (IKG)		
					Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)		
		Meningkatnya Pangarusutamaan Gender dan Pemenuhan Hak Anak			Indeks Pemberdayaan Gender		Kepala Dinas
					Nilai Kota/Kabupaten Layak Anak		Kepala Dinas
			Meningkatnya Penyelesaian Kasus Kekerasan pada Perempuan		Persentase Penyelesaian Kasus Kekerasan pada Perempuan	2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				Jumlah organisasi perempuan yang berperan aktif dalam perlindungan kekerasan	Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.03.2.01 - Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
					Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota	2.08.03.2.01 - Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				Jumlah kasus perempuan yang ditangani di UPTD PPA	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota	2.08.03.2.02 - Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kepala UPTD PPA
					Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	2.08.03.2.02 - Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kepala UPTD PPA
					Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota	2.08.03.2.02 - Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kepala UPTD PPA

					Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	2.08.03.2.02 - Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kepala UPTD PPA
					Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota	2.08.03.2.02.0005 - layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Kepala UPTD PPA
					Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	2.08.03.2.02.0006 - layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Kepala UPTD PPA
					Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota	2.08.03.2.02.0007 - layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingka Kabupaten/Kota	Kepala UPTD PPA
					Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	2.08.03.2.02.0008 - Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Kepala UPTD PPA
				Jumlah organisasi perempuan yang berperan aktif dalam perlindungan kekerasan	Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.03.2.01.0004 - Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
					Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota	2.08.03.2.01.0006 - Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Meningkatnya Peran Forum Anak Dalam Perlindungan Anak		Persentase Forum Anak yang Aktif berkontribusi dalam Perlindungan	2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				Jumlah Forum Anak yang telah dibentuk	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.06.2.01 - Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
					jumlah OPD kab/kota yang mendapatkan pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.06.2.01 - Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

					Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.06.2.01 - Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
					jumlah SDM OPD kab/kota yang mendapatkan bimtek Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.06.2.01 - Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
					Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.06.2.01.0003 - Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
					jumlah SDM OPD kab/kota yang mendapatkan bimtek Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.06.2.01.0004 - Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
					jumlah OPD kab/kota yang mendapatkan pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.06.2.01.0005 - Pendampingan Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
					jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.06.2.01.0006 - Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Meningkatnya Perempuan Produktif		Persentase Perempuan yang Produktif secara Ekonomi	2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

				Jumlah organisasi perempuan yang berperan aktif dalam pemberdayaan ekonomi	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG	2.08.02.2.01 - Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
					jumlah OPDkab/kota yang mendapatkan pendampingan	2.08.02.2.01 - Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
					Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	2.08.02.2.01 - Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				Jumlah Perempuan yang Terlatih Ekonomi	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.02.2.02 - Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
					Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	2.08.02.2.02 - Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
					jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi	2.08.02.2.02 - Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
					jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan	2.08.02.2.02 - Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				Jumlah organisasi perempuan yang berperan aktif dalam pemberdayaan	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG	2.08.02.2.01.0007 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
					jumlah OPDkab/kota yang mendapatkan pendampingan	2.08.02.2.01.0011 - Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
					Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	2.08.02.2.01.0013 - Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

				Jumlah Perempuan yang Terlatih Ekonomi	Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	2.08.02.2.02.0003 - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
					jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.02.2.02.0007 - Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
					jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi	2.08.02.2.02.0008 - Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
					jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan	2.08.02.2.02.0009 - Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Meningkatnya Perlindungan Anak		Angka Perkawinan Anak	2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Meningkatnya Perlindungan Anak		Persentase Penyelesaian Kasus Kekerasan pada Anak	2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Meningkatnya Perlindungan Anak	Jumlah Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak	proses perumusan kebijakan yang terintegrasi dan berbasis data untuk meningkatkan dimensi-dimensi kualitas keluarga, termasuk legalitas, ketahanan fisik, ekonomi, sosial psikologis, dan sosial budaya, guna menjamin tercapainya kesetaraan gender dan perlindungan hak anak di tingkat kabupaten/kota, sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah.	2.08.04.2.01 - Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				Jumlah pendamping terlatih	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan peningkatan kapasitas	2.08.04.2.02 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

				Jumlah keluarga yang dikonseling	Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan konsultasi dan konseling Lingkup Kabupaten/Kota	2.08.04.2.03 - Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Meningkatnya Perlindungan Anak	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	2.08.07.2.01 - Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kepala UPTD PPA
					Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkatKab/Kota	2.08.07.2.01 - Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kepala UPTD PPA
				Persentase kasus anak yang ditangani	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	2.08.07.2.02 - Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kepala UPTD PPA
					Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota	2.08.07.2.02 - Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kepala UPTD PPA
					Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	2.08.07.2.02 - Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kepala UPTD PPA
					Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	2.08.07.2.02 - Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kepala UPTD PPA
					Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota	2.08.07.2.02 - Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kepala UPTD PPA

			Meningkatnya Perlindungan Anak	Jumlah Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak	proses perumusan kebijakan yang terintegrasi dan berbasis data untuk meningkatkan dimensi-dimensi kualitas keluarga, termasuk legalitas, ketahanan fisik, ekonomi, sosial psikologis, dan sosial budaya, guna menjamin tercapainya kesetaraan gender dan perlindungan hak anak di tingkat kabupaten/kota, sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah.	2.08.04.2.01.0007 - monitoring evaluasi dan pelaporan dalam peningkatan kualitas keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kepala UPTD PPA
				Jumlah keluarga yang dikonseling	Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan konsultasi dan konseling Lingkup Kabupaten/Kota	2.08.04.2.03.0004 - layanan konsultasi dan konseling keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA LingkupKabupaten/Kota	Kepala UPTD PPA
				Jumlah pendamping terlatih	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan peningkatan kapasitas	2.08.04.2.02.0007 - peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kepala UPTD PPA
			Meningkatnya Perlindungan Anak	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	2.08.07.2.01.0006 - koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	Kepala UPTD PPA
					Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkatKab/Kota	2.08.07.2.01.0007 - Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kepala UPTD PPA
				Persentase kasus anak yang ditangani	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	2.08.07.2.02.0008 - Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Kepala UPTD PPA
					Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota	2.08.07.2.02.0009 - layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Kepala UPTD PPA
					Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota	2.08.07.2.02.0010 - layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Kepala UPTD PPA
					Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	2.08.07.2.02.0012 - layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Kepala UPTD PPA

					Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	2.08.07.2.02.0013 - Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Kepala UPTD PPA
		Terkendalinya Penduduk			TFR (Total Fertility Rate)		Kepala Dinas
			Meningkatnya Kepersertaan Keluarga Berencana dan Meningkatnya		Persentase Cakupan KB Aktif	2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
					Jumlah Keluarga/Masyarakat yang teredukasi Program Bangga Kencana	2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Data dan Informasi
				Jumlah Sasaran Edukasi yang Mendapatkan Edukasi	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	2.14.03.2.01 - Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Data dan Informasi
					Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	2.14.03.2.01 - Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Data dan Informasi
					Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	2.14.03.2.01 - Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Data dan Informasi
					Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	2.14.03.2.01 - Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Data dan Informasi
				Persentase SDM penyuluh yang terlatih	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	2.14.03.2.02 - Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Data dan Informasi
				Persentase PUS yang menggunakan MKJP	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	2.14.03.2.03 - Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

					Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	2.14.03.2.03 - Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
					Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	2.14.03.2.03 - Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	2.14.03.2.03 - Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
					Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	2.14.03.2.03 - Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
					Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	2.14.03.2.03 - Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
					Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	2.14.03.2.03 - Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
				Jumlah Kelompok Kegiatan yang dibina	Jumlah DASHAT di Kampung KB	2.14.03.2.04 - Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Data dan Informasi
					Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	2.14.03.2.04 - Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Data dan Informasi
					Jumlah DASHAT di Kampung KB	2.14.03.2.04.0005 - Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Data dan Informasi
					Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	2.14.03.2.04.0007 - Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Data dan Informasi
				Jumlah Sasaran Edukasi yang Mendapatkan Edukasi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	2.14.03.2.01.0008 - Pengendalian Program KKBPK	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Data dan Informasi

					Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	2.14.03.2.01.0011 - Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Data dan Informasi
					Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	2.14.03.2.01.0012 - Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Data dan Informasi
					Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	2.14.03.2.01.0014 - Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Data dan Informasi
				Persentase PUS yang menggunakan MKJP	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	2.14.03.2.03.0001 - Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
					Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	2.14.03.2.03.0003 - Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
					Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	2.14.03.2.03.0006 - Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	2.14.03.2.03.0007 - Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	2.14.03.2.03.0008 - Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
					Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	2.14.03.2.03.0010 - Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
					Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	2.14.03.2.03.0016 - Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

				Persentase SDM penyuluh yang terlatih	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	2.14.03.2.02.0004 - Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Data dan Informasi
			Meningkatnya Ketahanan dan Keluarga Sejahtera		Persentase Keluarga yang diintervensi Poktan Meningkat Kualitasnya	2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
					Jumlah Calon Pengantin yang Terpenuhi Syarat Pranikah	2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
				Jumlah kelompok kegiatan yang terlatih	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	2.14.04.2.01 - Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
					Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	2.14.04.2.01 - Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
					Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	2.14.04.2.01 - Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
					Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk	2.14.04.2.01 - Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
					Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	2.14.04.2.01 - Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

					Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	2.14.04.2.01 - Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
					Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	2.14.04.2.01 - Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
					Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	2.14.04.2.01 - Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
					Persentase sekolah lansia yang dilaksanakan di kelompok Bina Keluarga Lansia	2.14.04.2.01 - Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
				Jumlah Calon Keluarga yang mendapatkan pendidikan pranikah	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	2.14.04.2.02 - Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
					Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga	2.14.04.2.02 - Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
					Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	2.14.04.2.02.0006 - Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
					Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga	2.14.04.2.02.0008 - Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga	Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
				Jumlah kelompok kegiatan yang terlatih	Persentase sekolah lansia yang dilaksanakan di kelompok Bina Keluarga Lansia	2.14.04.2.01.0015 - Pembentukan dan operasional Sekolah Lansia di Kelompok BKL	Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

					Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	2.14.04.2.01.0016 - Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
					Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	2.14.04.2.01.0017 - Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
					Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	2.14.04.2.01.0018 - Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
					Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	2.14.04.2.01.0019 - Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
					Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	2.14.04.2.01.0021 - Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
					Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	2.14.04.2.01.0024 - Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
					Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	2.14.04.2.01.0026 - Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

					Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk	2.14.04.2.01.0028 - Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
			Meningkatnya Kualitas Informasi Data Keluarga		Persentase Informasi Data Keluarga yang Valid	2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Data dan Informasi
				Jumlah Sasaran Edukasi yang Mendapatkan Edukasi	Jumlah dokumen advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal	2.14.02.2.01 - Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Data dan Informasi
					Jumlah Dokumen GDPK 5 Pilar yang telah disusun Tingkat Kabupaten/Kota	2.14.02.2.01 - Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Data dan Informasi
				Jumlah Kegiatan Pemutakhiran Data Informasi Keluarga	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	2.14.02.2.02 - Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Data dan Informasi
					Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	2.14.02.2.02 - Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Data dan Informasi
					Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk	2.14.02.2.02 - Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Data dan Informasi
					Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	2.14.02.2.02.0009 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Data dan Informasi
					Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	2.14.02.2.02.0013 - Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Data dan Informasi

					Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk	2.14.02.2.02.0026 - Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Data dan Informasi
				Jumlah Sasaran Edukasi yang Mendapatkan Edukasi	Jumlah Dokumen GDPK 5 Pilar yang telah disusun Tingkat Kabupaten/Kota	2.14.02.2.01.0025 - Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Data dan Informasi
					Jumlah dokumen advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal	2.14.02.2.01.0027 - Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Data dan Informasi

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
INSPEKTORAT
Jl. A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas, Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan 70814
Telepon (0512) 22384 Pos-el inspekturtanahlaut@gmail.com
Laman https://inspektorat.tanahlautkab.go.id

Pelaihari, 29 Agustus 2025

Nomor : 700.1.2.1/227/LHE AKIP/Insp/ 2025
Sifat : Rahasia
Lampiran : 2 (Dua) berkas
H a l : Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025

Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Laut

di

Pelaihari

Dengan ini kami sampaikan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025 pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Laut dengan uraian sebagai berikut :

1. **Dasar Hukum**
   a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
   b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
   c. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 68 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
2. **Tujuan Evaluasi**
   a. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
   b. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
   c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
   d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP;

e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

3. Ruang Lingkup Evaluasi

Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi :

a. Perencanaan Kinerja Tahun 2025;
b. Pengukuran Kinerja Tahun 2025;
c. Pelaporan Kinerja Tahun 2024;
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Tahun 2024.

Dalam pelaksanaan evaluasi dokumen yang diperlukan adalah :

a. Renstra SKPD tahun 2024-2026 dan Rancangan Renstra tahun 2025-2029;
b. Renja SKPD tahun 2025;
c. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2024 dan 2025 ;
d. Indikator Kinerja Utama (IKU);
e. Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2025;
f. *Cascading*;
g. Pohon Kinerja;
h. Laporan Kinerja tahun 2024;
i. Dokumen lain yang mendukung.

4. Hasil evaluasi

Pelaksanaan Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) tahun 2025 berdasarkan Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Tanah Laut Nomor 800.1.11.1/330/ Insp/ 2025 tanggal 29 Juli 2025. Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, yang selanjutnya diberikan "kategori predikat", untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan kriteria sebagai berikut:

No.	Kategori	Nilai	Interpretasi
1	**AA**	**> 90 – 100**	**Sangat Memuaskan** Telah terwujud Good Governance. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif dan efisien (reform).
2	**A**	**> 80 – 90**	**Memuaskan** Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/ unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil.

3	**BB**	**> 70 – 80**	**Sangat Baik** Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi.
4	**B**	**> 60 – 70**	**Baik** Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja.
5	**CC**	**> 50 – 60**	**Cukup (Memadai)** Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
6	**C**	**> 30-50**	**Kurang** Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
7	**D**	**>0 – 30**	**Sangat Kurang** Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/ perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

Hasil Evaluasi atas akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Laut menunjukkan nilai sebesar 82, 25 dengan predikat **"A".**

Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja "Memuaskan".

Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil.

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut :

Komponen yang di nilai	Bobot	Nilai Evaluasi AKIP di Tahun 2024	Nilai Evaluasi AKIP di Tahun 2025
a. Perencanaan Kinerja	30,00	23,70	24,60
b. Pengukuran Kinerja	30,00	24,00	24,90
c. Pelaporan Kinerja	15,00	12,75	12,75
d. Evaluasi Internal	25,00	20,75	20,00
Nilai Hasil Evaluasi		81,20	82,25
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		A	A

5. **Catatan Hasil evaluasi**

Catatan atas hasil evaluasi akuntabilitas pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Laut tahun 2025 sebagai berikut:

a. Perencanaan Kinerja

Evaluasi atas perencanaan kinerja mencakup penilaian atas ketersediaan dokumen perencanaan kinerja, kualitas dokumen perencanaan kinerja, dan pemanfaatan dokumen perencanaan kinerja. Hasil evaluasi atas komponen perencanaan kinerja menunjukkan nilai sebesar **24,60** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesr **30,00**.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Laut telah menyusun perencanaan kinerja secara memadai. Dokumen perencanaan kinerja disusun dengan baik dan dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan. Namun demikian, terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki yaitu penentuan target kinerja pada dokumen perencanaan kinerja tahun 2025 belum mempertimbangkan capaian kinerja tahun sebelumnya dikarenakan perbedaan sasaran kinerja berdasarkan perbaikan pohon kinerja. Akan tetapi dalam menetapkan target kinerja seharusnya terdapat keselarasan antara masing-masing dokumen

perencanaan kinerja. Belum terdapat rumusan kertas kerja perhitungan target yang memuat analisa dan sumber data yang memadai guna memperoleh indikator dan target kinerja yang memenuhi unsur SMART.

b. Pengukuran Kinerja

Evaluasi atas pengukuran kinerja mencakup penilaian keberadaan, kualitas, dan implementasi pengukuran kinerja, yang meliputi keandalan pengukuran kinerja, kesesuaian data kinerja yang dibutuhkan dalam mengukur capaian kinerja, pemanfaatan teknologi dalam pengumpulan data kinerja serta pemanfaatan pengukuran kinerja dalam penyesuaian-penyesuaian yang perlu dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Hasil evaluasi atas komponen pengukuran kinerja menunjukkan nilai sebesar **24,90** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **30,00.**

Pada komponen pengukuran kinerja, terdapat catatan sebagai berikut :

1) Telah terdapat mekanisme pengumpulan data kinerja akan tetapi belum belum ada prosedur dan penanggungjawab, khususnya terkait kondisi ketika data belum tersedia hingga akhir periode pelaporan.
2) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Laut telah berupaya melakukan efisiensi anggaran dalam mencapai sasaran kinerja, akan tetapi target kinerja kedua sasaran strategis tahun 2024 tidak tercapai yaitu:

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	iBangga	69,00	62,64	90,78%
2	Nilai SAKIP	82,00	80,20	97,80%

c. Pelaporan Kinerja

Evaluasi atas pelaporan kinerja mencakup penilaian atas pemenuhan pelaporan kinerja, penyajian informasi kinerja, dan pemanfaatan atas penyajian informasi dalam pelaporan kinerja tersebut. Hasil evaluasi atas komponen pelaporan kinerja menunjukkan nilai sebesar **12,75** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **15,00.**

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Laut telah membuat Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2024. Laporan kinerja tersebut telah menyajikan realisasi atas target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya, telah menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan kinerja antar Kabupaten, tingkat Provinsi dan tingkat Nasional serta telah menyajikan analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja. LKj Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 telah dipublikasikan melalui *website* PPID dan esr.menpan.go.id.

Namun pada aspek pelaporan masih terdapat catatan terkait laporan kinerja berkala. Laporan kinerja berkala yang telah disusun hanya memuat capaian kinerja tanpa dilengkapi analisis lengkap mengenai kondisi capaian, kendala yang dihadapi, rencana aksi dan tindak lanjut rencana aksi atas capaian kinerja. Anaisis ini penting untuk menunjang penyesuaian strategi dan kegiatan dalam rangka pencapaian kinerja yang lebih baik.

d. Evaluasi Internal

Evaluasi atas akuntabilitas kinerja internal mencakup penilaian atas pemenuhan rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun lalu, dan pemanfaatan atas evaluasi kinerja internal dalam meningkatkan capaian *output* dan capaian *outcome*. Hasil evaluasi atas komponen evaluasi kinerja internal menunjukkan nilai sebesar **20,00** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **25,00**.

Rekomendasi atas hasil evaluasi kinerja internal tahun lalu telah seluruhnya ditindaklanjuti. Namun hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk perbaikan capaian *output* dan *outcome* kinerja perangkat daerah, hal ini ditunjukkan dengan penetapan target kinerja tahun 2025 yang belum sepenuhnya mempertimbangkan indikator SMART, belum adanya monitoring dan evaluasi atas mekanisme pengumpulan data kinerja, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja berkala beum dilaksanakan secara mendalam.

6. Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan, terdapat beberapa hal yang direkomendasikan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Laut untuk ditindaklanjuti sebagai berikut:

a. Menyusun rumusan terkait cara menetapkan target kinerja yang SMART dalam bentuk berita acara dan disepakati bersama para pihak yang memangku target kinerja dari masing-masing sasaran.
b. Melakukan evaluasi dan penyempurnaan atas SOP Pengumpulan dan Pengukuran data kinerja yang telah ada, khususnya dalam mengantisipasi kondisi ketika data belum tersedia saat penyusunan laporan.
c. Melakukan monitoring kinerja secara berkala dan terdokumentasi, disertai dengan analisa yang lengkap, memuat kondisi capaian kinerja triwulanan, kendala yang dihadapi, rencana aksi dan tindak lanjut rencana aksi untuk triwulan berikutnya.
d. Melakukan perbaikan dan penyempurnaan dokumen perencanaan dan pelaporan, serta melakukan pengukuran kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi kinerja berkala.

7. Tindak lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Evaluasi juga mempertimbangkan atas tindak lanjut hasil rekomendasi yang telah diberikan tahun sebelumnya. Berdasarkan hasil pemantauan tindak lanjut evaluasi AKIP tahun sebelumnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Laut telah menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan dan melakukan upaya perbaikan sebagai berikut :

1. Telah melakukan monitoring kinerja berkala setiap triwulan.
2. Pimpinan telah memberikan umpan balik (*feedback*) yang berkelanjutan dalam penilaian kinerja berkala.
3. Perencanaan kinerja telah menyajikan hubungan kinerja, strategi, kebijakan, dan aktivitas antarbidang/ dengan tugas dan fungsi lain yang berkala *(crosscutting)* dalam dokumen perencanaan. terutama pada cascading.
4. Telah menyampaikan laporan monitoring evaluasi kinerja triwulan tahun 2025 kepada Inspektur.

Demikian disampaikan hasil evaluasi terhadap akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Laut, atas perhatian dan kerjasama yang baik di ucapkan terima kasih.

Plt. Inspektur,

Hj. Riva Mahrani,ST, CGCAE
Pembina (IV/a)
NIP. 19770223 200604 2 009

Tembusan :

1. Bupati Tanah Laut di Pelaihari
2. Menteri PAN dan RB di Jakarta
3. Arsip

AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2025

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Jawaban	Nilai
1	PERENCANAAN KINERJA	30,00		24,60
1.1	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	6,00	A	5,40
1.2	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)	9,00	BB	7,20
1.3	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	15,00	BB	12,00
2	PENGUKURAN KINERJA	30,00		24,90
2.1	Pengukuran Kinerja telah dilakukan	6,00	BB	4,80
2.2	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	9,00	A	8,10
2.3	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	15,00	BB	12,00
3	PELAPORAN KINERJA	15,00		13,50
3.1	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	3,00	A	2,70
3.2	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/ kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaannya	4,50	A	4,05
3.3	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/ kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	7,50	BB	6,00
4	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	25,00		20,00
4.1	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	5,00	BB	4,00
4.2	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	7,50	BB	6,75

4.3	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja	12,50	BB	10,00
HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA				82,25
KESIMPULAN				A
INTERPRESTASI				Memuaskan

Plt. Inspektur,

Hj. Riva Mahrani,ST, CGCAE
Pembina (IV/a)
NIP. 19770223 200604 2 009

Dokumen yang menjadi perhatian:

a. Perencanaan Kinerja dan Evaluasi Kinerja

Renstra 2024-2026

Rencana Strategis (Renstra) 2024-2026
Dinas P2KBP3A Kabupaten Tanah Laut

Tabel T-C.25

Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran PD		Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun Ke		
				Realisasi 2022	Proyeksi 2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatkan layanan dan aksesibilitas kesehatan		Angka Harapan Hidup	69,86	69,94	69,96	69,98	70
		Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	1,20	1,15	1,05	1,03	1,00
2	Meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan		Indeks Pembangunan Gender	87,28	87,30	87,32	87,34	87,36
		Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender	72,86	73	73,05	73,10	73,15
		Meningkatnya Perlindungan Anak	Persentase Anak Korban Kekerasan yang di tangani	100	100	100	100	100
3	Meningkatkan SAKIP Kabupaten		Nilai SAKIP Kabupaten	67,28 (B)	69,00 (B)	70,01 (BB)	75,00 (BB)	80,01 (A)
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DP2KBP3A	Nilai Sakip DP2KBP3A	74,00 (BB)	80,01	82	83	85

30

Rancangan Renstra 2025-2029

Rencana Strategis (Renstra) 2025-2030
Dinas P3AP2KB Kabupaten Tanah Laut

TABEL 3.1.

TEKNIK MERUMUSKAN TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK, PENGENDALAIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Baseline 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Meningkatnya Kesetaraan Gender	Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak, serta Terwujudnya keluarga yang Berkualitas		Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,421	0,419	0,417	0,357	0,355	0,295	0,293	
			Indeks Pembangunan Keluarga (IBangga)	62,64	63	63,5	63,75	64	64,25	64,5	
		Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dan Pemenuhan Hak Anak	Indeks Pemberdayaan Gender	76,45	77,13	77,81	78,49	79,17	79,85	80,53	
			Nilai Kota/Kab Layak Anak	575	605	650	705	755	805	850	
		Terkendalinya Penduduk	TFR (Total Fertility Rate)	1,8	2,14	2,12	2,10	2,08	2,05	2,03	

Renja Murni 2025

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tujuan dan sasaran yang ingin di capai Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut :

1. **Tujuan**
   a. Meningkatnya Peran Perempuan dalam Pembangunan
   b. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah
2. **Indikator Tujuan**
   a. Indeks Pembangunan Gender
   b. Nilai SAKIP Kabupaten
3. **Sasaran Strategis**
   a. Meningkatnya Kesejahteraan Keluarga
   b. Berdayanya Kelompok Rumah Tangga Perempuan
   c. Meningkatnya kinerja tata kelola Perangkat daerah yang akuntabel
4. **Indikator Sasaran Strategis**
   a. Indeks Pembangunan Keluarga (IBangga)
   b. Indeks Pemberdayaan Gender
   c. Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Renja Perubahan 2025

sinergitas pelaksanaan pembangunan dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Laut yaitu :

1. Tujuan
   a. Meningkatnya Peran Peempuan dalam Pembangunan
   b. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2. Indikator Tujuan
   a. Indeks Pembangunan Gender
   b. Nilai SAKIP Kabupaten
3. Sasaran Strategis
   a. Meningkatnya Kesejahteraan Keluarga
   b. Berdayanya Kelompok Rumah Tangga Perempuan
   c. Meningkatnya Kinerja Tata Kelola Perangkat Daerah yang Akuntabel
4. Indikator Sasaran Strategis
   a. Indeks Pembangunan Keluarga (IBangga)
   b. Indek Pemberdayaan Gender (IDG)
   c. Nilai SAKIP Perangkat Daerah

PK Murni Kepala Dinas

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN TANAH LAUT

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
A.	KINERJA UTAMA		
1.	Meningkatnya Peran Perempuan dalam Mencapai Keluarga yang Berkualitas	Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	71.33
		Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0.43
2.	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dan Pemenuhan Hak Anak	Indeks Pemberdayaan Gender	73.10
		Nilai Kota/Kab Layak Anak	700 (Madya)
3.	Terkendalinya Penduduk	TFR (Total Fertility Rate)	2.0
4.	Meningkatnya Kinerja Tata Kelola Perangkat Daerah yang Akuntabel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82

Konsistensi keselarasan Penetapan Target Kinerja dari mulai dokumen perencanaan paling atas sampai dengan turunannya ke PK, jika terjadi perubahan target agar dibuatkan kertas kerja analisa perubahan atas target tersebut.

b. Pengukuran Kinerja dan Evaluasi Kinerja

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT DP2KBP3A		
	Nomor SOP	01 / SOP/ DP2KBP3A/XI/2024
	Tanggal Pembuatan	01 November 2024
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal pengesahan	02 November 2024
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas
	Nama SOP	Pengumpulan Data Pengukuran Kinerja

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan. 2. Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 4. Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. 5. Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2016 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja DP2KBP3A Kabupaten Tanah Laut. 6. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 77 Tahun 2020 tentang Analisi Beban Kerja DP2KBP3A Kabupaten Tanah Laut.	1. Memiliki kewenangan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). 2. Memiliki Kemampuan dalam menyusun dan menganalisis data kinerja SKPD.
Keterkaitan	**Peralatan/Perlengkapan**
• SOP Penyusunan Renstra • SOP Penyusunan RKA • SOP Penyusunan Penetapan Kinerja • SOP Penyusunan Lakip • SOP Penyusunan Laporan Tahunan • SOP Penyusunan Renja • SOP Penyusunan LPPD	1. Renstra SKPD 2. Renja 3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD 4. Dokumen Perjanjian Kinerja 5. Laporan Realisasi Keuangan 6. Alat Tulis Kantor 7. Perangkat Komputer
Peringatan	**Pencatatan dan pendataan**
1. Apabila pengumpulan data kinerja tidak terselesaikan dengan baik dan benar maka kegiatan pelaporan akan terhambat.	1. Indikator Kinerja, target, realisasi, dan persentase capaian kinerja 2. Kendala, analisis keberhasilan/permasalahan, rencana aksi dan tindak lanjut

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA					PERSYARATAN / KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KET
		Staf	Subbag Perencanaan	Bidang	Sekretaris	Kepala Dinas				
1	Memberikan disposisi kepada sekretaris untuk melaksanakan pengumpulan data kinerja.							30 (menit)	Disposisi	Kadis
2	Meneruskan disposisi dan memberikan arahan kepada Kasubbag Perencanaan untuk melakukan pengumpulan data kinerja.							30 (menit)	Disposisi	Sekretaris
3	Menerima disposisi dan memerintahkan staf untuk menyampaikan format permintaan data dan informasi kinerja kepada seluruh Kabid dan Kasubbag						Dokumen	1 (jam)	Dokumen format data	Kassubag RK
4	Menyampaikan format permintaan data dan informasi kinerja kepada seluruh Kabid dan Kassubag						Dokumen	1 (jam)	Dokumen hasil pelaksanaan kegiatan per triwulan	Staf
5	Menghimpun data dan informasi kinerja dari masing Kabid yang telah terkumpul dan menyampaikannya kepada Kasubbag Perencanaan						Dokumen	7 (hari)	Rekap data kinerja	Staf
6	Menganalisa dan mengevaluasi data dan informasi kinerja yang telah terkumpul sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja						Dokumen	14 (hari)	Dokumen rekap kinerja hasil capaian per triwulan	Kassubag RK

Kepala Dinas,

MARIA ULFAH, S.Psi., M.M
NIP. 19[illegible]1132005012008

Belum ada aktivitas/ mekanisme untuk mengantisipasi kondisi ketika data belum tersedia saat penyusunan laporan

c. Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Kinerja

LAPORAN KINERJA KEGIATAN KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN ANGGARAN 2025

SKPD : Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut
Bulan : Maret

No	Unit Kerja		Indikator			Target Kinerja	Alokasi Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi				Sisa Anggaran (Rp)	Permasalahan/Kendala	Upaya Mengatasi Masalah/Rencana Aksi
								Fisik		Keuangan				
								Kinerja	%	Rp	%			
1	2		3			4	5	6	7=(6/4)	8	9	10=5-8	11	
1	Program	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					6.661.286.450,45			1.428.601.453	21%	5.259.684.997		
1	Kegiatan	Perencanaan, Pengangguran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Masukan		Dana yang dibutuhkan		34.199.804,36			2.460.000		32.599.804,36		
			Output		Indeks Kepuasan Sekretariat Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	85 Nilai								
			Out-Com		Persentase capaian perencanaan, pengenggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%								
1.1	Sub Kegiatan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Masukan		Dana yang dibutuhkan		26.999.702			2.460.000	8%	22.599.702		
			Output		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen			6					
1.2	Sub Kegiatan	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Masukan		Dana yang dibutuhkan		4.999.302,36				0%	4.999.302,36		
			Output		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan			6					
2	Kegiatan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Masukan		Dana yang dibutuhkan		5.221.573.366,98			1.208.358.477		4.013.230.089,98		
			Output		Indeks Kepuasan Sekretariat Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	85 Nilai								
			Out - Com		Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%								
2.1	Sub Kegiatan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Masukan		Dana yang dibutuhkan		5.296.578.774			1.208.358.477	23%	4.088.220.297,00		
			Output		Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 orang/bulan		3	25					
2.2	Sub Kegiatan	Pelaksanaan Pembayaran dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Masukan		Dana yang dibutuhkan		4.999.752,98				0%	4.999.752,98		
			Output		Jumlah Dokumen Pembayaran dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5 Dokumen			5					
3	Kegiatan	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Masukan		Dana yang dibutuhkan		72.920.500			-		72.920.500		
			Output		Indeks Kepuasan Sekretariat Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	85 Nilai								
			Out - Com		Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%								
3.1	Sub Kegiatan	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Masukan		Dana yang dibutuhkan		72.920.500				0%	Rp 72.920.500		
			Output		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	30 Paket			5					

VII	Program	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK			Dana yang dibutuhkan		706.390.695			43.235.660	6%			
1	Kegiatan	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Masukan		Dana yang dibutuhkan		196.336.154			29.648.660		365.716.494		
			Output		Persentase Penyelenggaraan Pengaduan Perlindungan Anak dan Tindakan kekerasan yang dilayak tanpa	100%								
			Out - Com		Persentase Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	100%								
1.1	Sub Kegiatan	Pengadaan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA	Masukan		Dana yang dibutuhkan		27.5.268.154			29.648.660	7,50%	269.719.494		
			Output		Jumlah kegiatan pencegahan KtA terpadu	32 kegiatan		5	15,63					
2	Kegiatan	Penyediaan Layanan bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Masukan		Dana yang dibutuhkan		311.033.941			13.587.000		297.446.941		
			Output		Persentase Penyelenggaraan Pengaduan Perlindungan Anak dan Tindakan kekerasan yang dilayak tanpa	100%								
			Out - Com		Persentase Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kesemangan Kabupaten/Kota	100%								
2.1	Sub Kegiatan	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Masukan		Dana yang dibutuhkan		311.033.941			13.587.000	4,37%	297.446.941		
			Output		Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	50		8	16					
	TOTAL						12.629.484.748,36		9,80	1.814.837.233,09	14,37%	10.814.627.413,36		

Catatan : Anggaran diatas berdasarkan pagu anggaran efisiensi tahun anggaran 2025

Pelaihari, 08 April 2025
Kepala Dinas P3AP2KB Tanah Laut,

MARIA ULFAH, S.Psi, M.M.
NIP. 19791113200512004

Laporan monitoring kinerja berkala belum memuat analisa yang lengkap untuk digunakan sebagai penyesuaian strategi dan aktivitas dalam mencapai kinerja

Plt. Inspektur,

Hj. Riya Mahrani,ST, CGCAE
Pembina (IV/a)
NIP. 19770223 200604 2 009